



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

Kabupaten Langkat
2025 - 2026

BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT





BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pereencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 567);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan untuk periode 2 (dua) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPD Kabupaten Langkat merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) RPD Kabupaten Langkat merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPD Kabupaten Langkat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (4) RPD Kabupaten Langkat berpedoman pada RPJPD Kabupaten Langkat dan memperhatikan RPD Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

Bab V Tujuan dan Sasaran

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah

Bab IX Pebutup

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Langkat.
- (2) Pengendalian dan Evaaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pelaksanaan RPD Kaabupaten Langkat; dan
 - b) Hasil RPD Kabupaten Langkat.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud paada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- 1) Perubahan RPD Kabupaten Langkat dapat dilakukan apabila:
 - a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi eksisting;
 - b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c) Terjadi perubahan yang mendasar dan/atau perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan RPD Kabupaten Langkat, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 31. 1. 2024

Plt. BUPATI LANGKAT,

WAKIL BUPATI

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 31. 1. 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024 NOMOR : 2

Lampiran Peraturan Bupati Langkat
Nomor : Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program



Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024. Di sisi lain, dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dimana aturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Kabupaten Langkat yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2024 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir pada tahun 2024, maka tahun perencanaan 2025 sampai tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Menindaklanjuti tidak adanya platform politik dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 sebagai cita-cita pembangunan, Dokumen



Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 mengacu terhadap RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 terbagi menjadi 4 periode tahun perencanaan jangka menengah. Periode pertama adalah tahun 2005 – 2010, periode kedua adalah tahun 2010-2015, periode ketiga ialah tahun perencanaan jangka menengah tahun 2015-2020, dan terakhir ialah periode tahun 2020-2025. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan tahapan terakhir perencanaan jangka panjang daerah. Sehingga ruang untuk memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Langkat telah dapat mencapai Visi dan Misi daerah harus tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2025-2026.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Langkat tahun 2025-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2025; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019-2024; (3) RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026; (4) Isu-isu strategis yang berkembang; (5) Kebijakan nasional; dan (6) Regulasi yang berlaku.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Langkat tahun 2005-2025, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Langkat tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Penentuan program dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 agar memperhatikan:



1. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022
2. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
3. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
4. Kebijakan Nasional;
5. Regulasi yang Berlaku;
6. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) Pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 dengan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023. RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan RPJMD Transisi menunggu terlaksananya Pemilukada serentak pada Tahun 2024.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024-2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari



Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Lankat;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil



Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir Pada Tahun 2024;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 nomor 01);
38. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);
40. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.



1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan dokumen transisi yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah karena terdapat jeda antara periode RPJMD yang berakhir pada tahun 2024 dengan periode RPJMD selanjutnya. Dokumen ini merupakan dokumen pengganti RPJMD pada masa transisi, sehingga dokumen RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan. RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 harus mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Langkat dengan RPD Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, maka penyusunan RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 telah memperhatikan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan umum serta prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.



1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Langkat dengan RPJPD Kabupaten Langkat

Penyusunan RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 salah satunya mempedomani arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Langkat 2005-2025. RPD ini sendiri salah satunya menerjemahkan rencana jangka panjang sampai dengan 2025, karena periode RPD ini beririsan dengan sisa periode dalam RPJPD Kabupaten Langkat yang baru berakhir di tahun 2025.

1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Langkat RKPD Kabupaten Langkat

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”. Juga, Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.



Hubungan RPD sebagai pengganti RPJMD ketika Kabupaten Langkat dipimpin oleh Penjabat Wali Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan RKPD sebetulnya sama dengan hubungan RPJMD dan RKPD dalam kondisi pergantian kepala daerah berjalan normal, tidak ada pilkada serentak 2024. Berdasarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 maka penyusunan RKPD Kabupaten Langkat tahun 2025 sampai dengan 2026 akan mengacu pada RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 ini. Di samping itu, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan daerah RKPD yang akan disusun pada periode RPD ini juga akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada tiap tahunnya, juga mengacu pada RKP dari pemerintah pusat, dan mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Utara beserta dengan RKPD turunannya.

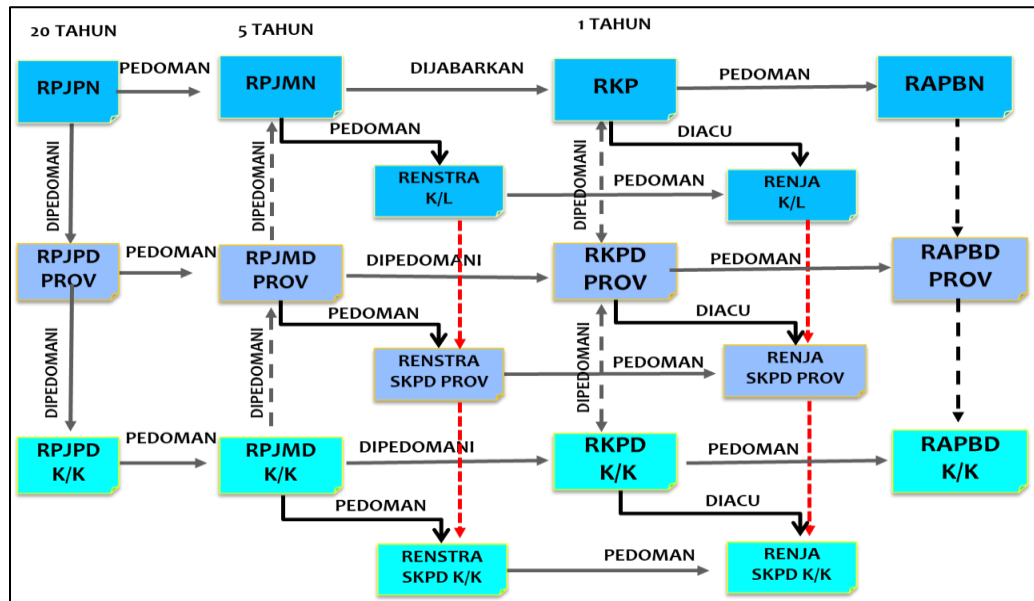
1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Langkat dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

RPD Kabupaten Langkat Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa RPD yang disusun menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPD dan menjadi acuan juga dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun pada tiap tahunnya.

Dengan memposisikan RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selevel dengan RPJMD, maka secara garis besar hubungan RPD



dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



1.3.5 Hubungan RPD Kabupaten Langkat dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kabupaten Langkat

Penyusunan RPD Kabupaten Langkat juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033 melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

1.3.6 Hubungan RPD Kabupaten Langkat Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan pasca 2015 yang memberikan arahan tentang pentingnya 3 (tiga) dimensi



pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. Agenda ini diimplementasikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen ini merupakan kiblat pembangunan ekonomi global, dan Indonesia memiliki “batas akhir” pencapaian target-targetnya pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, sebagaimana terinci pada Tabel SDGs.

Terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkannya strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.



Tabel I-1. Daftar Tujuan Pembangunan Dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Tujuan Pembangunan	Σ Target
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	7 target
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan	8 target
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia	13 target
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang	10 target
5.	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan	9 target
6.	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang	8 target
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang	5 target
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang	12 target
9.	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi	8 target
10.	Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara	10 target
11.	Menjadikan Kabupaten dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berke-lanjutan	10 target
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	11 target
13.	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	5 target
14.	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	10 target



15.	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati	12 target
16.	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan	12 target
17.	Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	19 target

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan, dan sasaran RPD.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan,



penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Langkat.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN;

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPD.

BAB II. GAMBARAN UMUM;

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Langkat yang meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, capaian kinerja visi misi kepala daerah, kesejahteraan masyarakat, daya saing dan pelayanan umum. Gambaran umum kondisi Kabupaten Langkat saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam dua tahun mendatang.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah empat tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan dua tahun ke depan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama dua tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum.



BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026, sekaligus juga dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagai representasi dari tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2025-2026.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah sampai pada tahun 2026 mendatang

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX. PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah sebesar 6.263,29 km² atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Sumatera Utara. Posisi Astronomis Kabupaten Langkat adalah 3°14' Lintang Utara - 4°13' Lintang Utara dan 97°52' Bujur Timur - 98°45' Bujur Timur. Kabupaten Langkat terletak di bagian utara dan di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang mempunyai batas-batas administratif Kabupaten Langkat antara lain :

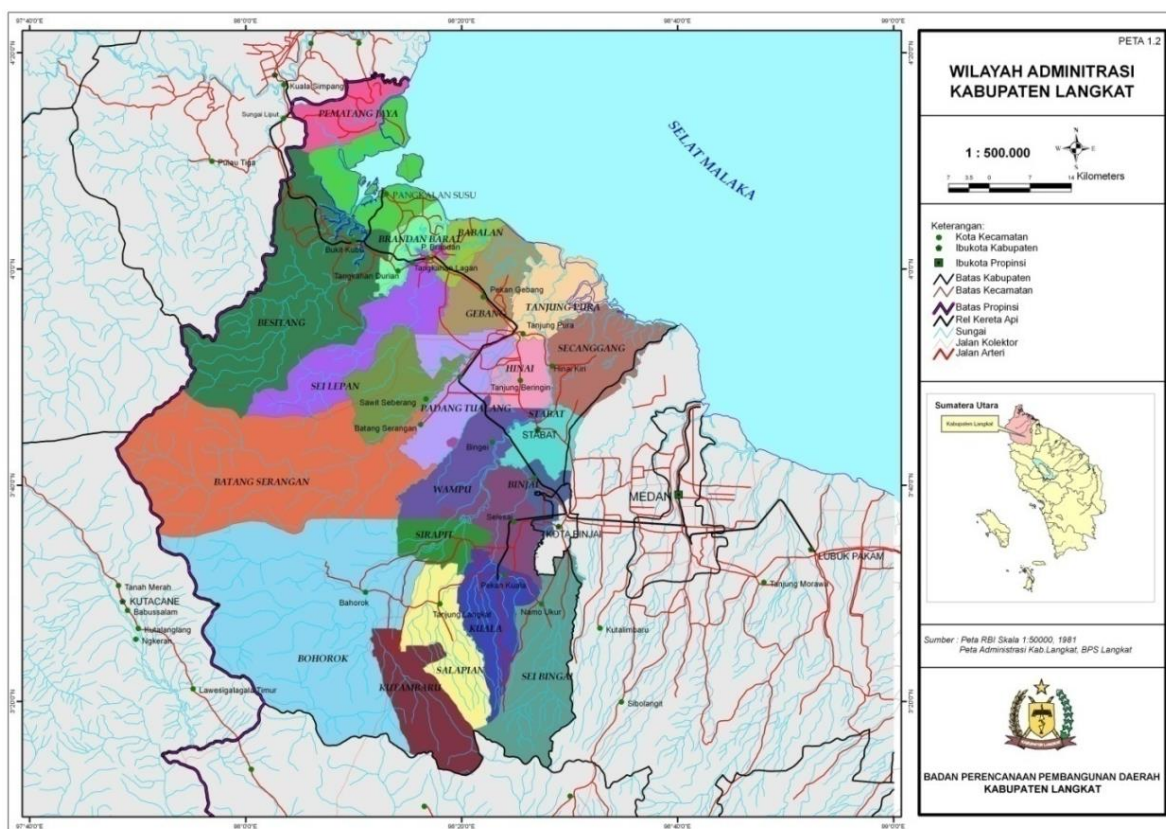
- Sebelah Utara : Provinsi NAD, Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karo, Kota Binjai
- Sebelah Barat : Provinsi NAD
- Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan jalur lintas antar Daerah, kondisi wilayah Kabupaten Langkat dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, khususnya untuk pantai Timur Sumatera Bagian Utara, yakni jalur Medan–Banda Aceh. Kabupaten Langkat juga berada di jalur lalu lintas jalan Provinsi poros Binjai–Bukit Lawang yang merupakan jalur wisata alam dan konservasi TN Gunung Leuser.

Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu ;

- Langkat Hulu seluas 211.029 ha., wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai.

- Langkat Hilir seluas 250.761 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura.
- Teluk Aru seluas 164.539 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lengan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kab. Langkat

Sumber : RTRW kab. Langkat Tahun 2013-2033

Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri dari 23 wilayah Kecamatan, 240 Desa dan 37 Kelurahan. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, Kecamatan Bahorok merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Langkat, dengan luas 1.101,83 Km² atau 17,59% dari luas Kabupaten Langkat. Kecamatan dengan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km² atau 0,67% dari luas Kabupaten Langkat. Kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak



adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan).

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah di Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas	
			Desa	Kel.	Km ²	%
1	Bahorok	Pekan Bahorok	18	1	1.101,8 ₃	17,59
2	Sirapit	Sidorejo	10	0	98,5	1,57
3	Salapian	Minta Kasih	16	1	221,73	3,54
4	Kutambaru	Kutambaru	8	0	234,84	3,78
5	Sei Bingei	Namu Ukur Selatan	15	1	333,17	5,32
6	Kuala	Pekan Kuala	14	2	206,23	3,29
7	Selesai	Pekan Selesai	13	1	167,73	2,68
8	Binjai	Kwala Begumit	6	1	42,05	0,67
9	Stabat	Stabat Baru	6	6	108,85	1,74
10	Sei Wampu	Bingai	13	1	194,21	3,10
11	Batang Serangan	Batang Serangan	7	1	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	Sawit Seberang	6	1	209,10	3,34
13	Padang Tualang	Tanjung Selamat	11	1	221,14	3,53
14	Hinai	Kebun Lada	12	1	105,26	1,68
15	Secanggang	Hinai Kiri	16	1	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	Pekan Tj. Pura	18	1	179,61	2,87
17	Gebang	Pekan Gebang	10	1	178,49	2,85
18	Babalan	Pelawi Utara	4	4	76,41	1,22
19	Sei Lapan	Alur Dua	9	5	280,68	4,48
20	Brandan Barat	Tangkahan Durian	5	2	89,80	1,43
21	Besitang	Pekan Besitang	6	3	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	9	2	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	Limau Mungkur	8	0	209,00	3,34
JUMLAH			240	37	6,263,2 ₉	100

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2023



B. TOPOGRAFI

Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu sungai, dengan ketinggian antara 0-1.200 mdpl, dengan garis pantai sepanjang 110km. Bagian Timur Laut berada perbukitan di bagian Timur Laut disekitar Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Gebang. Daerah tersebut rata-rata memiliki ketinggian 0-4 mdpl, meliputi Kecamatan Pematang Jaya, Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lapan, Babalan, Gebang, Tanjung Pura, dan Secanggang.

Bagian Barat sampai dengan Barat Daya relatif datar sampai berikot dengan ketinggian 0-30 mdpl. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Stabat, Binjai, Hinai, Wampu, Padang Tualang, Selesai, Sawit Seberang, sebagian Sei Lapan, sebagian Besitang, sebagian Kuala, dan sebagian Sei Bingai.

Daerah yang berbatasan dengan Karo, Aceh Tenggara dan Gayo Luwes bergelombang sampai bergunung yang relatif terjal, dengan ketinggian antara 30 – 1200 mdpl. Daerah tersebut merupakan Hutan Lindung kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kecamatan yang termasuk daerah sebagian Besitang, Sei Lapan, Bahorok, Batang Serangan, Salapian, dan Sei Bingai.

C. HIDROLOGI

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, sungai-sungai yang berada di wilayah kabupaten Langkat masuk dalam Wilayah Sungai Wampu-Besitang. DAS yang masuk dalam wilayah sungai tersebut meliputi DAS Damar Condong, DAS Pangkalan Susu, DAS Simpang Kiri, DAS Pardongkelan, DAS Besitang, DAS Beras Basah, DAS Tenggulung, DAS Lapan, DAS Karakunda,



DAS Gebang, DAS Wampu, DAS Tanjung Ibus dan DAS Sembilan.

DAS Wampu adalah merupakan DAS terluas di wilayah Kabupaten Langkat, dengan laus areal mencapai 416,175.19 Ha. Tingkat kekritisian lahan DAS Wampu mencapai 87,103.16 Ha atau 20.08% di mana sub DAS Lau Biang Hulu merupakan wilayah yang memiliki kekritisian lahan paling luas yaitu 25,186.16 Ha atau 25.17% dari luasan Sub DAS Lau Biang Hulu atau 6.05% dari luasan DAS Wampu.

b) Sungai

Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 buah aliran sungai besar dan kecil, Berdasarkan Klasifikasi sungai menurut Kern dalam Maryono, A., 2005, Sungai Wampudan Sungai Batang Serangan masuk dalam kategori sungai besar (sungai dengan lebar lebih dari 80m), Sedangkan Sungai Besitang, Sungai Musam, Sungai Sei Lapan, dan Sungai Bahorok termasuk kategori Sungai (sungai dengan lebar s-d 80m), sungai-sungai yang lain termasuk kategori sungai menengah dan sungai kecil (sungai menengah dengan lebar 10m s/d 20m). keberadaan sungai tersebut merupakan potensi fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk Irigasi dan budidaya air tawar.

Tabel 2.2
Data Aliran Sungai di Kabupaten Langkat

No	Nama Sungai	Luas (Km ²)	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (M)	Isi Normal (Km ³)
1.	Wampu	2.569	Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Stabat, Binjai, Secanggang	105	100	80
2.	Bt. Serangan	1.413	Padang Tualang, Tg. Pura	80	100	43
3.	Besitang	440	Besitang	83	50	8
4.	Musam	175	Pdg. Tualang	25	43	18
5.	Lapan	825	Babalan	80	40	9



No	Nama Sungai	Luas (Km ²)	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (M)	Isi Normal (Km ³)
6.	Bahorok	150	Bahorok	25	40	8
7.	Mencirim	43	Bujai, Wampu	38	38	13
8.	Kr. Gading	160	Secanggang, Stabat	27	30	2
9.	Bekulap	134	Salapian, Kuala	40	30	10
10.	Bingai	717	Sei Bingei, Binjai, Stabat	67	30	15
11.	Begumit	347	Kuala, Selesai	34	30	13
12.	Tenang	144	Salapian	47	30	12
13.	Dendang	160	Stabat	27	30	2
14.	Bagerpang	57	Bahorok	20	25	5
15.	Salapian	145	Salapian	27	25	9
16.	Bekiun	94	Kuala, Salapian	25	20	6
17.	Gergas	58	Bahorok, Stabat	24	15	3
18.	Tembo	42	Kuala	27	15	4
19.	Besilam	288	Stabat, P. Tualang, Binjai	45	15	13
20.	Temuyuk	5	Salapian	4	10	1
21.	Bengaru	18	Sei Bingei	10	10	3
22.	Salaon	6	Sei Bingei	5	10	1
23.	Menjahong	18	Sei Biangei, kuala	13	10	3
24.	Belengking	40	Stabat	17	10	1
25.	Serapuh	40	Tanjung Pura	10	15	1
26.	Alur Hitam	18	Gebang	10	10	0,5

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

D. KLIMATOLOGI

Kabupaten Langkat memiliki iklim tropis basah, dimana sepanjang tahun merupakan bulan basah (curah hujan diatas 100 mm3/bulan) tanpa ada bulan kering, sehingga bisa disebut hujan hampir merata sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan tertinggi untuk tiga tahun terakhir terjadi di bulan Mei yaitu 300 mm3 dengan curah hujan terendah terjadi di bulan Pebruari yaitu 116 mm3. Berdasarkan klarifikasi Schmidt-Ferguson, wilayah Kabupaten Langkat termasuk tipe iklim A dimana musim kemarau terjadi pada bulan Pebruari-Maret dan musim hujan pada bulan September sampai dengan Februari. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.000 mm sampai dengan 3.000 mm



pertahun. Suhu rata-rata minimum berkisar antara 230 – 250 C dan rata-rata maksimum 300 – 330 C, serta kelembaban udara relatif antara 65% - 75%.

Di Kabupaten Langkat juga terdapat fenomena alam yang disebut angin Bahorok, yaitu angin kencang dan kering yang berhembus dari arah Samudera Hindia melewati perbukitan daerah Bahorok menuju ke arah dataran rendah bagian timur. Angin tersebut biasa terjadi di pertengahan tahun.

E. GEOLOGI

a) Struktur dan Karakteristik.

Jenis tanah di Kabupaten Langkat.

- Dataran sepanjang pantai terdiri dari tanah alluvial.
- Dataran rendah terdiri dari jenis gleihumus rendah, hidromofil kelabu dan plarosal.
- Dataran tinggi dan perbukitan terdiri dari tanah pobsolid merah kuning.

Adapun susunan batuan (geologi) di Kabupaten Langkat adalah :

- QH = Alluvium : Kerikil, Pasir, dan Lempung.
- Qpme = Formasi Medan : Bongkahan – bongkahan Kerikil, Pasir, Lanau dan Lempung.
- QTjr = Formasi Juru Rayeu : Batupasir berlapis selang-seling dan Berlumpur;
- Qvt = Tufa Toba : Tufa riodasit, sebagian terlaskan;
- Qvbj = Satuan Binjai : Breksi aliran bersusun andesit sampai desit;
- Ppbl = Formasi batu Gamping Batumilmil : Batu Gamping dan Rijang;
- Pub = Formasi Bahorok : Wakemalihan, Batusabak, arenit, kuarsa malihan, batulanau malihan, konglomerat;



- Tps = Formasi Seurela : Batupasir berirama, batulumpur, dan konglomerat;
- Tuk = Formasi Keutapan : Batupasir berlapis selang-seling dan berlumpur;
- Tmb = Formasi Baong : Batulumpur (beberapa bergalukonit) dan batu pasir;
- Top = Formasi Bruksah : Batupasir dan konglomerat.

b) Potensi

Berpedoman kepada kriteria peruntukan pertambangan dan pembagian Wilayah Pengembangan di Kabupaten Langkat, maka potensi yang ada dan mendapat prioritas pengembangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4
Jenis Bahan Galian Di Kabupaten Langkat

No	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Kegunaan
1.	Batu Gamping	Kec. Salapian	Bahan bangunan/jalan, dan bahan baku semen
2.	Kulit Kerang	Kec. Bahorok, Salapian dan Hinai	Bahan baku utama/penolong sektor industry
3.	Fosfat	Bahorok	Pembuatan pupuk
4.	Feldspar	Sepanjang Patai Timur	Industri keramik, kaca lembaran
5.	Gambut	Padang Tualang	Bahan bakar gas dan cair
6.	Kalsit	Salapian	Pengisi kertas, cat, tapal gigi, pemutih
7.	Kaolin	Bahorok	Bahan Keramik, bahan filter pada industri cat, karet
8.	Sirtu	Bahorok, Padang Tualang, Selesai	Bahan bangunan, Jalan dan lain-lain
9.	Oker	Brandan Barat	Bahan baku cat
10.	Bentonit	Besitang	Pemboran, pencoran logam dan penjernih minyak goreng, minyak bumi, pembuatan wol mineral, campran semen
11.	Batu bara	Bahorok, Batang Serangan	Bahan Bakar
12.	Lempung	Kuala, Bahorok	Bahan batu bara dan bahan baku semen



No	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Kegunaan
13.	Pasir Laut	Sepanjang Pantai Timur	Campuran lempung feldsfer
14.	Batu Setengah Mulia	Brandan Barat	Perhiasan dan bahan dekorasi atau hiasan
15.	Tanah Urug	Padan Tualang, Besitang	Penimbunan
16.	Pasir Kuarsa	Pangkalan Susu	Bahan baku gelas
17.	Pasir	Stabat, Wampu, Selesai	Bahan bangunan
18.	Emas	Padang Tualang (masih dalam kajian)	Perhiasan
19.	Minyak dan Gas Bumi	Kabupaten Langkat (potensi)	

Sumber : RTRW Kabupaten Langkat, 2013-2033

F. PENGGUNAAN LAHAN

a) Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan di Kabupaten Langkat tahun 2022 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu guna lahan pertanian sawah yang mencapai sekitar 3,61%, lahan pertanian bukan sawah sekitar 87,75% dan Lahan Non Pertanian 8,64% dari total luas wilayah daratan Kabupaten Langkat.

Penggunaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar (41,75%) untuk areal perkebunan. Luas areal perkebunan di Kabupaten Langkat adalah 224.641,93 Ha atau 35,87% dari luas wilayah daratan Kabupaten Langkat. Dengan komposisi perkebunan rakyat 42,52% (95.507 Ha), Perkebunan Negara 32,78% (73.638 Ha), Perkebunan Nasional 19,40% (43.583,14 Ha) dan Perkebunan Asing 5,3% (11.919,89 ha).

Areal perkebunan tersebut didominasi oleh perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Dengan perincian kebun Kelapa sawit 176.447,03 ha. (78,55%), Karet 40.715 ha (18,12%), Coklat 3.025 Ha (1,35%), Kelapa 3.897 Ha (1,73%), dan lain-lain 554 ha (0,25%). Sedangkan luas baku areal persawahan adalah pada tahun 2013 tercatat sebesar 38.456 ha. Namun



pada tahun 2022 hanya tinggal 22.557,60 Ha. Terjadi penurunan sebesar 15.896,4 Ha selama lebih kurang 10 tahun.

Tabel 2.5
Tata Guna Lahan Wilayah Kabupaten Langkat
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Non Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
		Sawah	Bukan Sawah		
1	Bahorok	350	105.360	4.345	110.055
2	Serapit	1.283	7.872	431	9.586
3	Salapian	102	20.665	1.415	22.173
4	Kutambaru	0	22.870	814	23.684
5	Sei Bingei	3.089	28.793	1435	33.317
6	Kuala	906	18.370	1.080	20.356
7	Selesai	1.221	12.437	3.115	16.773
8	Binjai	1.175	2.101	929	4.205
9	Stabat	1.342	6.758	2.785	10.885
10	Wampu	710	15.416	3.295	19.421
11	Btg. Serangan	118	88.522	1.298	89.938
12	Sawit Seberang	0	19.637	1.273	20.910
13	Pdg. Tualang	74	19.327	2.713	22.114
14	Hinai	1.655	7.641	1.230	10.526
15	Secanggang	5.884	13.064	4.171	23.119
16	Tanjung Pura	2.738	13.507	1.716	17.961
17	Gebang	1.862	14.341	1.646	17.849
18	Babalan	4.259	2.337	1.045	7.641
19	Sei Lapan	1.426	23.594	3.048	28.068
20	Brandan Barat	1.521	5.519	1.940	8.980
21	Besitang	1.406	60.708	9.960	72.074
22	Pkl. Susu	2.791	10.733	1.878	15.402
23	Pematang Jaya	803	18.672	1425	20.900
	Langkat	35.353	538.036	52.940	626.329

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

b) Kawasan Lindung

(1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung/kawasan konservasi/resapan air dengan nama kawasan Taman Hutan Wisata Bahorok (atau yang di kenal dengan nama Bukit Lawang) seluas 5.390,72 Ha, yang berada di Kecamatan Bahorok.

(2) Kawasan Perlindungan Setempat

- Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai, meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Adapun kawasan lindung berupa sempadan pantai ini di Kabupaten Langkat diarahkan terdapat pada kecamatan yang terdapat disepanjang kawasan pesisir Pantai Timur yaitu Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Gebang, Tanjung Pura dan Secanggang. Luasan Kawasan Lindung untuk sempadan pantai adalah sepanjang garis pantai di Kabupaten Langkat di kurangi Kawasan budidaya seperti dermaga, kawasan wisata dan kawasan pendaratan ikan.

- Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai, dengan lebar 100 meter di kiri-kanan seungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Garis sempadan sungai di kawasan permukiman diperkirakan cukup untuk untuk membangun jalan inspeksi yaitu antara 10-15 meter. Potensi sempadan sungai di Kabupaten Langkat sebesar 55 Km² atau 5.500 Ha. Dengan perincian sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Potensi Sempadan Sungai Kabupaten Langkat

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas Potensi Sempadan Sungai (Km ²)
1.	Wampu	Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Stabat,	105	100	10,5
2.	Btg. Serangan	Pdg Tualang, Tj, Pura	80	50	8
3.	Besitang	Besitang	83	43	4,15
4.	Musam	Pdg, Tualang	25	40	1,25
5.	Lepan	Babalan	80	40	4
6.	Bahorok	Bahorok	25	40	1,25



7.	Mencirim	Kabupaten Binjai, Wampu	38	38	1,9
8.	Kr. Gading	Secanggang, Stabat	27	30	1,35
9.	Bekulap	Salapian , Kuala	40	30	2
10.	Bingai	Sei, Bingai, Binjai, Stabat	67	30	3,35
11.	Begumit	Kuala, Selesai	34	30	1,7
12.	Tenang	Pdg, Tualang	47	30	2,35
13.	Dendang	Stabat	27	30	1,35
14.	Baperpang	Bahorok	20	25	1
15.	Salapian	Salapian	27	25	1,35
16.	Bekiun	Kuala, Salapian	25	20	1,25
17.	Gergas	Bahorok, Stabat	24	15	1,2
18.	Tembo	Kuala	27	15	1,35
19.	Besilam	Stabat, Pdg, Tualang, Binjai	45	15	2,25
20.	Temuyuk	Salapian	4	10	0,2
21.	Bengaru	Sei Bingai	10	10	0,5
22.	Salaon	Sei Bingai	5	10	0,25
23.	Menjahong	Sei Bingai, Kuala	13	10	0,65
24.	Belengking	Stabat	17	10	0,85
25.	Serapuh	Tanjung Pura	10	15	0,5
26.	Alaur Hitam	Gebang	10	10	0,5

Sumber : BPS Kabupaten Langkat (diolah)

(3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

- Kawasan Suka Alam

Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Langkat adalah hutan TNGL dengan luas lebih kurang 216.047 Ha. Dan Kawasan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang dengan luas lebih kurang 9.520 Ha.

- Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan hutan baku mangrove yang berada disepanjang pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat. Dimana kawasan hutan mangrove yang terdapat di 9 Kecamatan pesisir agar tetap dipertahankan dengan radius minimal 200 meter dari pasang tertinggi ke arah darat, yang



terbentang disepanjang pesisir Kabupaten Langkat dikurangi kawasan budidaya yang telah diizinkan, seperti pelabuhan, pendaratan ikan, dan permukiman nelayan yang dibatasi pemanfaatan ruangnya.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Pembangunan

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Langkat terbagi menjadi 2 kawasan , yaitu :

- a. Kawasan Langkat Hulu, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai, dan Binjai. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Banyak jeram-jeram berarus deras, yang layak untuk dikembangkan sebagai energy listrik mikro hidro. Dikawasan ini terdapat potensi tambang Batu Kapur dan Batubara. Selain terdapat potensi wisata berupa ekowisata Bukit Lawang yang berorientasi pada kegiatan konservasi orang utan dan ekosistemnya.
- b. Kawasan Langkat Hilir, wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Wilayah ini didominasi dataran rendah yang cocok untuk budidaya pertanian. Langkat Hilir sejak jaman Belanda dikenal sebagai wilayah perkebunan besar, yang sekarang dikenal dengan PTPN (PT Perkebunan Negara II dan IV). Sehingga budaya masyarakat perkebunan masih terlihat di wilayah ini. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Batang Serangan terdapat ekowisata Tangkahan, dengan atraksi menarik Unit Patroli Gajah. Para wisatawan dapat menikmati hiburan menaiki dan memandikan Gajah.



c. Wilayah Teluk Aru, yaitu wilayah perbatasan antara provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lengan, Berandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Di wilayah ini merupakan daerah eksplorasi PT Pertamina yang pertama di Indonesia, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik miniatur Indonesia. Namun potensi minyak dan gas bumi di Teluk Aru sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, maka kilang Pertamina di Pangkalan Brandan ditutup. Penutupan Kilang ini sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Besitang juga terdapat Unit Patroli Gajah Aras Napal yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat sesuai dengan RTRW Kabupaten Langkat tahun 2013-2033 adalah :

a. Kawasan hutan produksi :

- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas sekitar 56.141 Ha. Terletak di Kecamatan Bahorok; Salapian; Kutambaru; Sei Bingai Kuala; Batang Sarangan; Sawit Seberang; Sei Lengan; Berandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu; dan Pematang Jaya.
- Kawasan hutan produksi tetap memiliki luas sebesar 39.453 Ha, meliputi Kecamatan Secanggang; Tanjung Pura; Gebang; Babalan; Sei Lengan; Brandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu; dan Pematang Jaya.

b. Kawasan Pertanian :

- Kawasan tanaman lahan basah, berdasarkan analisa kesesuaian lahan, kawasan ini di rencanakan



baerkolasi menyebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total ± 49.293 Ha.

- Kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Besitang; Bahorok; Hinai; Tanjung Pura; Binjai; Selesai; Wampu dan Secanggang.
- Kawasan tanaman tahunan/perkebunan diarahkan meliputi seluruh kecamatan dengan luas pengembangan mencapai ± 202.485 Ha.
- Kawasan peternakan di Kabupaten Langkat meliputi :
 - Peternakan hewan besar; Arahkan sentra produksi Peternakan hewan besar seperti sapi potong dan kerbau meliputi Kecamatan Sei Bingai; Kuala; Selesai; Binjai; Wampu; Batang Serangan; Sawit Sebernag; Padang Tualang; Hinai; Secanggang; Pematang Jaya; Stabat; Bahorok; dan Sirapit.
 - Peternakan hewan kecil seperti domba, kambing dan babi meliputi: Kecamatan Selesai; Binjai; Hinai; Wampu; Padang Tualang; Sawit Seberang; Tanjung Pura; Sei Bingai; Kuala; dan Gebang.
 - Peternakan unggas seperti ayam dan itik meliputi : Kecamatan Binjai; Selesai; Kuala; Salapian; Tanjung Pura; dan Secanggang.
- Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Langkat meliputi:
 - Pengembangan perikanan laut dan budidaya (tambak), diarahkan di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei.



Lepan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang; dan

- Perikanan air tawar berupa kolam potensial dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, sedangkan perikanan air tawar berupa minapadi potensial dikembangkan di lahan sawah beririgasi di Kabupaten Langkat
- Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Langkat meliputi:
- Perikanan tangkap di laut diarahkan pada jalur penangkapan ikan 0–4 mil dari garis pantai di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lepan, Gebang, Besitang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang;
- Perikanan tangkap di Perairan Umum diarahkan di Kecamatan Kutambaru, Sei. Bingai, Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Padang Tualang, Stabat, Wampu, Hinai dan Tanjung Pura; dan
- Pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu dan didukung oleh desa-desa pesisir.
- Kawasan agromarinepolitan meliputi kawasan pantai timur Kabupaten Langkat.
- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap meliputi PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Brandan dan PPI Kuala Gebang.
- Pengembangan perumahan nelayan diarahkan di Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Sei. Lepan, Kecamatan Babalan dan Pangkalan Susu.



c. Kawasan Pertambangan meliputi:

- Kawasan Pertambangan rakyat berada di Kecamatan Kutumbaru, Bahorok, Salapian, Kuala, Sirapit, Selesai, Sei Bingai, Wampu, Batang Serangan, Pangkalan Susu, dan Berandan Barat.
- Kawasan Pertambangan besar meliputi :
- Pertambang Minyak dan Gas Bumi berada di Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lapan, Babalan, Hinai, Padang Tualang, Secanggang dan Binjai;
- Tambang Panas Bumi;
- Tambang Batu Bara; dan
- Tambang Air Tanah CAT Medan;

d. Kawasan perindustrian di Kabupaten Langkat terutama industri kecil dan menengah diarahkan diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Sedangkan industri besar dapat diarahkan dan disesuaikan dengan hasil komoditi yang ada di setiap kecamatan dengan Pusat Industri berada pada Kecamatan Pangkalan Susu.

e. Kawasan Pariwisata

- Wisata Alam (Darat) meliputi:
 - Pemandian dan rehabilitasi Orang Utan, Gua Batu Kapal dan Gua Batu Rizal, Kecamatan Baohorok;
 - Gua, Air Terjun Marike dan Air Panas Simolap Kutumbaru di Kecamatan Kutumbaru
 - Pemandian Namu Relok, Kecamatan Salapian;
 - Pemandian Pangkal, Pemandian/Air Terjun Lau Berte, Pemandian Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
 - Sumber Air Panas Kuala Buluh, Kecamatan P. Tualang;
 - Batu rongreng Desa Sungai Musam dan Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan ;



-
- Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang; dan
 - Arung Jeram Sungai Wampu dan Sungai Bingai.
 - Wisata Alam (Laut) meliputi :
 - Pulau Sembilan, Pantai Berawe di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu; dan
 - Pantai Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura.
 - Wisata Religi/Budaya meliputi :
 - Istana Batu Bukit Mas Kecamatan Besitang.
 - Pulau Kuburan Mas Merah dan kuburan Panjang di Pulau Kampai Kecamatan Susu;
 - Mesjid Azizi, Makan T. Amir Hamzah dan Museum, Kecamatan Tanjung Pura;
 - Haul Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padang Tualang;
 - Kampung Bali di Kecamatan Wampu.

3. Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RTRW Kabupaten Langkat tahun 2013-2023, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Langkat adalah :

- a. Kawasan Strategis Ekonomi, meliputi :
 - Kawasan ekonomi terpadu di Kecamatan Stabat.
 - Pelabuhan Laut di Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Tanjung Pura.
 - Kawasan Industri di Kecamatan Pangkalan Susu.
 - Kawasan wisata bahari dan lingkungan hidup di Kecamatan Pangkalan Susu.
- b. kawasan Strategis dan Budaya, meliputi :



-
- Masjid azizi, Makan T, Amir Hamzah dan Museum Daerah di Kecamatan Tanjung Pura.
 - Makam Tuan Guru Besilam di Kecamatan P. Tualang.
 - Kampung Bali di Kecamatan Wampu.

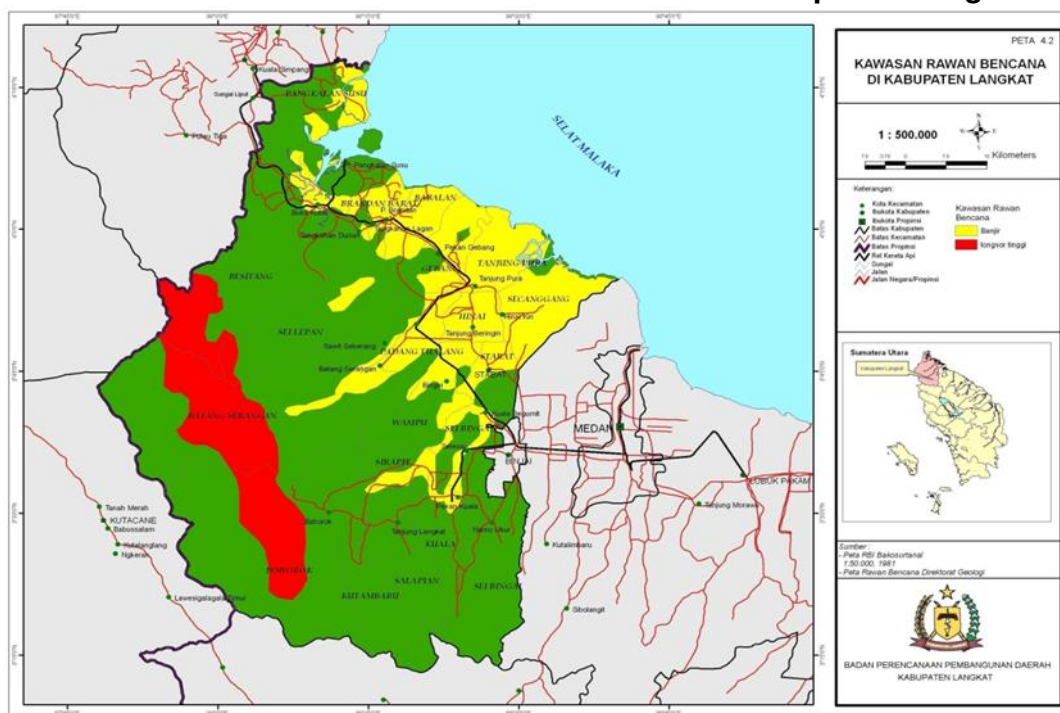
c. Kawasan Strategis Lingkungan, meliputi :

- Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Batang Serangan, Bahorok dan KutamBaru.
- Kawasan Rawan Bencana di Kecamatan Bahorok.
- Pulau Sembilan di Kecamatan Pangkalan Susu.
- Suaka Marga Satwa Langkat Timur dan Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang.
- Bahorok – Tangkahan

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Langkat berupa rawan bencana tanah longsor dan banjir. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di bagian Tengah memanjang dari Utara ke Selatan Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Batang Serangan (Utara), hingga Kecamatan Bahorok (Selatan). Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsor tanah menuju kawasan yang lebih rendah. Kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Babalan, Tanjung Pura, Secanggang, Hinai, Padang Tualang, Batang Serangan dan Stabat. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi banjir terutama disepanjang aliran sungai besar.

Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Langkat



Sumber : RTRW Kab. Langkat Tahun 2013-2033

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Langkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 telah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 Indeks Resiko Bencan Kabupaten Langkat mengalami kenaikan. Indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Indeks resiko bencana Kabupaten Langkat Tahun 2019-2022 masuk dalam kategori sedang. Meskipun begitu, angka ini masih tergolong rawan karena masih mendekati nilai 144 (batas terendah kategori tinggi).

Tabel 2.7
Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Langkat Tahun 2018-2022

No	Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Risiko Bencana	140,67	140,17	138,62	137,23	142,62

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2018-2022

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di bagian tengah memanjang dari Utara ke Selatan Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Batang Serangan (Utara), hingga Kecamatan Bohorok (Selatan) . pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsor tanah menuju kawasan yang lebih rendah.

2. Kawasan Rawan Banjir

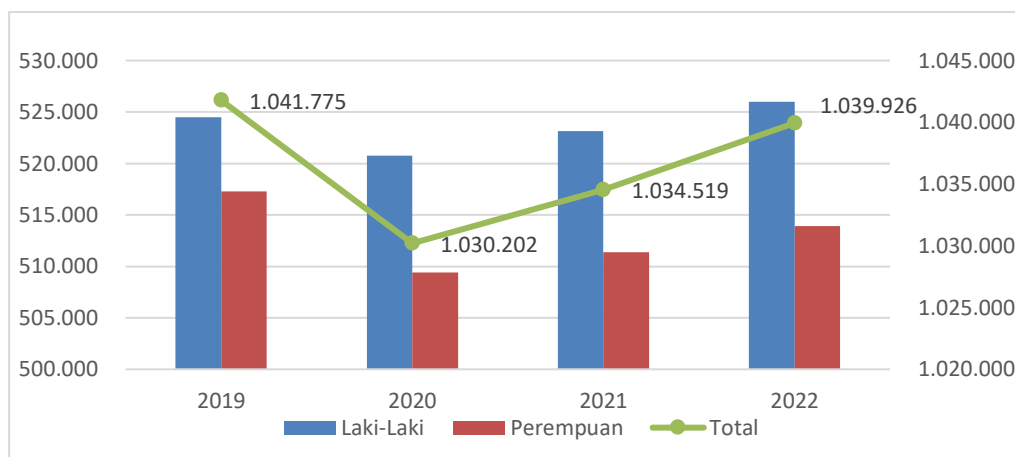
Kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Babalan, Tanjung Pura, Secanggang, Hinai, Padang Tualang dan Stabat. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi banjir terutama disepanjang aliran sungai besar.

2.1.4 Demografi

A. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat tahun 2022 mencapai 1.039.926 jiwa terdiri dari 526.020 jiwa laki – laki dan perempuan sebanyak 513.906 jiwa (Data BPS Kab. Langkat). Jumlah penduduk Kabupaten Langkat Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Tahun 2021 sebesar 1.034.519 jiwa.

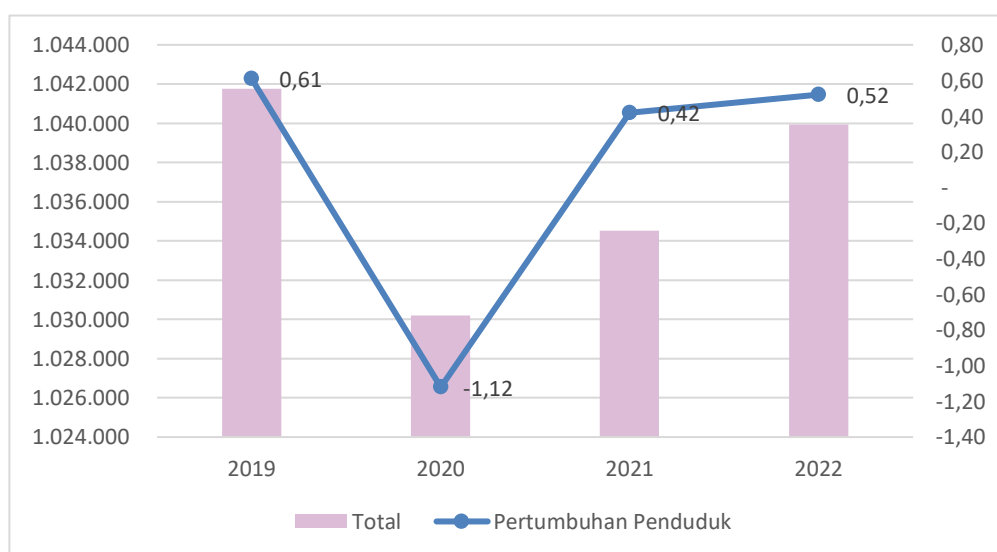
Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kab. Langkat Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Rata-rata laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat periode 2010-2020 ialah sebesar 0,61%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk periode 2021-2022 adalah sebesar 0,52%.

Gambar 2.5
Pertumbuhan Penduduk Kab. Langkat Tahun 2019-2022



Sumber : Data BPS (Diolah)



Dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat, Pada Tahun 2022 Kecamatan Stabat memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 92.633 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,86% diatas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat tahun 2022.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Langkat Tahun 2019-2022

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	Pertum- buan
Bahorok	42.878	41.570	41.669	41.812	0,34
Sirapit	17.121	16.703	16.754	16.821	0,40
Salapian	27.872	26.238	26.289	26.386	0,33
Kutambaru	14.422	14.109	14.127	14.160	0,23
Sei Bingai	52.181	51.617	51.756	41.949	0,37
Kuala	42.119	40.327	40.460	40.635	0,43
Selesai	74.705	72.595	72.796	70.073	0,38
Binjai	45.786	47.018	47.370	47.774	0,85
Stabat	88.734	91.153	91.845	92.633	0,86
Wampu	43.662	42.388	42.492	42.639	0,35
Btg Serangan	37.652	35.764	35.810	35.894	0,23
Sawit Seberang	27.098	25.765	25.804	25.869	0,25
Padang Tualang	50.188	52.895	53.280	53.724	0,83
Hinai	51.402	52.664	53.065	53.525	0,87
Secanggang	70.272	70.482	70.879	71.352	0,67
Tanjung Pura	69.361	69.018	69.363	69.781	0,60
Gebang	45.742	47.509	47.665	47.872	0,43
Babalan	60.675	56.706	56.802	56.957	0,27
Sei Lapan	50.348	49.630	49.827	50.076	0,50
Brandan Barat	23.600	24.023	24.197	24.398	0,83
Besitang	47.280	45.286	45.340	45.440	0,22
Pangkalan Susu	44.703	43.873	44.034	44.240	0,47
Pematang Jaya	13.974	12.869	12.886	12.916	0,23
Kabupaten Langkat	1.041.775	1.030.202	1.034.519	1.039.926	0,52



B. Distribusi/Persebaran penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Langkat tahun 2022 adalah sebesar 166,04 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Langkat adalah Kecamatan Binjai dengan kepadatan penduduk sebesar 1.136 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Stabat dengan kepadatan penduduk sebesar 851,02 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Bahorok yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Langkat dengan kepadatan penduduk 37,95 jiwa/km².

Tabel 2.8
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Langkat 2022

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Bahorok	1.101,83	41.812	37,95
Serapit	98,5	16.821	170,77
Salapian	221,73	26.386	119,00
Kutambaru	236,84	14.160	59,79
Sei Bingei	333,17	41.949	155,92
Kuala	206,23	40.635	197,04
Selesai	167,73	70.073	435,66
Binjai	42,05	47.774	1.136,12
Stabat	108,85	92.633	851,02
Wampu	194,21	42.639	219,55
Batang Serangan	899,38	35.894	39,91
Sawit Seberang	209,1	25.869	123,72
Padang Tualang	221,14	53.724	242,94
Hinai	105,26	53.525	508,50
Secanggang	231,19	71.352	308,63
Tanjung Pura	179,61	69.781	388,51
Gebang	178,49	47.872	268,21
Babalan	76,41	56.957	745,41
Sei Lapan	280,68	50.076	178,41
Brandan Barat	89,8	24.398	271,69
Besitang	720,74	45.440	63,05
Pangkalan Susu	151,35	44.240	292,30
Pematang Jaya	209	12.916	61,80
Kab. Langkat	6.263,29	1.039.926	166,04

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

C. Komposisi Penduduk

Dari komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kabupaten Langkat mayoritas beragama Islam. Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa 89,14% penduduk Kabupaten Langkat beragama Islam dan 9,02% beragama Kristen. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat beragama lainnya (Katolik, Hindu, dan Buddha) memiliki prosentase masing-masing kurang dari 1%.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Langkat

No	Tahun SP	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
1	2000	90,00	1,06	7,56	0,09	0,95	0,342	100,00
2	2010	90,58	0,41	7,75	0,04	0,79	0,422	100,00
3	2020	89,14	0,61	9,02	0,22	0,92	0,08	100,00

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010 dan Kabupaten Langkat dalam Angka 2021

Piramida penduduk Kabupaten Langkat menggambarkan piramida ekspansif. Yaitu jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada penduduk usia tua. Komposisi penduduk dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Langkat, terbanyak berada pada kelompok usia 0-4 tahun, 25-29 tahun dan 20-24 tahun.

Gambar 2.4

Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2022



Sumber : Langkat Dalam Angka Tahun 2022

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan Masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

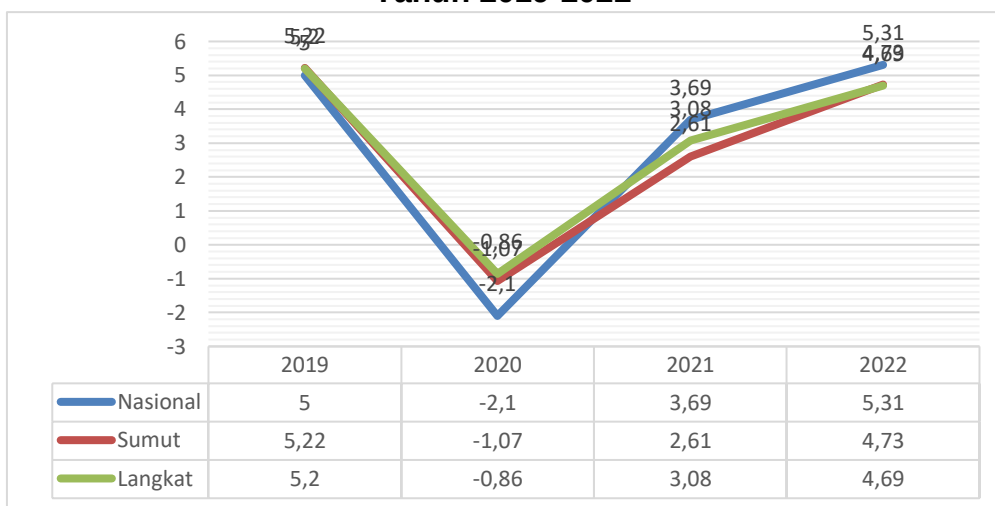
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Kasus khusus terjadi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat terdistraksi sehingga beberapa sektor mengalami penurunan, menyebabkan PDRB tahun 2020 ADHK 2010 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Langkat Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat sebesar

4,69 persen. Mengalami pertumbuhan sebesar 1,61 persen dibandingkan tahun 2021 dimana ekonomi Kabupaten Langkat tumbuh sebesar 3,08 persen. Namun pertumbuhan ekonomi langkat masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2022

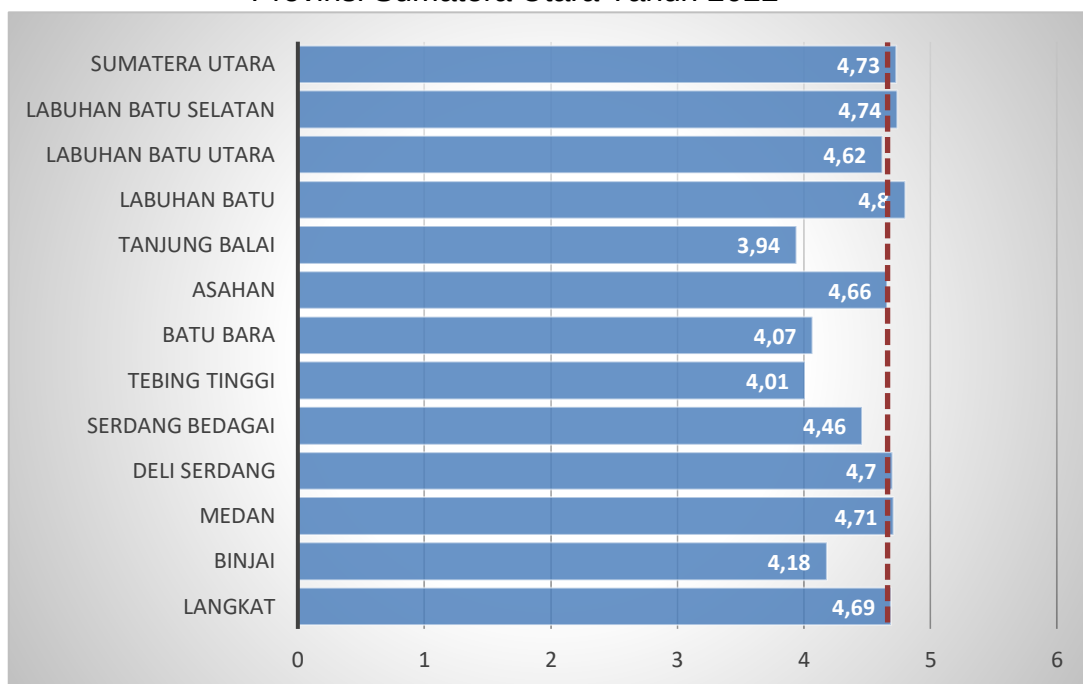


Sumber : Pengolahan Data BPS Kab. Langkat

Berdasarkan Laju pertumbuhan ekonomi 12 Kabupaten/Kota yang berada di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 juga mengalami pertumbuhan yang positif. Kabupaten Langkat menempati urutan ke-5 tertinggi setelah Kabupaten Labuhan sebesar 4,80 persen, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebesar 4,74 persen, Kota Medan sebesar 4,71 persen dan Kabupaten Deli Serdang sebesar 4,70 persen.

Gambar 2.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



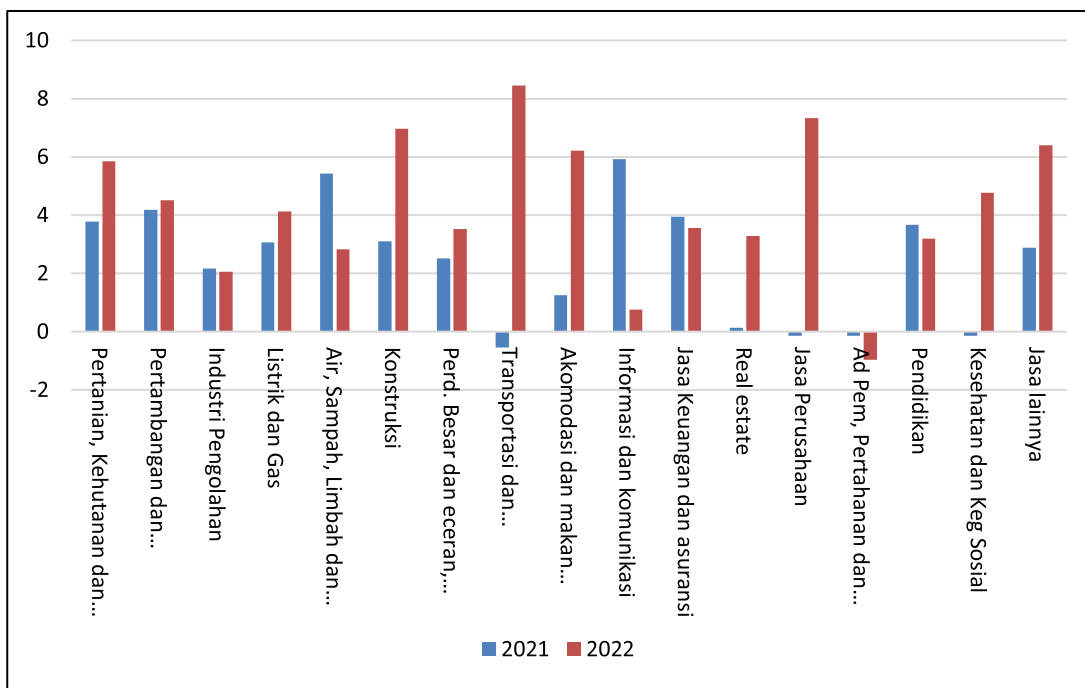
Sumber : BPS Sumatera Utara Tahun 2022

Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,38, namun sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil jika dibandingkan dengan dan tahun 2019. Pada tahun 2020 Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 1,06 persen. Mengalami kenaikan sebesar 2,72 persen di tahun 2021 sebesar 3,78 persen. Pada Tahun 2022 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam penyumbang PDRB Kabupaten Langkat Kembali mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 5,85 persen.

Dilihat dari laju pertumbuhan per sektor pada tahun 2022, masih ada sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang negative (kontraksi) yaitu Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,97 persen. Sedangkan sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2022 adalah sektor

transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar sebesar 8,44 persen.

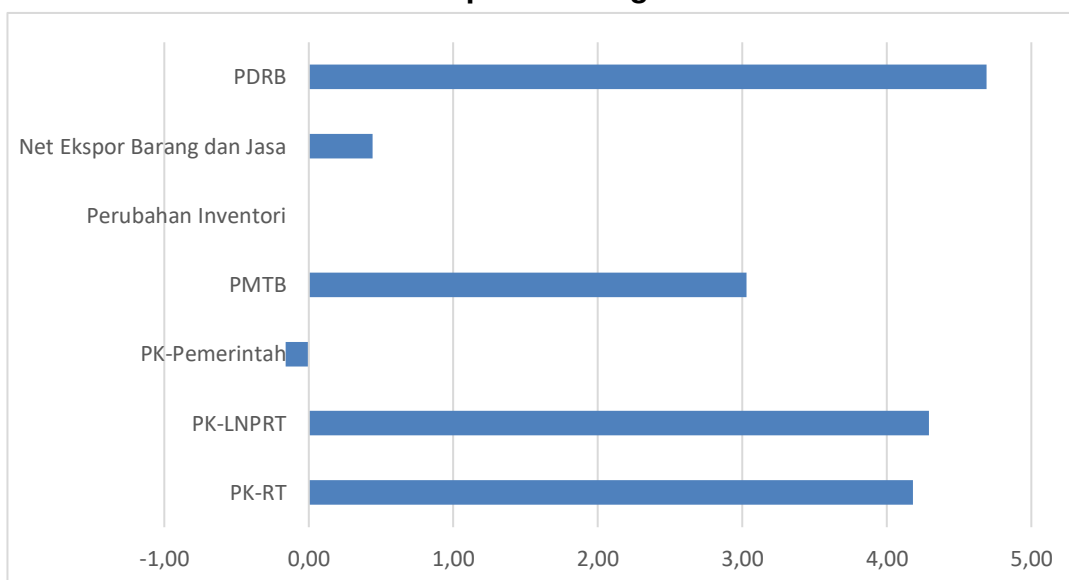
Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Setiap Sektor pada Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Kab. Langkat (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat Tahun 2022 menurut pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-LNRT yang tumbuh sebesar 4,29 persen, dan diikuti dengan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan pertumbuhan sebesar 4,18 persen.

Gambar 2.
Pertumbuhan PDRB Komponen Pengeluaran Tahun 2022





B. PDRB Kabupaten Langkat

- PDRB Kabupaten Langkat menurut Pengeluaran

Kondisi perekonomian Kabupaten Langkat terus membaik dari tahun ke tahun. Setelah diterpa Pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Kabupaten Langkat mengalami peningkatan kembali yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari PDRB tahun 2021 yang mengalami peningkatan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Nilai PDRB Sumatera Utara ADHB menunjukkan peningkatan signifikan. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga yang cukup signifikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
PDRB Kabupaten Langkat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2022

Komponen	2019	2020	2021	2022
PK-RT	25.787.227,72	25.689.946,29	26.598.108,74	28.647.843,54
PK-LNPRT	442.465,12	429.361,36	435.310,95	465.659,89
PK-Pemerintah	3.395.975,66	3.324.286,53	3.474.624,30	3.508.191,54
PMTB	9.706.254,08	10.088.065,37	10.704.476,39	11.233.132,07
Perubahan Inventori	724.086,91	999.183,24	1.013.293,13	1.174.941,49
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.459.166,94	2.677.154,79	4.075.390,24	6.382.996,49
PDRB	42.515.176,42	43.207.997,58	46.301.203,75	51.412.765,01

Sumber : BPS Langkat

Sama halnya dengan PDRB ADHB, Nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan peningkatan. Namun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid dan Kembali mengalami kenaikan di Tahun 2021 dan 2022. PDRB Kabupaten Langkat menurut pengeluaran meningkat menjadi 31.665.478,34 juta rupiah pada tahun 2022.



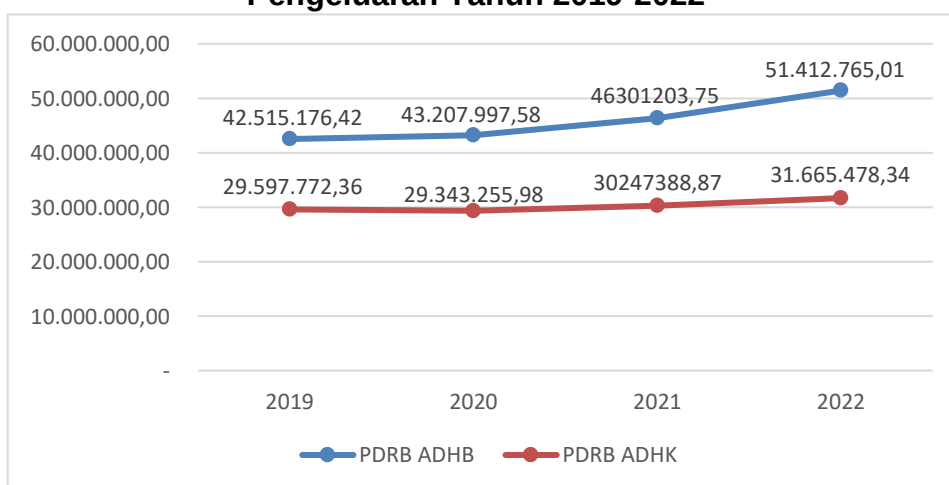
Tabel 2.
PDRB Kabupaten Langkat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga
Konstan 2010
Tahun 2019-2022

Komponen	2019	2020	2021	2022
PK-RT	17.192.760,18	16.819.292,65	17.083.562,27	17.797.400,00
PK-LNPRT	316.480,94	301.367,04	302.762,72	315.700,00
PK-Pemerintah	1.956.810,26	1.940.927,58	1.994.208,68	1.990.900,00
PMTB	6.374.139,60	6.483.082,24	6.755.573,83	6.960.000,00
Perubahan Inventori	597.136,71	775.517,02	769.805,71	805.000,00
Net Ekspor Barang dan Jasa	3.283.693,61	3.023.069,45	3.341.457,67	3.796.100,00
PDRB	29.597.772,36	29.342.255,98	29.343.255,98	31.665.478,34

Sumber : BPS Langkat

Selama kurun waktu 2019–2022 pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Gambar 2.
Perbandingan PDRB Kabupaten Langkat ADHB dan ADHK Menurut
Pengeluaran Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Langkat

- PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2018 – 2022, struktur ekonomi Kabupaten Langkat masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan, serta Perdagangan. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, rata-rata kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ialah sebesar 39,79 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 14,39 %, serta sektor perdagangan sebesar 15,85 %. Kabupaten Langkat memiliki posisi yang cukup strategis terutama karena dilintasi jalan trans sumatera juga jalan tol Sumatera-Aceh. Di samping itu, Kabupaten Langkat juga memiliki potensi lahan yang baik untuk pertanian dan perkebunan. Hal tersebut menjadi faktor tingginya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan, serta Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Langkat.

Tabel 2.11
Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat ADHK 2010 Tahun 2019 – 2021
(dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.737,61	12.872,40	13.359,53	14.141,37
Pertambangan dan Penggalian	2.931,33	2.868,05	2.987,88	3.122,92
Industri Pengolahan	4.140,11	4.060,39	4.125,35	4.237,52
Pengadaan Listrik, Gas	69,61	71,11	73,28	76,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,71	12,12	12,78	13,14
Konstruksi	2179,26	2.083,69	2.148,20	2.297,92
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.878,38	2.807,03	2.877,87	2.979,37
Transportasi dan Pergudangan	642,4	582,16	578,94	627,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	641,66	593,87	601,37	638,79



Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022**
Informasi dan Komunikasi	416,43	456,35	483,41	487,10
Jasa Keuangan	543,4	544,55	565,98	586,15
Real Estate	813,08	816,37	817,54	844,33
Jasa Perusahaan	153,78	145,59	145,38	156,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	877,23	872,9	871,64	863,18
Jasa Pendidikan	357,48	359,19	372,39	384,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,8	142,2	142,00	148,75
Jasa lainnya	59,5	55,27	56,86	60,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.597,77	29.343,26	30.247,39	31.665,48

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

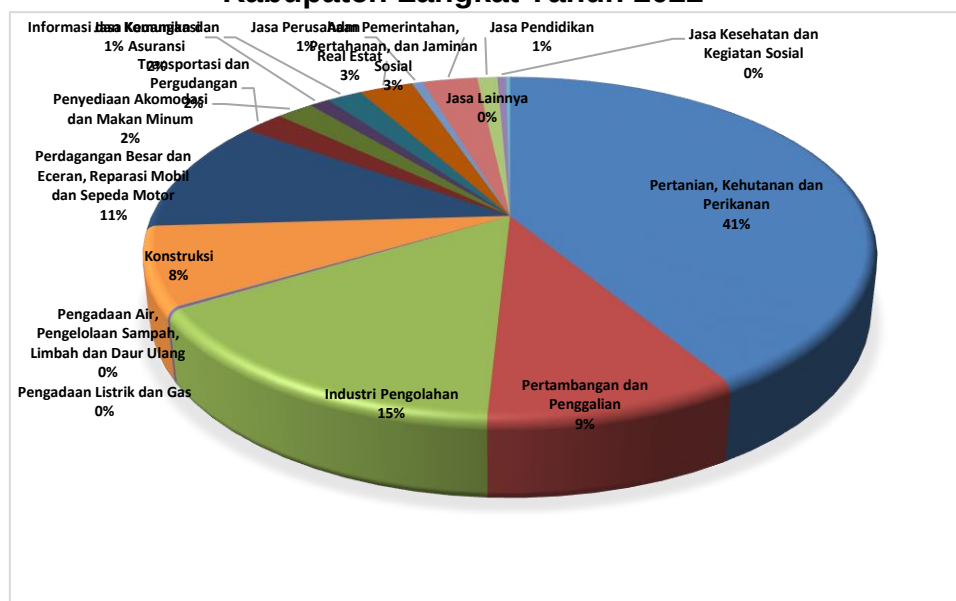
Tabel 2.12
PDRB Kabupaten Langkat ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2019*	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.471,77	17.095,45	18.658,42	21.253,11
Pertambangan dan Penggalian	4.055,45	3.982,29	4.311,71	4.881,47
Industri Pengolahan	6.711,51	6.864,11	7.415,69	7.952,32
Pengadaan Listrik, Gas	85,40	87,57	90,86	96,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,24	15,84	16,87	17,49
Konstruksi	3.242,94	3.207,42	3.399,02	3.869,93
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.799,03	4.834,13	5.085,98	5.536,40
Transportasi dan Pergudangan	1.032,35	961,83	982,78	11.118,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	996,37	927,17	940,49	1.006,22
Informasi dan Komunikasi	443,86	493,45	534,79	552,07
Jasa Keuangan	847,05	829,99	887,70	963,37
Real Estate	1.299,59	1.330,72	1.370,20	1.477,40
Jasa Perusahaan	255,26	250,00	255,36	288,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.454,44	1.504,04	1.501,23	1.504,37
Jasa Pendidikan	488,62	508,57	529,45	547,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221,21	224,75	226,83	242,77

Lapangan Usaha	2019*	2020	2021*	2022**
Jasa lainnya	95,10	90,68	93,82	104,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	42.515,19	43.208,00	46.301,20	51.412,77

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

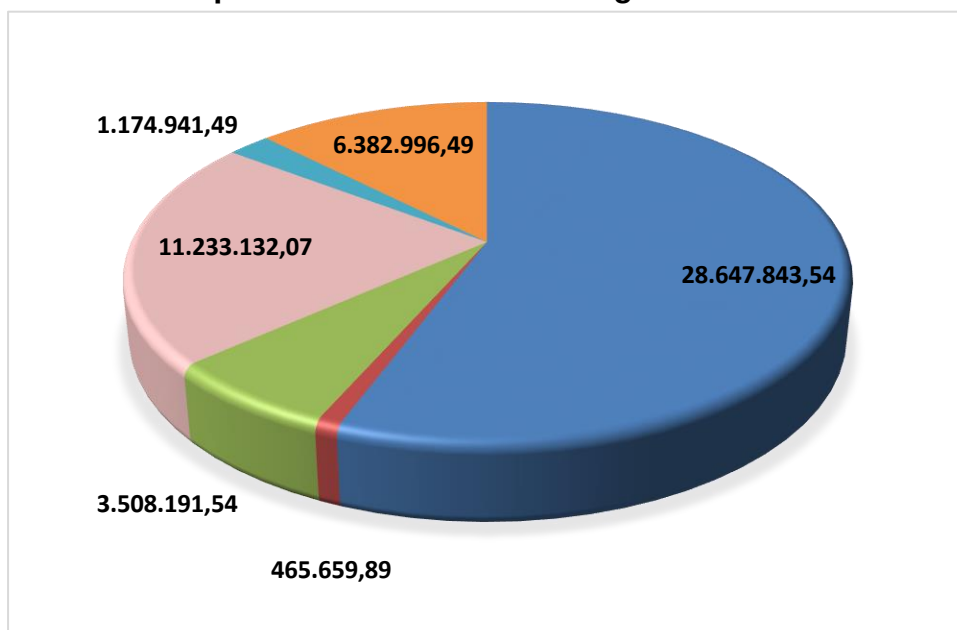
Gambar 2.8
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Langkat Tahun 2022



PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang besaran nilai produk atau barang dan jasa (output) yang dihasilkan didalam wilayah tertentu untuk digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat. Pada tahun 2022, total PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran adalah sebesar Rp. 51.412.765,01 Milyar meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 46.301.203,75 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar 4,69 persen. Komponen yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Komponen net ekspor barang dan jasa yaitu mengalami kenaikan sebesar 52,23 persen. Komponen PDRB menurut pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar Rp. 28.647.843,54 Milyar atau sebesar 55,72 persen dan Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp. 11.233.132,07 Milyar atau 21,85 persen.

Gambar 2.9
Distribusi Komponen PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2022



Sumber : BPS Langkat

- **PDRB per Kapita**

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Langkat atas Dasar Harga Berlaku terus menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai PDRB perkapita ADHB Kabupaten Langkat sebesar 40,81 juta rupiah, dan meningkat di tahun 2022 menjadi 30,45 juta rupiah dengan rata-rata pertumbuhan 3,50 persen.

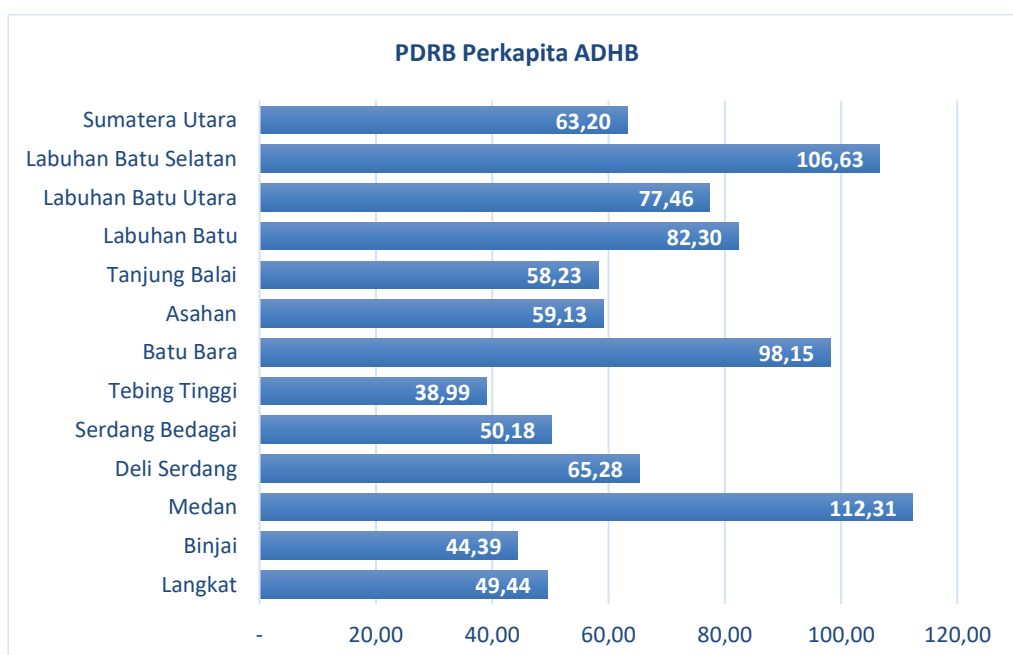
Tabel 2.13
PDRB Per kapita Kabupaten Langkat ADHB & ADHK
Tahun 2019 – 2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
- PDRB Per Kapita ADHB (juta Rupiah)	40,81	41,94	44,76	49,44
- PDRB Per Kapita ADHK (juta Rupiah)	28,41	28,48	29,24	30,45
- Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK	4,43	0,25	2,64	4,14

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Nilai PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Langkat Tahun 2022 masih sangat rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Nilai PDRB perkapita ADHB Kabupaten Langkat hanya sebesar Rp. 49,44 juta. PDRB perkapita ADHB tertinggi ada di Kota Medan yaitu sebesar Rp. 112,31 juta.

Gambar 2.10
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



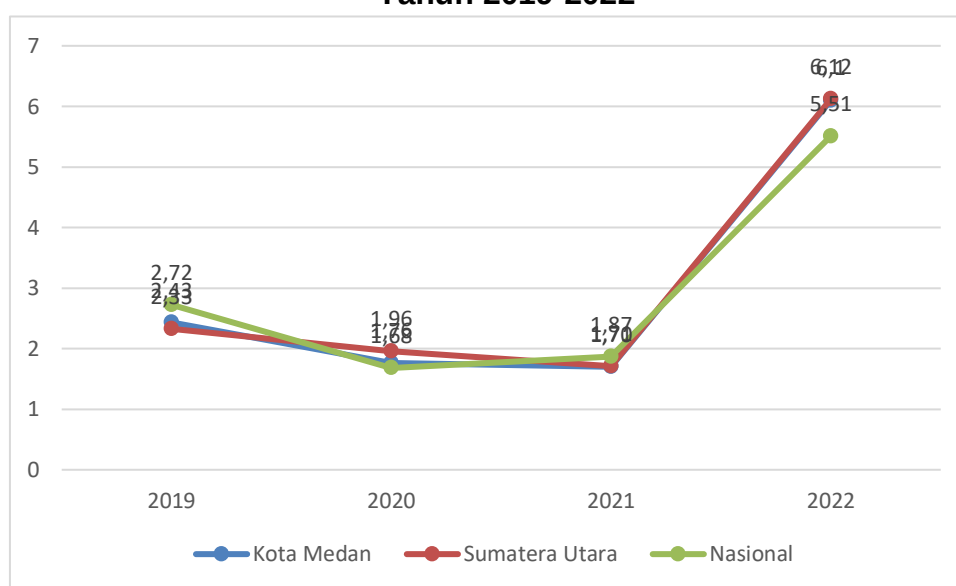
C. Inflasi

Nilai inflasi Kabupaten Langkat mengikuti nilai inflasi Kota terdekat yaitu Kota Medan. Karena di Sumatera Utara yang dihitung nilai inflasinya hanya 5 Kota yaitu Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan dan Kota Gunung Sitoli. Pada tahun 2022 inflasi Kota Medan sebesar 6,10%. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 1,70%.

Pada tahun 2022, inflasi terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Salah satu penyebab terjadinya inflasi di Indonesia adalah akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meningkatnya harga minyak mentah dunia serta konflik Rusia – Ukraina.

Jika dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Sumatera Utara, inflasi Kota Medan lebih baik namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Nasional. Perkembangan inflasi Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 2.
Laju Inflasi Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Langkat

Nilai inflasi 5 kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 2.14
Perkembangan Inflasi Year on Year (YoY) 5 Kota di Sumatera Utara

No	Tahun	Medan	Pematang Siantar	Sibolga	Padang Sidempuan	Gunung Sitoli
1	2019	2,43	1,54	2,58	2,15	-
2	2020	1,76	2,78	2,42	3,27	5,32
3	2021	1,70	2,12	1,86	1,49	0,54
4	2022	6,10	6,16	6,43	6,40	5,74

Sumber : BPS Sumatera Utara

Laju inflasi terbesar sepanjang tahun 2022 terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu sebesar 1,54 persen. Hal ini disebabkan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 110,68 pada bulan November 2022 menjadi 112,38 pada bulan Desember 2022. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan yang ditunjukkan pada beberapa kelompok pengeluaran, antara lain kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,50 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,90 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,76 persen, kelompok transportasi sebesar 0,47 persen, kelompok Penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,28 persen dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen. Sedangkan kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks harga konsumen adalah kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok Kesehatan, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok Pendidikan.

Tabel 2.15
Kumulatif Inflasi Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,35	1,82	7,54
Pakaian dan Alas Kaki	1,85	3,63	5,03
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0,29	0,95	1,19
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,60	2,36	5,38
Kesehatan	1,92	0,94	1,19
Transportasi	-2,49	2,54	19,06
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,86	0,10	0,20
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,40	-0,44	8,36
Pendidikan	0,08	0,16	0,55
Makanan dan Minuman/Restoran	1,36	2,58	3,84
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,33	2,35	8,26
Inflasi Kumulatif	1,76	1,70	6,10

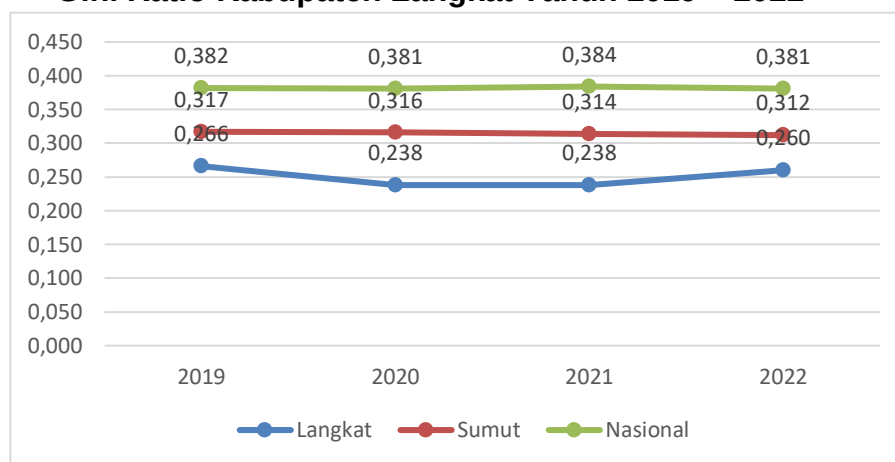
Sumber : BPS Sumut

D. Indeks Gini

Sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Gini Ratio Kabupaten Langkat berada pada nilai dibawah 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Langkat masuk pada

kategori rendah. Namun, pada Tahun 2022 Gini ratio Kabupaten Langkat sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 gini ratio Kabupaten Langkat tercatat sebesar 0,260. Meskipun Kabupaten Langkat memiliki ketimpangan yang rendah namun belum bisa diartikan bahwa perekonomian masyarakat sudah sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita Kabupaten Langkat yang masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Gini ratio hanya mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Langkat terdistribusi secara merata dalam kategori pendapatan rendah.

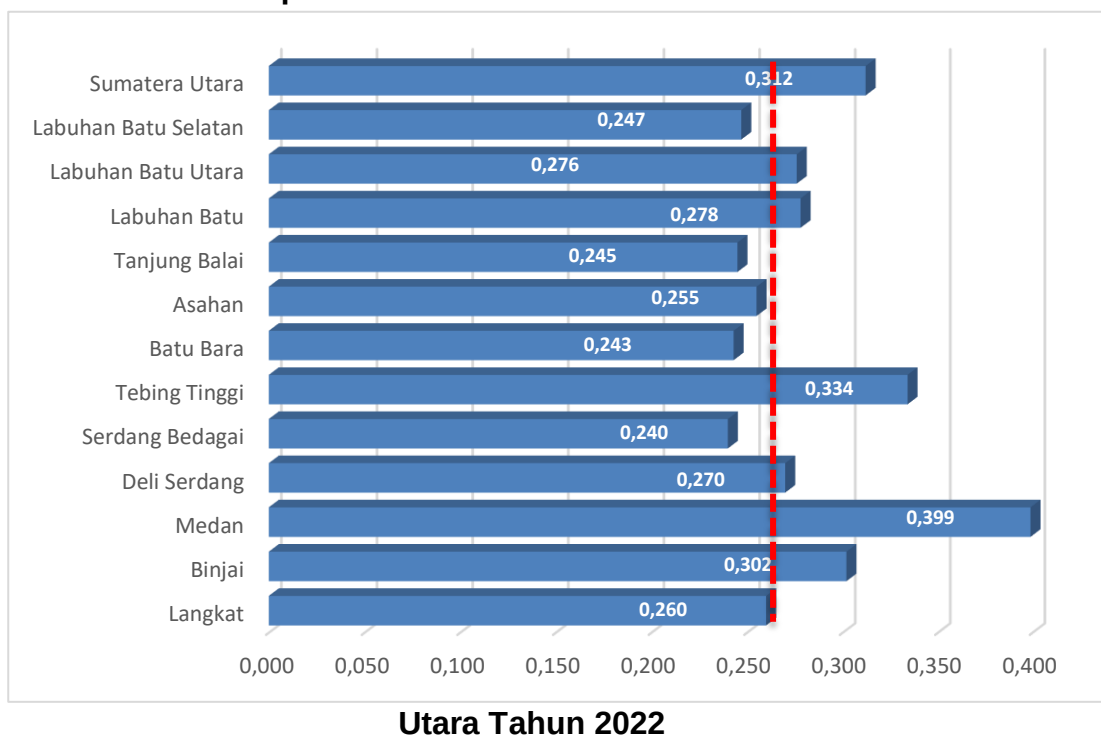
Gambar 2.12
Gini Ratio Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2022



Sumber : BPS Sumatera Utara

Jika dilihat dari perkembangan Gini ratio Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, terdapat 2 daerah yang memiliki nilai gini ratio yang cukup tinggi bahkan melebihi nilai gini ratio provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan sebesar 0,399 dan Kota Tebing Tinggi sebesar 0,334. Bahkan nilai Gini Ratio Kota Medan melebihi nilai Gini Ratio Nasional sebesar 0,381. Sedangkan Gini ratio Kabupaten Langkat pada peringkat keenam terkecil di zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batu Bara adalah Kabupaten dengan nilai Gini Ratio terkecil pada tahun 2022.

Gambar 2.13
Gini Ratio Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera



Sumber : BPS Sumatera Utara

2.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Kemiskinan

Penduduk dikatakan miskin apabila penduduk tersebut memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan. Tahun 2019 sampai dengan 2022, garis kemiskinan Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan. Sementara persentase penduduk miskin Kabupaten Langkat Pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat adalah sebesar 100.450 jiwa atau 9,49 persen lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 106.590 jiwa atau 10,12 persen.

Tabel 2.16
Data Kemiskinan Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (000)	103,08	101,87	106,59	100,45
2	Presentase penduduk miskin	9,91	9,73	10,12	9,49
3	Garis kemiskinan	392.050	412.422	432.37	453.38



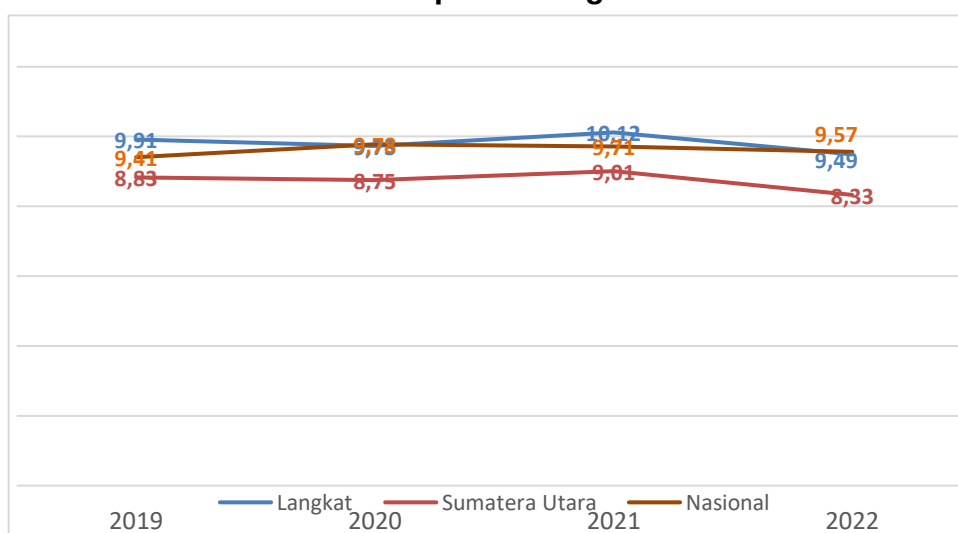
	(rupiah/kapita/bulan)			1	3
4	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,90 ²⁾	1,52	1,17	1,33
5	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,14 ²⁾	0,33	0,23	0,31

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Walaupun terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat pada tahun 2022, namun indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun (P1) 2021 sebesar 1,17 menjadi 1,33 pada tahun 2022. mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,17. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2021 sebesar 0,23 naik menjadi 0,31 pada tahun 2022.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Langkat tahun 2022 lebih kecil dibandingkan persentase penduduk miskin nasional namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Sumatera Utara adalah sebesar 1.268.190 jiwa atau 8,42 persen sedangkan jumlah penduduk miskin Nasional adalah sebesar 26,36 juta jiwa atau 9,57 persen.

Gambar 2.14
Penduduk Miskin Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2022

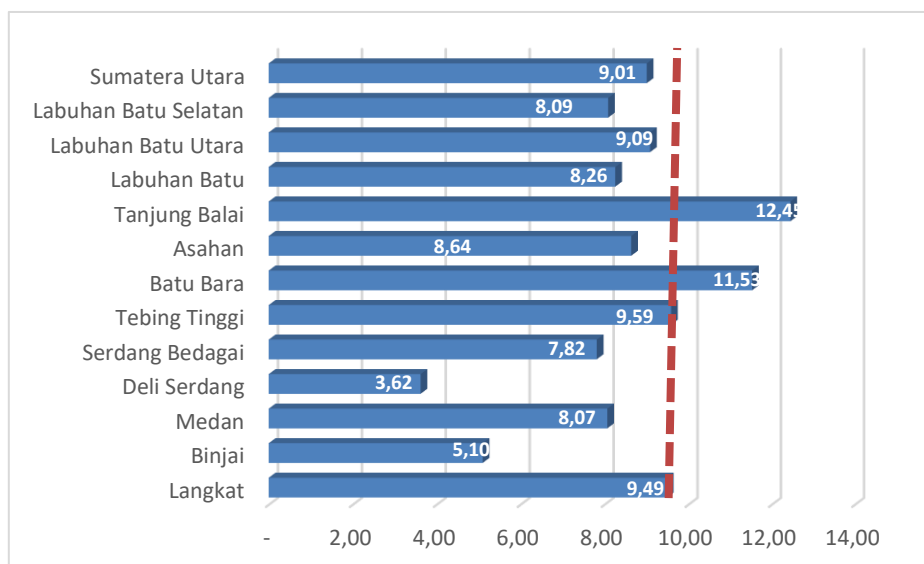


Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Langkat

cukup tinggi ke-4 setelah Kota Tanjung Balai sebesar 13,40%, Kabupaten Batubara sebesar 12,38 persen dan Kota Tebing Tinggi sebesar 10,30 persen.

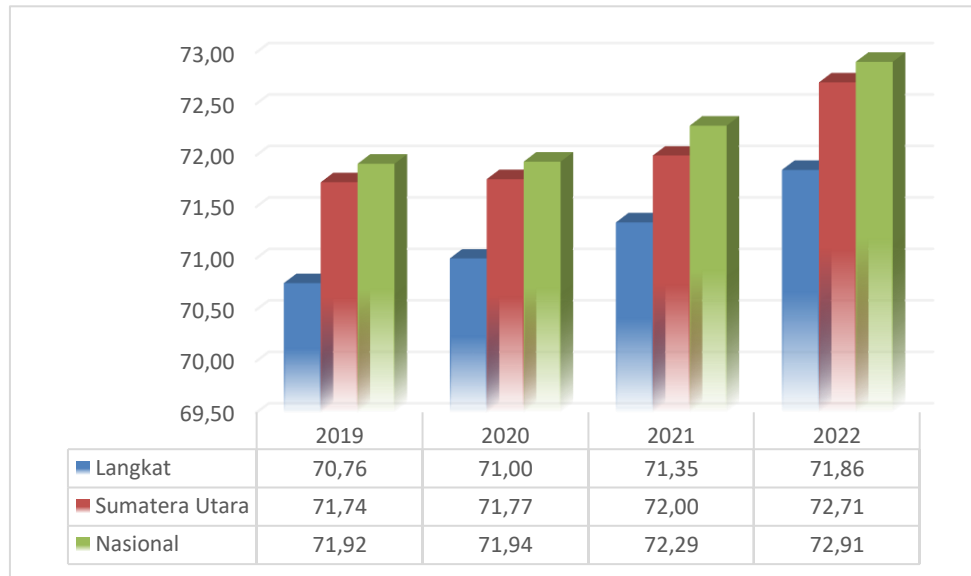
Gambar 2.15
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Langkat mencapai angka 71,86. Angka ini meningkat sebesar 0,35 poin atau tumbuh sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 71,35 poin. Namun selama kurun waktu 5 tahun angka IPM Kabupaten Langkat selalu berada dibawah nilai IPM Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

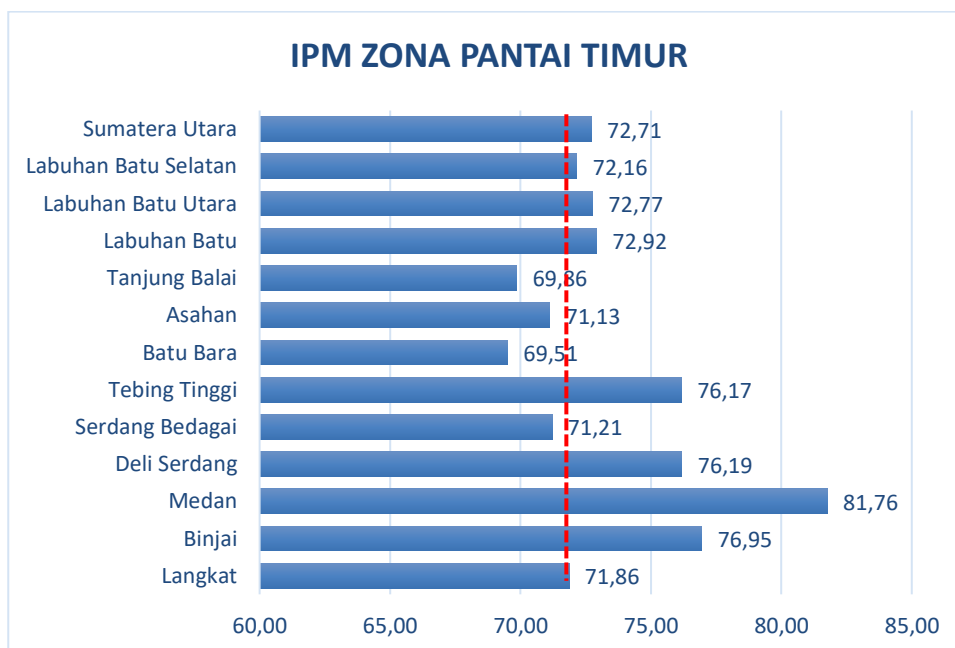
Gambar 2.16
IPM Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2019 – 2022



Sumber : BPS Langkat

Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota Zona pantai timur Provinsi Sumatera Utara, maka IPM Kabupaten Langkat cukup rendah. Kabupaten Langkat berada di urutan 5 terendah. Yang paling rendah adalah Kabupaten Batu Bara sebesar 69,51 poin, Kota Tanjung Balai sebesar 69,86 poin, Kabupaten Asahan 71,13 poin, dan Kabupaten Serdang Bedagai 71,21 poin.

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Zona Pantai
Timur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Berdasarkan metode perhitungan IPM, terdapat 4 komponen IPM yang dihitung, yaitu angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Secara umum, masing-masing komponen IPM Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan Pengeluaran perkapita. Hal ini mungkin disebabkan karena dampak pandemi covid 19 yang cukup tinggi pada tahun 2020.

Pada tahun 2022, bayi yang lahir di Kabupaten memiliki harapan hidup sampai dengan 69,39 tahun, lebih lama 0,42 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 13,26 tahun pada tahun 2022 lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Langkat usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 8,68 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan tahun 2021. Dari sisi pengeluaran perkapita, pada tahun 2022 pengeluaran perkapita Kabupaten Langkat sebesar Rp. 11.439.000,- meningkat Rp. 297.000,- dibandingkan dengan tahun 2021.



Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat
Tahun 2019 - 2022

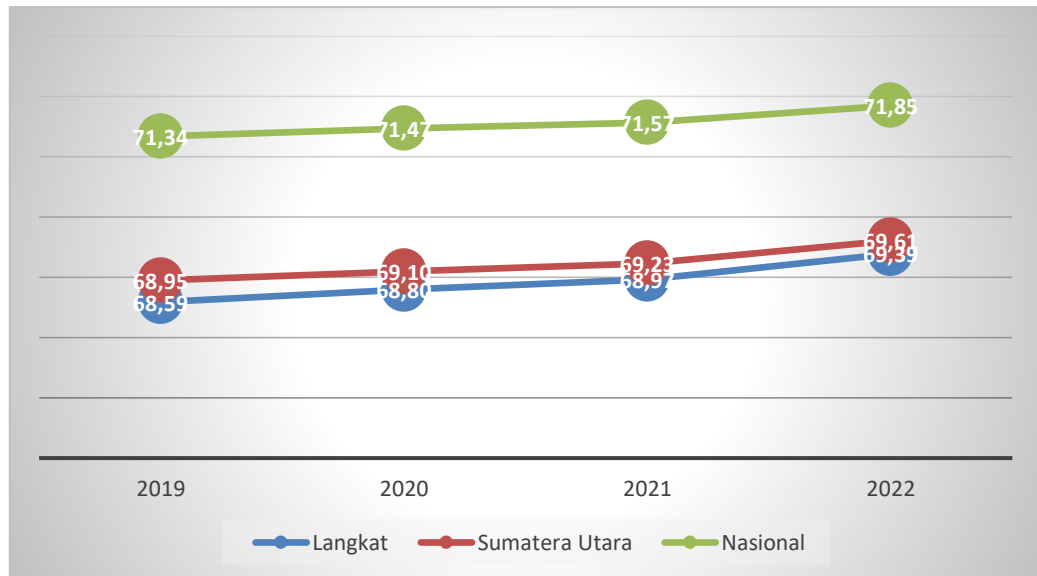
No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	IPM Kabupaten Langkat (%)	70,76	71,00	71,35	71,86
1.1	Usia harapan hidup (Tahun)	68,59	68,80	68,97	69,39
1.2	Angka harapan sekolah (Tahun)	12,81	13,05	13,24	13,26
1.3	Rata-rata lama sekolah	8,64	8,65	8,66	8,68
1.4	Pengeluaran perkapita disesuaikan (000 Rp.)	11.208	11,071	11.142	11.439
1.5	Pertumbuhan IPM (%)	0,70	0,34	0,49	0,71
1.6	Indeks Pendidikan	0,644	0,651	0,656	0,66
1.7	Indeks Kesehatan	0,748	0,751	0,754	0,76

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup baru lahir mempresentasikan dimensi umur Panjang dan hidup sehat terus menerus. Selama periode 2019-2022, Kabupaten Langkat telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup sebesar 0,8 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata usia harapan hidup Kabupaten Langkat tumbuh sebesar 0,3 persen pertahun. Pada tahun 2019 usia harapan hidup Kabupaten Langkat saat lahir adalah sebesar 68,59 tahun, dan tahun 2022 telah mencapai usia 69,39 tahun. Meskipun mengalami peningkatan, namun usia harapan hidup Kabupaten Langkat relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan usia harapan hidup Provinsi Sumatera Utara.

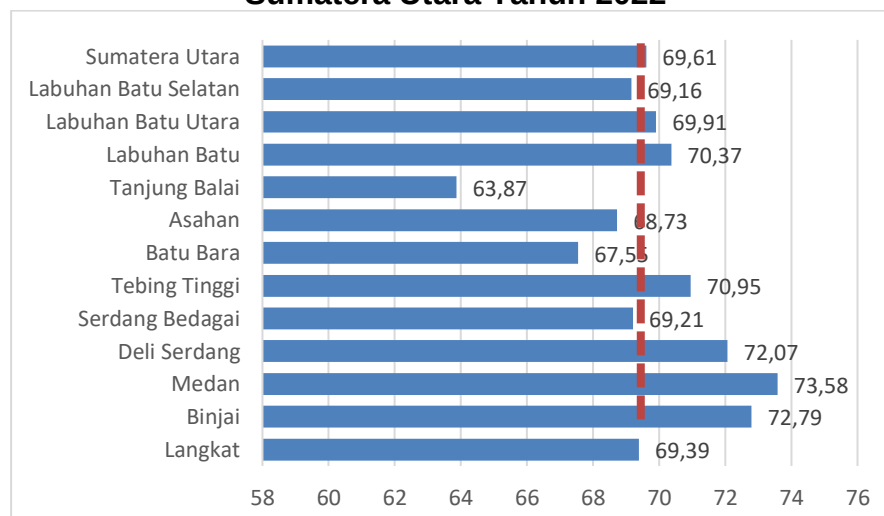
Gambar 2.18
Usia Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Langkat
Tahun 2019 – 2022



Sumber : BPS Langkat

Jika dilihat Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota yang berada pada Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, maka Kota Medan memiliki angka Usia Harapan Hidup yang tertinggi yaitu 73,58 tahun. Angka ini berada diatas angka Usia harapan hidup Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Sedangkan daerah yang memiliki Usia Harapan Hidup terendah adalah Kota Tanjung Balai yang hanya sebesar 63,87 tahun.

Grafik 2.19
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022

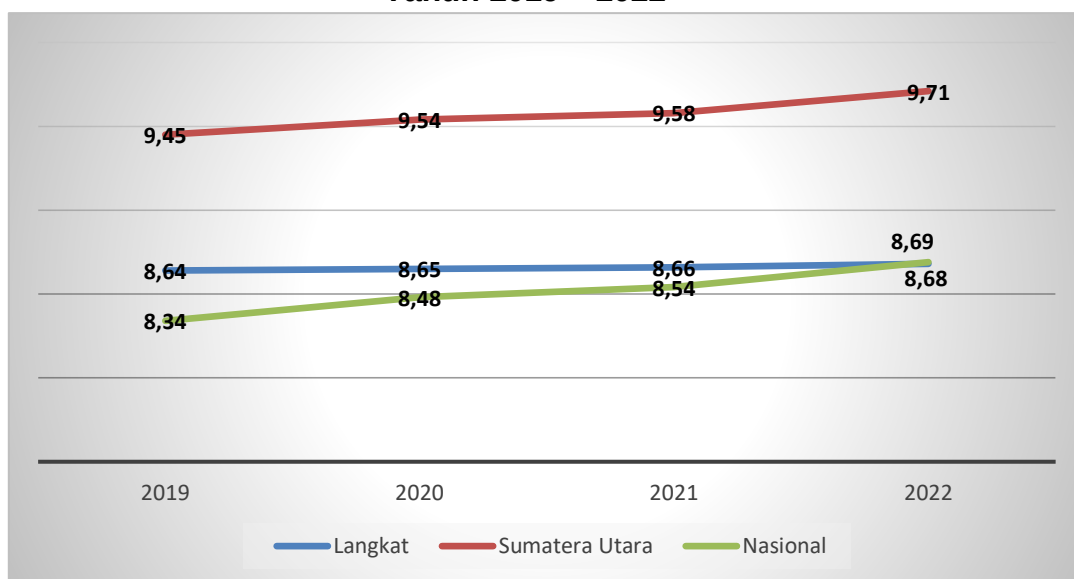


Sumber : BPS Langkat

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata – rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Langkat pada tahun 2022 adalah 8,68 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat sepanjang tahun 2019 - 2022 memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun angka RLS Kabupaten Langkat masih sangat rendah. Jika dibandingkan dengan RLS maksimum (15 tahun), maka RLS Kabupaten Langkat masih dibawah angka 9 tahun. Artinya mayoritas penduduk Kabupaten Langkat usia 25 tahun keatas belum menamatkan Pendidikan formal hingga SMP/ sederajat atau belum menempuh Pendidikan wajib dasar 9 tahun. Jika dibandingkan dengan perolehan angka RLS provinsi dan Nasional, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat Tahun 2022 relatif lebih rendah.

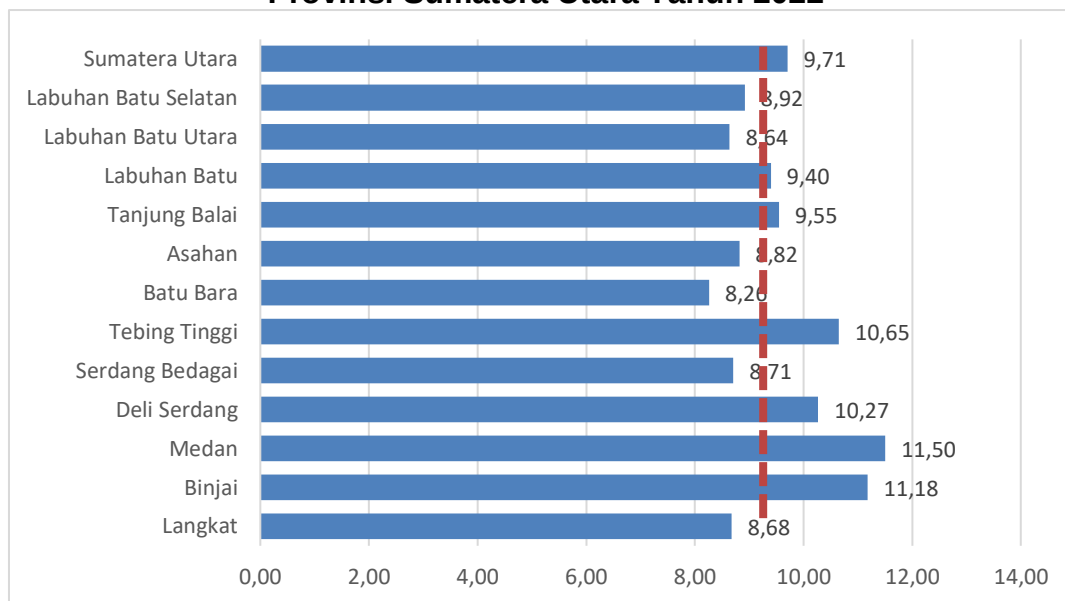
Gambar 2.20
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat
Tahun 2019 – 2022



Jika dibandingkan dengan angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota yang berada di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, maka angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat masih relatif rendah. Angka Rata-rata lama sekolah tertinggi berada pada Kota

Medan yaitu sebesar 11,50 tahun dan yang terendah berada pada Kabupaten Batu Bara yaitu sebesar 8,26 tahun.

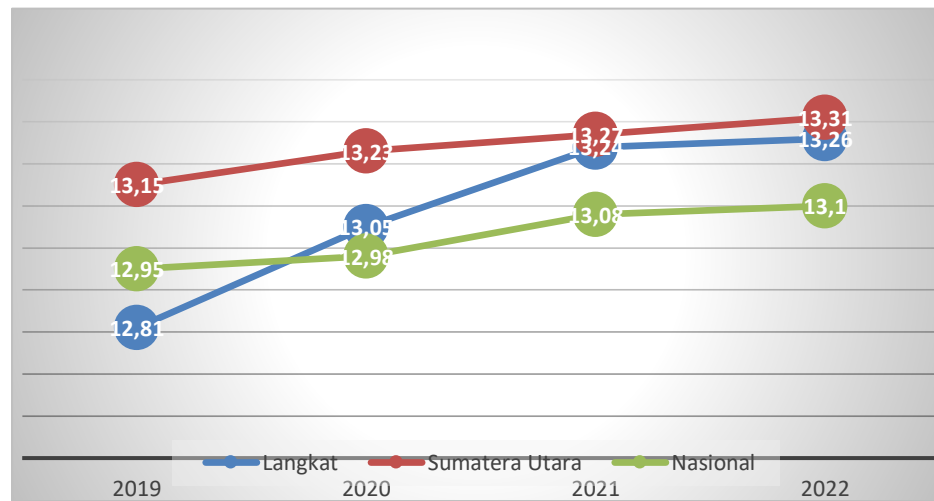
Gambar 2.21
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Langkat tahun 2022 adalah sebesar 13,26 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun 2021. Artinya pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 13,26 tahun atau setara dengan jenjang Diploma I. Namun angka harapan lama sekolah Kabupaten Langkat masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Utara namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan harapan lama sekolah nasional.

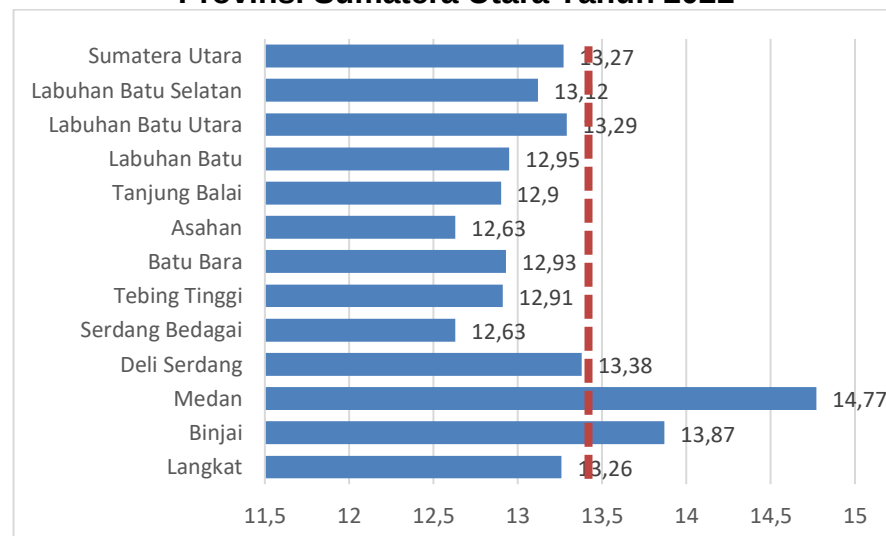
Gambar 2.22
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Langkat 2019 – 2022



Sumber : BPS Langkat

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Langkat berada pada peringkat ke-5. Angka harapan lama sekolah tertinggi berada pada Kota Medan yaitu sebesar 14,77 tahun. Sedangkan daerah yang memiliki angka harapan lama sekolah terendah adalah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebesar 12,63 tahun.

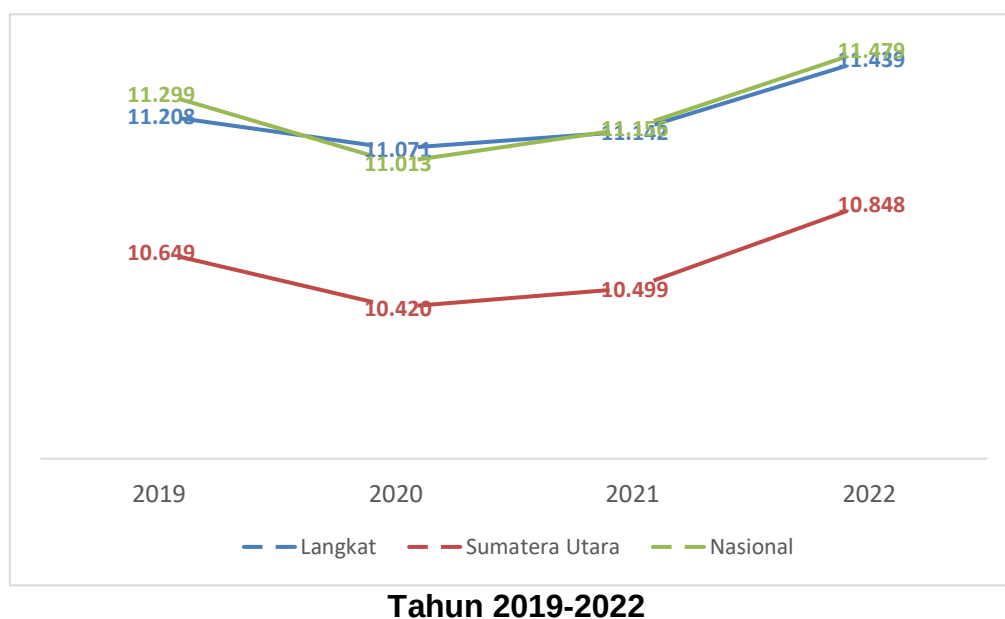
Grafik 2.23
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Pengeluaran per Kapita riil disesuaikan

Pengeluaran per Kapita disesuaikan merupakan ukuran daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran per kapita Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2019 – 2022. Hanya pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi covid 19 yang terjadi dimana pada tahun 2020 merupakan awal terjadinya pandemi covid 19. Pengeluaran riil perkapita Kabupaten Langkat Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara, namun sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran perkapita Nasional.

Gambar 2.24
Pengeluaran perkapita riil Kabupaten Langkat

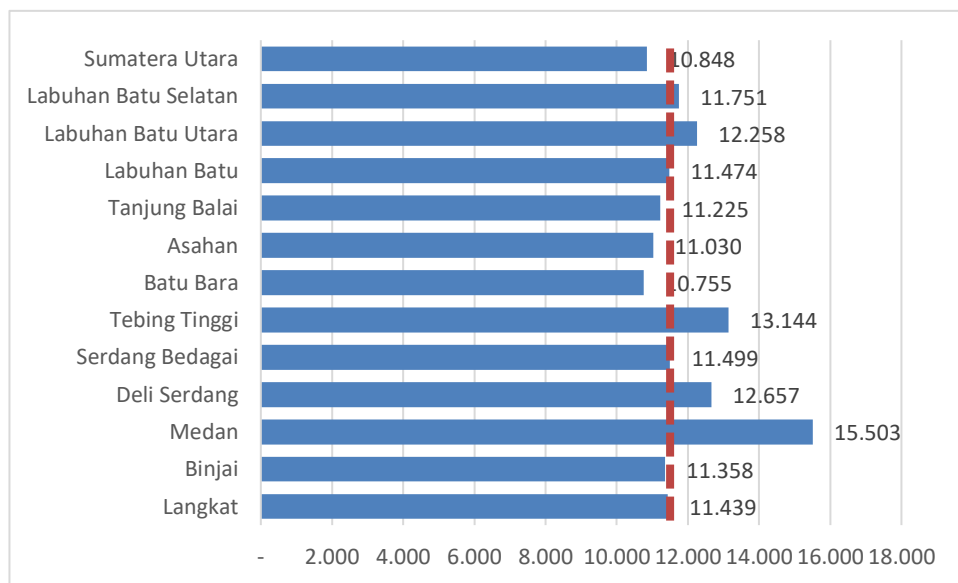


Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, maka Pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Kabupaten Langkat cukup rendah. Daerah yang memiliki pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan tertinggi adalah

Kota Medan yaitu Rp. 15.503.000,- dan yang terendah adalah Kabupaten Batu Bara yaitu sebesar Rp. 10.755.000,-. Namun secara keseluruhan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Kabupaten/Kota yang berada pada Zona Pantai Timur Sumatera Utara masih lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara kecuali Kabupaten Batu Bara.

Gambar 2.25
Pengeluaran perkapita riil Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur



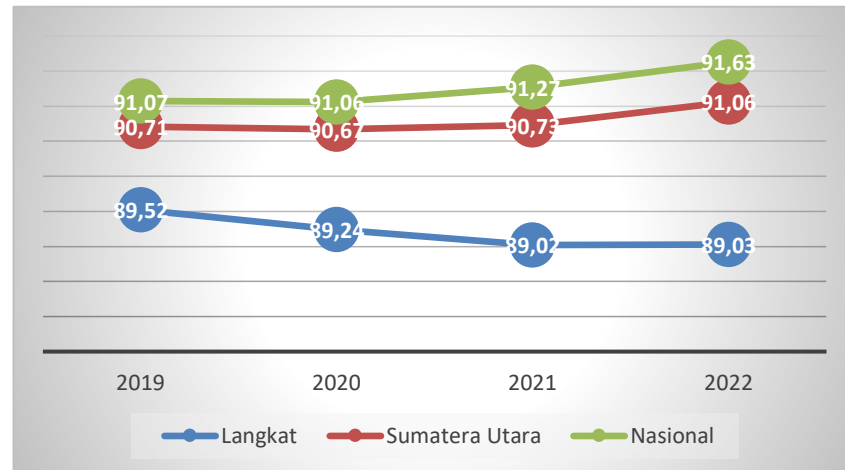
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

C. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila jarak nilai IPG dengan nilai 100 semakin kecil. Atau IPM Laki-laki hampir sama dengan IPM perempuan. Pada tahun 2022 nilai IPG Kabupaten Langkat adalah sebesar 89,03 poin mengalami peningkatan 0,01 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 89,02 poin. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional maka IPG Kabupaten Langkat berada dibawah keduanya. Hal ini memberikan gambaran bahwa masih

terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Langkat.

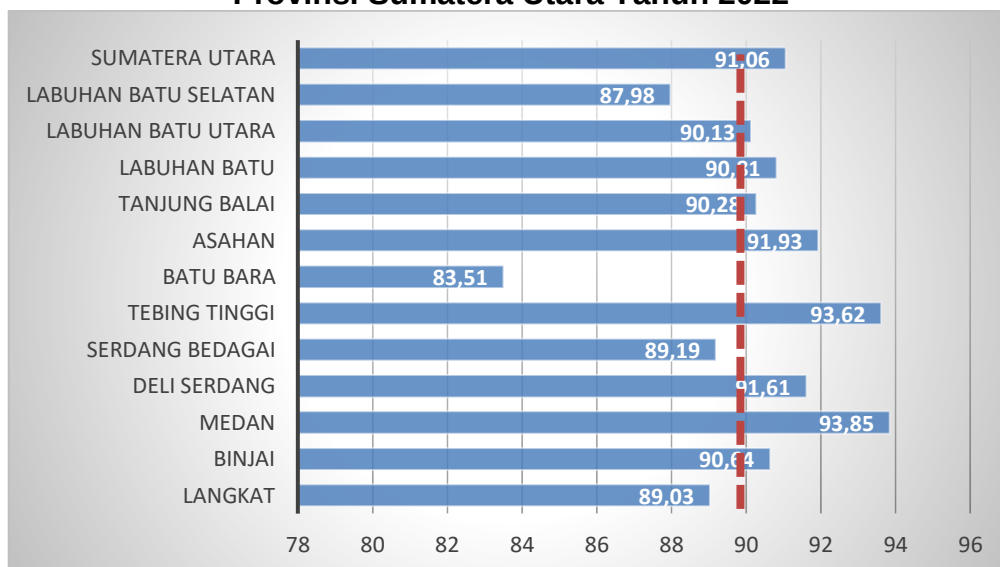
Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Langkat tahun 2022 masih sangat rendah. Kabupaten Langkat berada pada urutan 4 terbawah. Daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Gender terendah adalah Kabupaten Batu Bara yaitu sebesar 83,51 poin. Sedangkan daerah yang memiliki IPG tertinggi adalah Kota Medan yaitu sebesar 93,85 poin

Grafik 2.27
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Zona Pantai Timur
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



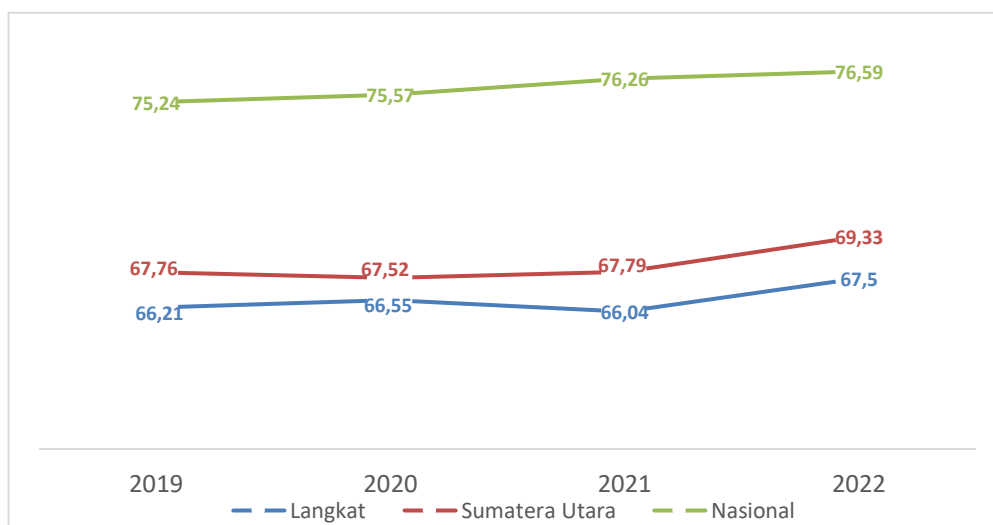
D. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan.

Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Langkat mengalami kenaikan sepanjang tahun 2019-2020. Namun pada tahun 2021 nilai IDG Kabupaten Langkat mengalami penurunan sebesar 0,51 poin jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Langkat Kembali mengalami peningkatan sebesar 1,46 poin menjadi sebesar 67,50 poin, Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan ekonomi di Kabupaten Langkat. Jika dibandingkan dengan nilai IDG Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka nilai IDG Kabupaten Langkat masih berada jauh dibawahnya.

Gambar 2.28
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Langkat

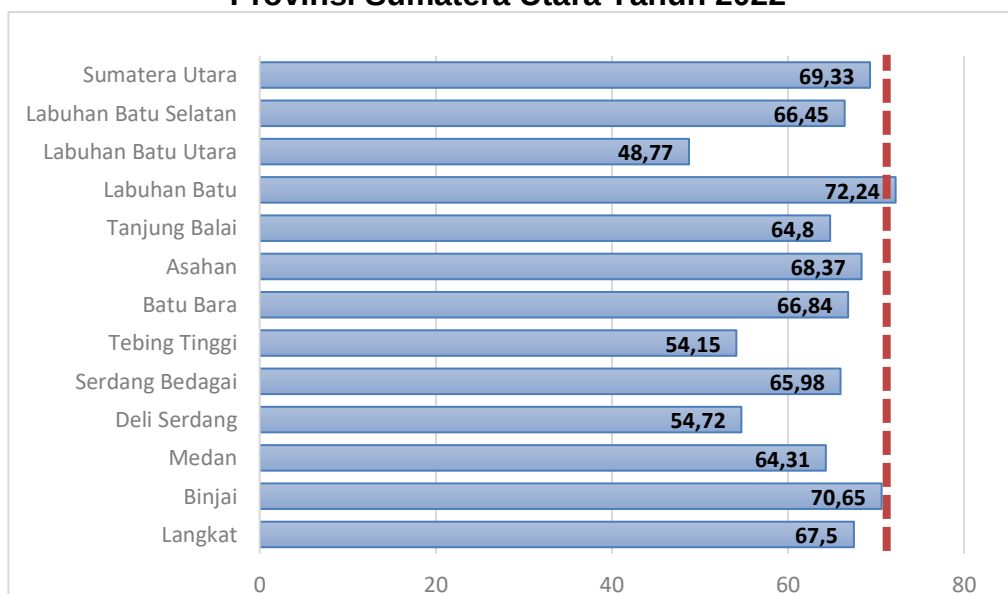
Tahun 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, IDG Kabupaten Langkat berada pada urutan yang ke-4 setelah Kota Binjai. Capaian IDG tertinggi ada di Kabupaten Labuhan Batu dan capaian terendah ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Grafik. 2.29
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Zona Pantai Timur
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

F. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun keatas. Pada usia ini, memiliki potensi untuk masuk ke Angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja Kabupaten Langkat terus mengalami kenaikan yang signifikan, dari 779.450 orang pada tahun 2021 menjadi sebesar 787.114 orang pada tahun 2022. Peningkatan penduduk usia kerja ini terjadi seiring dengan tren peningkatan penduduk Kabupaten Langkat. Sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Langkat yaitu sebesar 71,51 persen atau 562.833 orang merupakan Angkatan kerja, yang terdiri dari 524.177 orang bekerja dan 38.706 orang pengangguran.

Tabel 2.18
Tabel Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2022

Kondisi Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia Kerja	733.000	771.715	779.450	787.114
Angkatan Kerja	505.037	539.583	538.756	562.833
Bekerja	478.278	501.719	511.155	524.177
Pengangguran	26.759	37.864	27.601	38.706
Bukan Angkatan Kerja	227.963	232.115	240.745	224.231
TPT	5,28	7,02	5,12	6,88
TPAK	68,90	69,92	69,12	71,51

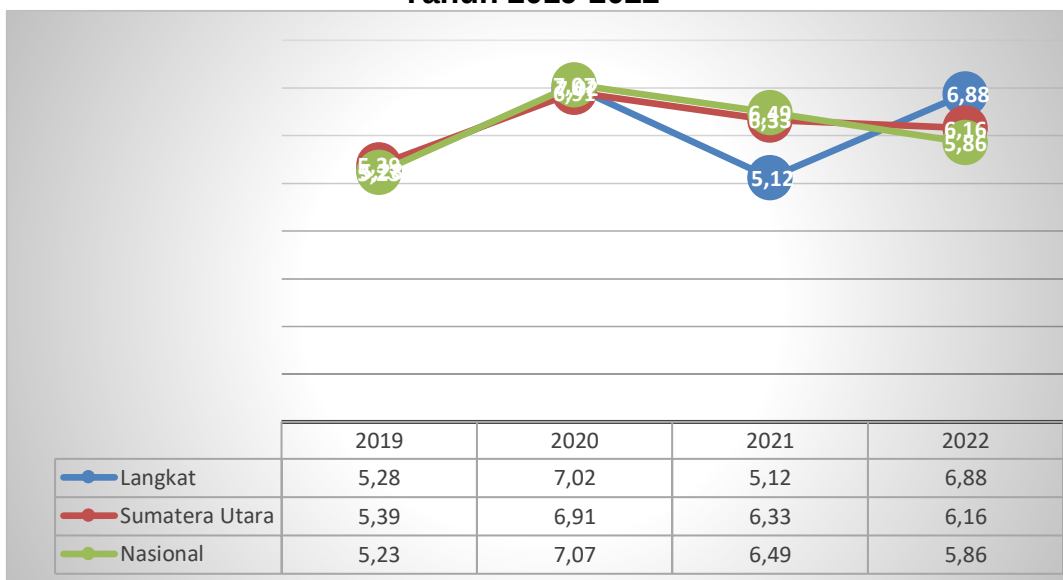
Sumber : BPS Langkat

Jumlah Angkatan kerja Kabupaten Langkat Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24.077 orang dibandingkan dengan tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya jumlah Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan menjadi 71,51 pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 69,12 persen. Peningkatan jumlah TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik penduduk yang bekerja maupun penduduk yang menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka

juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. TPT Kabupaten Langkat tahun 2022 adalah sebesar 6,88 persen. Artinya dari 100 orang angkatan kerja, maka terdapat sekitar hamper 7 orang yang menganggur. Pada tahun 2022 TPT Kabupaten Langkat mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 5,12 persen. Peningkatan jumlah TPT Kabupaten Langkat disebabkan karena peningkatan jumlah Angkatan kerja Tahun 2022 namun tidak diiringi dengan penyerapan Angkatan kerja pada pasar kerja. Dampak pandemic covid 19 menyebabkan beberapa perusahaan belum beroperasi secara maksimal serta kemampuan/spesifikasi Angkatan kerja yang tersedia belum sesuai dengan kondisi pasar kerja mungkin menjadi penyebab peningkatan jumlah TPT pada tahun 2022. Nilai TPT Kabupaten Langkat pada tahun 2022 berada diatas TPT Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2022

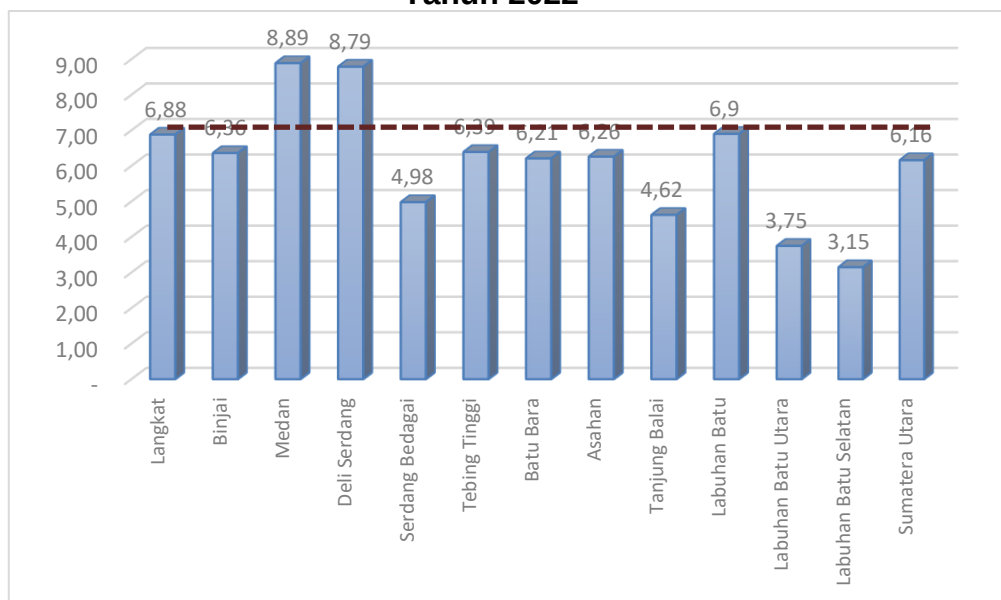


Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara, TPT Kabupaten Langkat berada pada urutan ke-4 tertinggi. TPT tertinggi ada di Kota Medan yaitu sebesar 8,89 persen dan

TPT yang terendah adalah Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu sebesar 3,15 persen.

Gambar 2.31
TPT Zona Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara Sumatera
Utara
Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

Kabupaten Langkat terbentuk dari bekas kesultanan Melayu Langkat. Pada zaman Pemerintahan Belanda, mulai dilakukan pembukaan perkebunan-perkebunan besar di Wilayah Langkat. Pembukaan perkebunan tersebut sekaligus juga membuka Wilayah Langkat terhadap masuknya berbagai etnis/suku lain di Indonesia. Masuknya etnis lain tersebut terutama etnis Jawa dibutuhkan sebagai tenaga kerja di sektor perkebunan besar, selain itu masuk juga etnis Banjar dan etnis-etnis lainnya.

Kedatangan etnis-etnis diluar etnis Melayu tersebut juga membawa kebudayaan dan Kesenian dari masing-masing daerah asalnya. Untuk mewadahi pengembangan adat dan budaya tersebut telah terbentuk organisasi-organisasi yang ada pada awalnya untuk melestarikan adat dan budaya dari masing-masing etnis yang ada. Organisasi tersebut adalah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Langkat untuk etnis

Melayu, Pujakesuma untuk etnis Jawa, Marga Silima untuk etnis Karo, Hikma untuk etnis Mandailing dan Tapanuli Selatan dan lain-lain.

Di Kabupaten Langkat juga terdapat kelompok masyarakat Bali. Kampung Bali yang dihuni sekitar 60KK ini hidup dalam tatanan adat dan agama Hindu Bali yang begitu kental. Pada waktu-waktu tertentu, kita menyaksikan kegiatan keagamaan yang disebut Purnama Tilem dan Hararwati. Sebagai penganut Hindu yang taat, setiap tahun juga mereka melakukan upacara hari Raya Nyepi dan peringatan Tahun Baru Saka.

Kesenian-kesenian yang ada hanya dipentaskan pada saat-saat ada upacara pesta pernikahan atau pesta-pesta keluarga lainnya. Agenda resmi kebudayaan yang dilaksanakan secara rutin belum ada. Perkembangan jumlah kegiatan seni dan kebudayaan, sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya, presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dan jumlah kelompok/grup dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kegiatan seni dan Kebudayaan	1 kali	2 kali	2 kali	3 kali
2	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya	n/a	2 unit	2 unit	2 unit
3	Presentase Benda, situs dan Kawasan Cagar Alam Budaya yang Dilestarikan	n/a	1,03%	1,03%	1,03%
4	Jumlah Kelompok/Grup Kesenian	n/a	35	35	40

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Langkat

B. Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Langkat ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun olahraga baru sebatas sebagai hobi, belum mengarah pada prestasi. Fasilitas olahraga yang berupa lapangan sepak bola, tersebar di seluruh Kecamatan, sedangkan untuk fasilitas cabang olahraga lainnya biasanya diadakan oleh masing-masing penduduk yang memiliki hobi olahraga tersebut.



Kegiatan rutin olahraga yang ada adalah kegiatan turnamen sepak bola pelajar piala Bupati Langkat, yang diadakan secara rutin setiap tahun. Sedangkan untuk cabang olahraga lain belum ada agenda resmi. Perkembangan sarana dan prasarana lapangan olahraga dan sebaran jumlah sarana/fasilitas olahraga di Kabupaten Langkat berdasarkan kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Langkat Tahun 2019-2022

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Organisasi Pemuda	62	61	62	65
2	Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi (cabang OR)	83	99	64	158
3	Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional (cabang OR)	15	35	29	-
4	Prestasi Olahraga di Tingkat Internasional	0	12	8	-
5	Jumlah Lapangan Olahraga	408	412	417	425
6	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	10	10	12

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Langkat

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

- 1) Pendidikan
Kondisi Pendidikan di Kabupaten Langkat dapat digambarkan melalui Capaian indikator bidang Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	APK PAUD usia 3-6 tahun (%)	93,67	94,65	90,45	97,41
2	APK SD/MI Sederajat	112,72	110,83	110,41	106,38
3	APM SD/MI sederajat	98,93	98,64	99,74	94,99
4	APK SMP/MTs Sederajat	86,61	90,17	88,47	97,45
5	APM SMP/MTs Sederajat	78,86	78,97	81,65	80,98
6	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SD (%)	1,19	0,43	0,53	0,30
7	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SMP (%)	2,10	2,00	1,44	1,6
8	Angka melanjutkan SD-SMP (%)	68,19	87,48	79,40	88,10
9	Angka kelulusan SMP (%)	100	100	100	100
10	Rasio Siswa per ruang kelas	32	32	32	32
11	Persentase ruang kelas dalam kondisi baik	73,62	74,62	74,68	75,95
12	Jumlah Sekolah (SD/sederajat dan SMP/sederajat) Terakreditasi A atau B	579	603	638	638
13	Persentase guru TK, SD, SMP, yang bersertifikat pendidik	85,00	78,85	78,90	81,05
14	Rasio Guru bersertifikat pendidik per sekolah	8,6:1	8,9:1	8,9:1	9,3:1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

Capaian indikator bidang pendidikan pada tahun 2022, ada 10 indikator kinerja yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Namun masih ada 4 indikator yang mengalami penurunan.

- 2) Kesehatan
Kondisi Kesehatan di Kabupaten Langkat dapat digambarkan melalui Capaian indikator bidang Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.22
Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Persentase persalinan di faskes	95,50	93,40	94,70	94,05
2	Jumlah kematian balita (jiwa)	39	2	32	0
3	Jumlah kematian ibu (jiwa)	8	11	18	8
4	Jumlah kematian bayi (jiwa)	36	57	16	16
5	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	12,33	n/a	22,2	15,5
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	20,40	n/a	31,5	18,6
7	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	13,83	n/a	5,7	9,2
8	Persentase Puskesmas terakreditasi	86,7	100	100	94
9	Persentase rumah sakit sesuai standar (terakreditasi)	50	100	100	100
10	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Pustu & jaringannya) dalam kondisi baik	n/a	100	80	88,5
11	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Farmasi dan Alat Kesehatan	100	100	100	100
12	Persentasi cakupan Posbindu	n/a	68,23	100	72,56
13	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	100	100	100	100
14	Persentase Desa UCI	89,89	0	68,60	73,6
15	Jumlah kemitraan pelayanan Kesehatan rujukan	0	0	0	42
16	Eradikasi Polio (kasus)		19	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Langkat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 16 indikator bidang Kesehatan, maka 11 indikator memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Dan ada 5 indikator yang masih lebih kecil capaiannya dibandingkan dengan tahun 2021.

- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Langkat pada adalah sepanjang 1.561,31 km. Panjang jalan kabupaten Langkat ini tidak lagi mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Kondisi jalan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

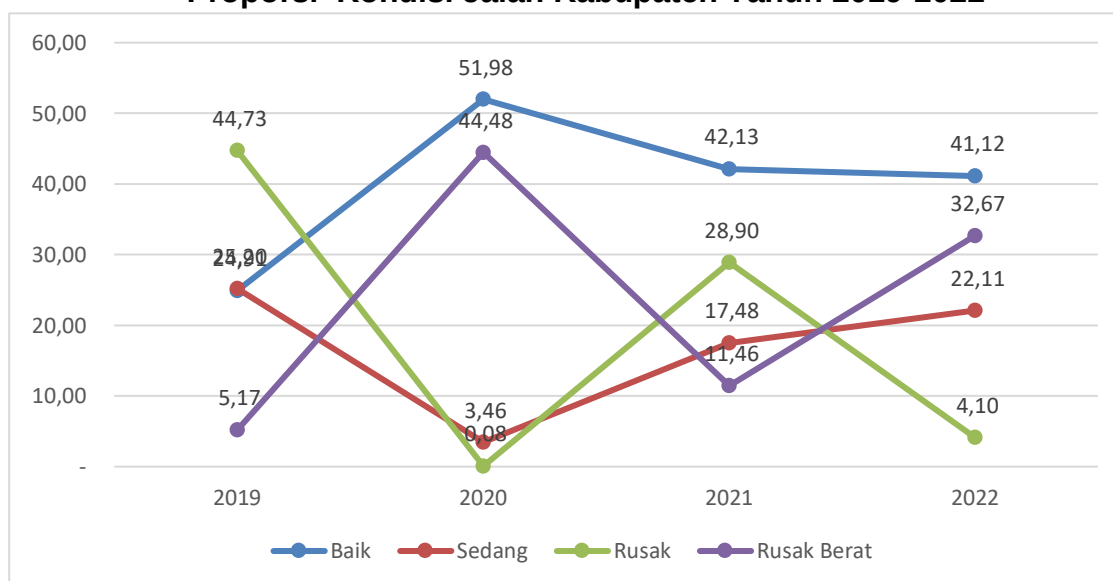
Tabel 2.23
Kondisi Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2022

No	Tahun	Kondisi Jalan (Km)								Total
		Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat		
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
1	2019	388,85	24,91	393,44	25,20	698,35	44,73	80,67	5,17	1561,31
2	2020	811,56	51,98	54,00	3,46	1,20	0,08	694,54	44,48	1561,31
3	2021	657,72	42,13	273,45	17,48	451,26	28,90	178,87	11,46	1561,31
4	2022	642,00	41,12	345,20	22,11	64,00	4,10	510,10	32,67	1561,31

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Pada tahun 2022 terjadi penurunan Panjang jalan Kabupaten Langkat dalam kondisi baik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun terjadi peningkatan pada jalan kabupaten kondisi sedang dan kondisi rusak. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa ruas jalan Kabupaten yang mengalami penurunan kondisi namun ada juga yang mengalami peningkatan kondisi jalan.

Gambar 2.32
Proporsi Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Berdasarkan jenis permukaan jalan, Panjang jalan kabupaten Langkat Sebagian besar sudah memiliki jenis permukaan aspal yaitu sepanjang 841,70 Km, jenis kerikil sepanjang 690,80 Km. Sisanya merupakan jenis permukaan tanah dan lainnya.

Gambaran kondisi bidang jalan dan jembatan dapat dilihat melalui capaian indikator bidang jalan dan jembatan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Capaian Indikator Jalan dan Jembatan Tahun 2019-2021

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kabupaten	1.561,31	1.561,31	1.561,31	1.561,31
2	Persentase peningkatan kelas jalan Kabupaten	54,5	66,0	-	-
3	Database Kondisi Jalan	0	0	1	1
4	Jumlah Jembatan	262	273	284	286
5	Panjang Jalan dalam kondisi baik	388.850	811.560	657.722	642.000
6	Jumlah Jembatan Kondisi Baik	161	177	225	225

- Sumber Daya Air

Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 aliran sungai besar dan kecil, 4 sungai besar diantaranya yaitu : Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lapan dan Sungai Besitang. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan, perhubungan dan lain-lain. Pemanfaatan sungai-sungai tersebut untuk irigasi pertanian, telah ditetapkan daerah irigasi sebanyak 34 unit dengan luas baku 12.882 ha. Dari luas lahan baku sawah daerah irigasi tersebut yang telah efektif menjadi lahan sawah beririgasi teknis seluas 8.370 Ha (Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2014), atau 64,97% dari total luas lahan area baku daerah Irigasi.

Salah satu daerah irigasi terpenting dan memiliki luas areal baku terluas adalah Daerah Irigasi Namu Sira-sira di Kecamatan Sei Bingai dengan luas area baku 6.300 Ha atau 48,91% dari total area baku Kabupaten Langkat. Daerah Irigasi ini dibagi dua yakni daerah irigasi Namu Sira-sira Kiri dan daerah irigasi Namu Sira-sira Kanan. Daerah irigasi Namu Sira-sira kiri

dengan total luas lahan 1.706 Ha. Di wilayah Kabupaten Langkat yang meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuala dan Selesai. Sedangkan Daerah Irigasi Namu Sira-sira kanan dengan total luas lahan pertanian sawah 3.226 Ha, yang meliputi kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Gambaran kondisi Sumber Daya Air Kabupaten Langkat tahun 2022 dapat dilihat melalui capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.25
Capaian Indikator Sumber Daya Air Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	52	53	n/a	n/a
2	Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik (meter)	36.480	38.005	43.450	43.450
3	Panjang Sungai yang terkonservasi (meter)	500	10.620	10.620	10.620
4	Panjang Turap/Talud dan Bronjong yang dibangun (meter)	6.631	7.821	8.613	8.613
5	Persentase air minum dalam kondisi baik	n/a	n/a	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Langkat

- Penataan Ruang

Terkait Penataan ruang, sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat masih berupa ruang terbuka hijau, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat berupa hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Rencana penggunaan lahan berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Langkat dalam RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26
Luasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033

No	Lokasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Suaka Alam dan Wisata	214.382,70	34,23
2	Hutan Lindung	5.538,32	0,88
3	Hutan Produksi	28.232,32	4,51
4	Hutan Produksi Terbatas	54.111,12	8,64
5	Perkebunan	200.803,64	32,06
6	Permukiman	9.277,46	3,47



No	Lokasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
7	Pertanian Lahan Kering	21.732,46	1,48
8	Pertanian Lahan Basah	74.390,00	11,88
9	Sungai/ Badan Air	10.014,98	1,60
10	Tambak	7.846,23	1,25
Jumlah		626.329,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Langkat, 2013-2033

- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Mayoritas rumah di Kabupaten Langkat sudah ber dinding tembok yaitu sebanyak 49,65% sisanya kayu sebanyak 34,14% dan dinding bambu/tepas sebanyak 16,21%. Sumber penerangan sebagian besar menggunakan fasilitas lampu PLN sebesar 95,61%, sedangkan sisanya menggunakan pelita/teplok/sentir sebanyak 4,39%. Penguasaan bangunan tempat tinggal ditempati rumah tangga di Kabupaten Langkat sebesar 77,79% milik sendiri, sekitar 8,46% adalah merupakan rumah dinas baik dinas milik PT Perkebunan Nusantara maupun milik PT. Pertamina. Sebagian terbesar memiliki luas lantai rumah seluas 20-49 m² sebanyak 48,11% dan luas lantai 60–99 m² sebanyak 28,99%. Dengan atap seng sebesar 80,29% dan atap rumbia/ijuk sebesar 12,15%. Capaian indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.27
Capaian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan kumuh (ha)	150	130,61	99,26	99,26
2	Jumlah kawasan kumuh yang tertata (lokasi)	1	0	1	1
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	n/a	n/a	32,61	32,61
4	Persentase rumah tangga dengan rumah tidak layak huni	11	12,04	10,35	10,35

Sumber : Dinas Perkim Kab. Langkat

Berdasarkan data tabel diatas, maka terlihat penurunan luas Kawasan kumuh Kabupaten Langkat. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan beberapa penataan/pembangunan pada beberapa lokasi Kawasan kumuh Kabupaten Langkat. Pembangunan tersebut bersumber dari Dana APBD

Kabupaten Langkat, APBD Provinsi dan ada juga yang bersumber dari Dana DAK. Penurunan luas Kawasan kumuh sejalan dengan penurunan persentase rumah tangga dengan rumah tidak layak huni. Pembangunan RTLH dilakukan pada daerah-daerah yang menjadi titik lokasi Kawasan kumuh Kabupaten Langkat.

Tabel 2.28
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah Tangga
Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Langkat

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni
Bahorok	1.101,83	42.616	10.316	8.371	81,15
Sirapit	98,5	17.016	4.077	3.708	90,95
Salapian	221,73	27.702	6.640	6.322	95,21
Kutambaru	234,84	14.334	3.411	3.291	96,48
Sei Bingai	333,17	51.862	12.509	12.007	95,99
Kuala	206,23	41.861	10.041	11.399	113,52
Selesai	167,73	74.249	18.299	15.839	86,56
Binjai	42,05	45.506	11.349	10.187	89,76
Stabat	108,85	88.193	21.941	21.367	97,38
Wampu	194,21	43.395	10.569	9.245	87,47
Batang Serangan	899,38	37.422	8.996	5.835	64,86
Sawit Seberang	209,10	26.932	6.635	3.600	54,26
Padang Tualang	221,14	49.882	12.358	11.243	90,98
Hinai	105,26	51.088	12.885	9.392	72,89
Secanggang	231,19	69.843	17.172	14.690	85,55
Tanjung Pura	179,61	68.938	17.374	12.754	73,41
Gebang	178,49	45.462	11.249	9.506	84,51
Babalan	76,41	60.305	14.618	13.749	94,06
Sei Lapan	280,68	50.040	12.314	10.174	82,62
Brandan Barat	89,80	23.456	5.783	6.761	116,91
Besitang	720,74	46.991	11.523	10.168	88,24
Pkl. Susu	151,35	44.430	10.990	8.386	76,31
Pmt. Jaya	209	13.888	3.412	2.076	60,84
Total	6.261,29	1.035.411	254.461,00	220.070,00	86,48

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Langkat

- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian indikator Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Indikator Satpol PP Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Persentase cakupan wilayah penanganan kebakaran	n/a	17	17	17
2	Rata-rata respon penanganan kejadian kebakaran (menit)	n/a	15	15	15

Sumber : Satpol PP Kab. Langkat

- Penanggulangan Bencana

Pengurangan dan pencegahan terjadinya bencana merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi permasalahan bencana.

Tabel 2.30
Capaian Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Resiko Bencana	138,62 (sedang)	138,62 (sedang)	137,23 (sedang)	137,23 (sedang)
2	Dokumen rencana penanggulangan bencana	0	0	0	0
3	Persentase ketersediaan data dan informasi kebencanaan	100	100	100	100
4	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100	100	100	100

Sumber : BPBD Kabupaten Langkat

Dalam rangka penurunan indeks resiko bencana, ada 3 faktor yang perlu menjadi perhatian, yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari ketiga komponen ini yang paling memungkinkan untuk diintervensi adalah meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan bencana melalui peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

- 6) Sosial
Capaian indikator kinerja Bidang Sosial sampai dengan tahun 2022 adalah:

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	2019	2020	2021	2022
Persentase fakir miskin yang berdaya mandiri	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase Anak terlantar yang dibina	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	n/a	50	50	50
Jumlah Kampung Siaga Bencana	0	2	3	3
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100
Persentase penyandang disabilitas yang berdaya guna	0	0	0	0
Persentase anak terlantar yang dibina	n/a	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial

Kesejahteraan Sosial di suatu daerah dapat diamati dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di daerah tersebut. Terkait hal tersebut, jumlah PMKS di Kabupaten Langkat pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan PMKS tertinggi adalah PMKS penyandang cacat dan PMKS anak dengan kedisabilitasan.

Tabel 2.32
PMKS Kabupaten Langkat 2019 – 2022

Jenis PMKS	2019	2020	2021	2022
Anak Balita Terlantar	0	0	0	0
Anak Terlantar	2	0	6	181
Anak Nakal	0	0	0	0
Anak Jalanan	4	0	0	0
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	0	0	0	0
Korban Tindak Kekerasan	0	0	3	0
Lansia Terlantar	3	0	2	1.069
Penyandang Cacat	0	114	395	374
Wanita Tuna Susila	0	13	0	0
Pengemis	6	23	15	7
Gelandangan	0	0	0	2
Bekas Wanita Binaan Lembaga Pemasarakatan	0	0	0	0

Jenis PMKS	2019	2020	2021	2022
Korban Penyalahgunaan Napza	4	35	8	4
Keluarga Fakir Miskin	149.415	65.736	65.736	36.386
Keluarga yang tinggal di Rumah tidak Layak Huni	100	0	95	0
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	0
Komunitas adat Terpencil	0	0	0	0
Korban Bencana Alam	277	955	563	6.253
Korban Bencana Sosial	34	78	105	70
Pekerja Migran Terlantar	0	0	0	1
Penyandang HIV/AIDS	0	0	0	0
Keluarga Rentan	0	0	0	0
Anak Jermal	0	0	0	0
Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	0	0	0	0
Anak yang Behadapan dengan Hukum	14	12	5	4
Anak dengan kedisabilitas	0	0	110	249
Jumlah	149.859	66.966	67.043	44.600

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

2.3.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Gambaran kondisi tenaga kerja Kabupaten Langkat tahun 2021 dapat dilihat melalui capaian indikator tenaga kerja pada table berikut :

Tabel 2.33
Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Langkat Tahun 2019-2022

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	68,82	69,92	69,12	71,51
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	n/a	14	11,11	11,11
3	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	n/a	56	24,7	24,7
4	Cakupan pembaruan informasi pasar kerja online	n/a	100	100	100

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK pada Kabupaten Langkat tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan

dengan tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah angkatan kerja kabupaten Langkat tahun 2022 sementara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas semakin meningkat. Pada proporsi penduduk yang Bukan Angkatan Kerja, terjadi penurunan jumlah bukan Angkatan. Pada Tahun 2021 Bukan Angkatan kerja sebanyak 240.745 orang dan pada tahun 2022 turun menjadi 224.231 orang.

2) **Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian indikator kinerja pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Langkat serta capaian kinerjanya pada tahun 2019 – 2022.

Tabel 2.34
Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Di Kabupaten Langkat Tahun 2019–2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga	80	100	125	125
Cakupan kelompok perempuan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas hidup	9	12	11	11
Cakupan pemberdayaan Lembaga pengarusutamaan gender	18	26	25	25

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan jumlah pendamping kelompok bina keluarga diharapkan sejalan dengan peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Langkat. Dengan meningkatnya kualitas hidup keluarga maka akan semakin menurunkan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga serta kasus kekerasan terhadap anak.

3) **Pangan**

Ketahanan Pangan Merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan baik dari jumlah, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) telah menjadi indikator yang strategis untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah. PPH merupakan instrument sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk baik dari jumlah maupun komposisi pangan. Semakin tinggi skor

PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH pada Kabupaten Langkat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, skor PPH Kabupaten Langkat telah mencapai 89,6. Hal tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya keberagaman konsumsi pangan pada Kabupaten Langkat.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	89,6	86,7	86,9	n/a
2	Volume Ketersediaan Pangan Utama (ton)	333.480	216.872	261.145	214.577

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat

4) Lingkungan Hidup

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Langkat pada Tahun 2019–2022.

Tabel 2-36
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Langkat
Tahun 2019–2022

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	n/a	56,67	52,50	56,67
Indeks Kualitas Udara	53,32	79,85	91,10	91,08
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	n/a	55,49	54,99	54,99
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	65,8	68,68	70,24
Persentase ketaatan/kepatuhan usaha terhadap aspek lingkungan	n/a	82,80	87,50	87,50
Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan konservasi Sumber Daya Alam	1	2	0	0
Cakupan RT perkotaan yang terlayani system pengangkutan sampah	100	86,99	87,49	87,49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Langkat

Secara keseluruhan terjadi peningkatan nilai indeks Kualitas Lingkungan hidup pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan tertinggi berada pada Indeks Kualitas Air. Nilai Indeks Kualitas air pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 indeks kualitas air sebesar 52,50 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 56,67%. Artinya terjadi peningkatan

kualitas air serta menurunnya pencemaran terhadap air di Kabupaten Langkat.

5) **Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sampai dengan tahun 2021 persentase penduduk Kabupaten Langkat yang sudah melakukan perekaman data kependudukan sebanyak 98,02 persen. Angka ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Capaian indikator kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.37
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tahun 2019–2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk yang melakukan perekaman data kependudukan	94,00	97,00	98,02	99,28
Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki kata kelahiran	80	83	88	93,90
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil	n/a	77,4	87,61	95,97

Sumber : Dinas Dukcatpil Kab. Langkat

6) **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mayoritas desa di Kabupaten Langkat masih berada pada status swadaya, hanya terdapat 8 desa yang memiliki status swasembada. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan status desa di Kabupaten Langkat. Berikut data capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan LAKIP Kabupaten Langkat tahun 2019.

Tabel 2.38
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten langkat 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Persentase desa yang mengalami peningkatan status IDM	n/a	n/a	5,00	10,11
Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa	100	100	100	100
Jumlah Bumdes Aktif	70	209	209	209
Jumlah Kerjasama antara desa	0	0	1	1
Cakupan PKK aktif	100	100	100	100
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	130	140	170	170

Sumber : Dinas PMD Kab. Langkat

Tabel 2.39
Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Langkat menurut
Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Indeks Desa Membangun				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
Bahorok	0	15	3	0	0
Sirapit	0	4	6	0	0
Salapian	0	1	15	0	0
Kutambaru	0	0	4	4	0
Sei Bingai	0	0	15	0	0
Kuala	0	2	12	0	0
Selesai	0	5	8	0	0
Binjai	0	0	6	0	0
Stabat	0	2	4	0	0
Wampu	0	0	13	0	0
Batang Serangan	0	1	5	1	0
Sawit Sebrang	0	0	6	0	0
Padang Tualang	0	0	10	1	0
Hinai	0	2	8	2	0
Secanggang	0	0	16	0	0
Tanjung Pura	0	0	18	0	0
Gebang	0	0	10	0	0
Babalan	0	0	4	0	0
Sei Lapan	0	0	8	1	0
Brandan Barat	0	1	2	2	0
Besitang	0	0	6	0	0
Pangkalan Susu	0	0	9	0	0
Pematang Jaya	0	0	8	0	0
Kab. Langkat	0	33	196	11	0

Sumber : Kementerian Desa

Pada tahun 2021 di Kabupaten Langkat masih terdapat 1 Desa sangat tertinggal dan 25 Desa Tertinggal. Namun pada tahun 2022, berdasarkan data Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, sudah tidak ada lagi Desa sangat tertinggal serta Desa Tertinggal berkurang jumlahnya menjadi 11 Desa. Namun belum ada Desa Mandiri di Kabupaten Langkat. Dalam mewujudkan terbentuknya Desa Mandiri perlu peran serta serta intervensi dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan indeks ketahanan ekonomi, ketahanan sosial serta ketahanan lingkungan.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut data capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Langkat.

Tabel 2.40
Indikator Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Rasio akseptor KB	65,6	n/a	87,94	87,94
Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,16	n/a	2,42	2,42
ASFR 15 -19	24,2	n/a	24,7	24,7

Sumber : Dinas KB PP dan PPA

Angka ASFR 15-19 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2021. Begitupun dengan rasio akseptor KB yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 Rasio akseptor KB sebesar 87,94%. Artinya sebanyak 87,94 pasangan yang mengikuti program KB. Peningkatan rasio akseptor KB mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dalam membatasi kelahiran.

8) Perhubungan

Capaian kinerja Perhubungan Kabupaten Langkat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.41
Indikator Perhubungan 2019 – 2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Jumlah rambu, marka, pagar, pengaman jalan	500	500	500	500
Jumlah armada bus sekolah	2	2	2	2
Jumlah halte bus/taxi Gedung terminal	10	10	10	10
Jumlah titik rawan kemacetan	20	10	10	10
Jumlah terminal sesuai standar	0	1	1	1
Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	30	n/a	29	29
Ruas jalan yang dilayani penerangan jalan umum	n/a	n/a	726	726

Sumber : Dinas Perhubungan



9) Komunikasi dan Informatika

Capaian indikator Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.42
Indikator Komunikasi dan Informatika 2019 – 2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Persentase tindak lanjut laporan masyarakat	100	100	100	100
Cakupan kegiatan pemerintahan yang terpublikasi di tingkat kecamatan	100	100	100	100
Cakupan kegiatan pemerintahan yang terpublikasi di media massa	100	100	100	100
Cakupan integrasi system aplikasi pemerintahan dan layanan public	n/a	75	77	77
Persentase SDM pemerintahan dengan kompetensi TIK	n/a	4	6	6

10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Langkat sampai tahun 2022 tidak mengalami peningkatan. Ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki, yaitu Kecamatan Sirapit, Kutambaru, Batang Serangan dan Sawit Seberang

Tabel 2.43
Jumlah Koperasi Tahun 2019-2022

Kecamatan	Banyaknya Koperasi			2022
	2019	2020	2021	
Bahorok	2	2	2	2
Sirapit	-	-	-	-
Salapian	3	3	3	3
Kutambaru	-	-	-	-
Sei Bingai	3	3	3	3
Kuala	1	1	1	1
Selesai	2	2	2	2
Binjai	1	1	1	1
Stabat	2	2	2	2
Wampu	1	1	1	1
Batang serangan	-	-	-	-
Sawit seberang	-	-	-	-
Padang tualang	5	5	5	5
Hinai	2	2	2	2
Secanggang	4	4	4	4
Tanjung pura	4	4	4	4
Gebang	1	1	1	1
Babalan	1	1	1	1
Sei Lengan	3	3	3	3



Kecamatan	Banyaknya Koperasi			2022
	2019	2020	2021	
Brandan Barat	1	1	1	1
Besitang	3	3	3	3
Pangkalan Susu	4	4	4	4
Pematang Jaya	1	1	1	1
Kabupaten Langkat	44	44	44	44

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

Capaian indikator kinerja Koperasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.44
Indikator Koperasi Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Cakupan Koperasi aktif	41	41,66	41,56	42
Jumlah fasilitas wirausaha baru oleh mitra badan usaha	0	30	0	0
Jumlah pertumbuhan kebaruan produk UMKM	0	60	15	15
Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala bisnis	0	7	5	5

11) Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Langkat memiliki Prestasi olah raga baik di tingkat provinsi maupun nasional meningkat pada tahun 2019 – 2022. Namun, prestasi cabang olah raga pada tingkat nasional mengalami penurunan.

Tabel 2.45
Indikator Pemuda dan Olah Raga Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Jumlah prestasi pemuda dalam cabang olahraga (medali)				
- Provinsi	83	99	64	0
- Nasional	15	35	29	190
- Internasional	10	12	8	97
Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi pemuda	60	60	62	65
Jumlah wirausaha muda yang dibina	28	50	45	60
Jumlah sarana dan prasarana olahraga	408	416	417	425
Persentase pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah (SMA/SMK)	3	3	5	5

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

12) Penanaman Modal

Capaian indikator Penanaman Modal dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.46
Indikator Penanaman Modal Tahun 2019 – 2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Dokumen regulasi investasi	0	0	0	1
Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)	5,1	8,86	4,9T	2,5T
Cakupan system informasi investasi daerah	100	100	100	100
Rata-rata waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	15	12	12	10

Sumber : Dinas PMP2TSP

Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini disebabkan belum maksimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaannya pasca terjadinya virus covid 19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian. Meskipun pertumbuhan ekonomi sudah mengalami tumbuh positif pada tahun 2022, namun iklim investasi masih belum berjalan dengan normal. Perlu disusun regulasi tentang penyederhanaan birokrasi dalam berinvestasi sehingga dapat memperbaiki iklim investasi serta memberi kepastian hukum bagi investor dan dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Untuk itu, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Langkat membuat Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah dalam rangka peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

13) Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penambahan koleksi buku bacaan juga dilakukan oleh Dinas kearsipan dan perpustakaan pada setiap tahunnya. Dalam rangka peningkatan pelayanan pada masa pandemi, juga telah disediakan buku bacaan digital yang jumlahnya akan terus ditambah setiap tahunnya. Indikator kearsipan dan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Indikator perpustakaan dan kearsipan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Peningkatan jumlah koleksi bahan Pustaka	380	2.880	1.845	1.321
Jumlah pengunjung perpustakaan	14.842	1.593	1.845	7.193
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	n/a	10	44	44
Dokumen/arsip daerah yang dapat diselamatkan	n/a	11	10	20

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan

B. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Langkat memiliki potensi hasil laut yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, dikarenakan letaknya yang memiliki perairan. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan selama tahun 2019-2022. Pada masa pandemic covid-19 yang menyerang berbagai sector, namun sector produksi perikanan Kabupaten Langkat tidak terdampak. Indikator perikanan dan kelautan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Indikator Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2022

Produksi Ikan	2019	2020	2021	2022
Perikanan Tangkap (Ton)	33.137,69	33.139,89	33.634,69	34.069,40
Perikanan Budidaya(Ton)	26.721,31	24.959,45	29.117,98	30.252,28
Cakupan bina kelompok nelayan	5	5	5	5
Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	401,89	447,29	488,50	477,30

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Langkat

2) Pariwisata

Terkait objek wisata, di daerah Kabupaten Langkat terdapat Taman Wisata Bukit Lawang sebagai objek wisata, Taman Bukit Lawang ini terletak di kaki Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan udara sejuk oleh hujan tropis, di Bukit Lawang ini terdapat lokasi rehabilitasi Orang Utan (Mawas) yang dikelola oleh WNF. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan aset nasional dan terdapat berbagai satwa yang dilindungi di dalamnya, seperti : Badak Sumatera, Rusa, Kijang, Burung Kuau, Siamang.

Di taman nasional ini juga terdapat tidak kurang dari 320 jenis burung, 176 binatang menyusui, 194 binatang melata, 52 jenis amfibi dan 3.500 jenis spesies tumbuh-tumbuhan serta yang paling menarik adalah Bunga Raflesia yang terbesar di dunia. Indikator Pariwisata dan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Langkat Tahun 2019–2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama tinggal	2	1	2	2
Jumlah desa wisata	0	0	9	25
Jumlah Kamar (akomodasi)	n/a	n/a	766	803
Jumlah kunjungan wisatawan	100.104	109.304	35.658	76.514
Sistem informasi kepariwisataan	1	1	2	4
Jumlah tenaga kerja pariwisata	n/a	n/a	1.041	1.071
Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi atau dikembangkan	0	0	5	20
Cagar budaya yang ditetapkan atau dikelola	3	3	3	10

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

3) Pertanian

Peningkatan produksi tanaman pertanian merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Produksi tanaman pangan Kabupaten Langkat khususnya padi mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan luas lahan sawah Kabupaten Langkat yang beralih fungsi menjadi tanaman perkebunan. Indikator pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Indikator pertanian Tahun 2019–2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Produksi komoditas tanaman pangan	792.721	524.438	464.852	497.773
Jumlah komoditas hortikultura	95.476	39.796	93.037	49.394
Produksi komoditas perkebunan	795.635	108.887	838.416	845.855
Produks daging	8.487	11.250	9.380	8.896
Produksi telur	10.577	17.850	15.195	14.624
Populasi ternak sapi	201.193	218.300	233.484	228.317
Produksi Ternak ayam buras	1.324.604	1.343.560	1.364.342	1.409.562

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

4) Perdagangan

Cakupan indikator perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.51
Indikator Perdagangan Tahun 2019–2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	15	0	1	1
Jumlah pasar desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	0	0	0	0
Persentase pemasaran produk dalam negeri	n/a	10	10	10

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5) Perindustrian

Capaian indikator perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.52
Indikator Perindustrian Tahun 2019–2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengembangan sentra industri	1	1	2	1
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK (%)	13,99	13,84	13,73	15,47
3	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	2,88	-1,93	2,26	2,05

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

C. URUSAN PENUNJANG

1) Perencanaan pembangunan

Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2022 adalah tersedianya dokumen RKPD dan Dokumen PRKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Kabupaten Langkat senantiasa menjaga konsistensi kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dicapai. Sementara konsistensi RKPD kedalam APBD sudah sesuai karena pada tahun 2022 Seluruh pemerintah daerah se Indonesia sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sehingga apa yang ada dalam RKPD itu yang muncul pada APBD. Capaian indikator perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.53
Indikator Perencanaan Pembangunan Tahun 2019–2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100
Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100
Sistem database pembangunan yang terbaru	n/a	100	100	100
Persentase cakupan aspirasi musrenbang Kabupaten dalam e-musrenbang	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kab. Langkat

2) Keuangan

Kabupaten Langkat berkomitmen untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras pemerintah Kabupaten Langkat membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2019 dan 2020. Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen memenuhi alokasi proporsi anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat, seperti alokasi anggaran untuk Pendidikan sebesar 20% dan Kesehatan 10%. Capaian indikator keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Indikator Keuangan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Persentase perangkat daerah yang dokumen keuangannya selesai tepat waktu	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang laporan asset/barang daerahnya diterbitkan tepat waktu	100	100	100	100

Sumber : BPKAD Kab. Langkat

3) Pendapatan

Capaian Indikator pendapatan Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Indikator Pendapatan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Persentase piutang pajak dan retribusi yang terselesaikan	-	1,07	6,04	6,04
Persentase realisasi pajak dan retribusi	-	101,03	101,83	116,12

Sumber : Bapenda Kab. Langkat

Persentase realisasi pajak dan rertribusi daerah (PAD) Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4) Kepegawaian

Capaian indikator kinerja kepegawaian Kabupaten Langkat pada tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56
Indikator Kepegawaian Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akurat	n/a	21	21	21
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim per tahun	n/a	2	10	15

Sumber : BKD Kab. Langkat

5) Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator penelitian dan pengembangan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	0	0	0	2
Persentase implementasi rencana kelitbangan	0	0	0	0

Sumber : Bappeda Kab. Langkat

6) Pengawasan

Capaian indikator pengawasan tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Indikator Pengawasan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	3	3
Persentase peningkatan kompetensi penjenjangan APIP	10	9,18	n/a	n/a
Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan (keuangan negara/daerah dan administrasi)	78,4	83,0	78	78

D. URUSAN PENDUKUNG

1) Sekretariat Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Langkat berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Koordinasi dan harmonisasi antara unsur legislative dan eksekutif dalam penyusunan program-program pembangunan terus ditingkatkan dalam mencapai Langkat yang lebih maju dan lebih baik. Capaian indikator sekretariat Dewan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja Pembangunan	2019	2020	2021	2022
Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	100	100	100	100
Cakupan kegiatan DPRD yang terpublikasi	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Dewan

2) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekerataris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

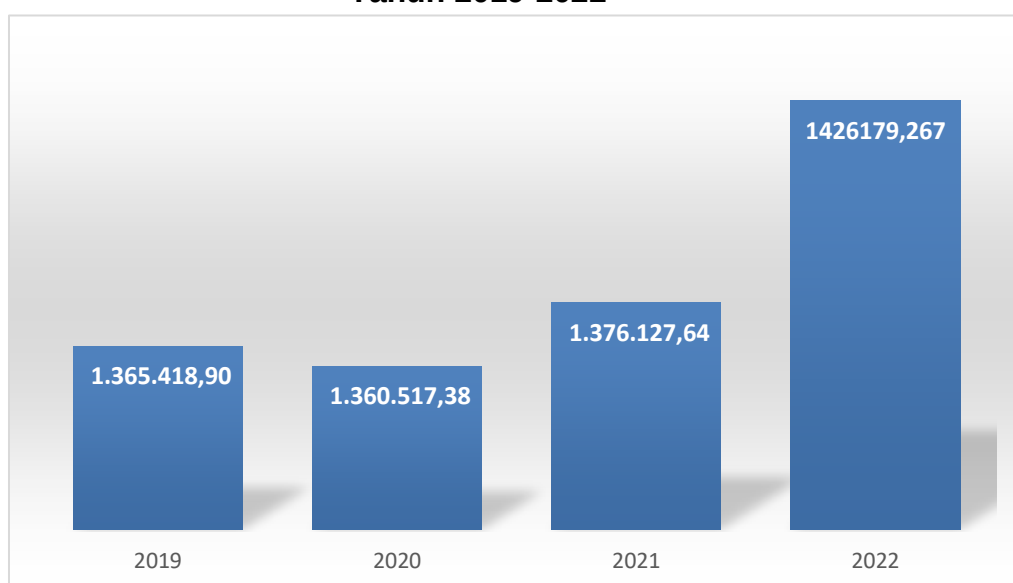
1) Pengeluaran Konsusmi Perkapita

Analisis kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Salah satu pendekatan di dalam pemetaan pendapatan masyarakat adalah melalui pendekatan pengeluaran, dengan asumsi besaran antara pendapatan dan pengeluaran berbanding lurus, yang artinya semakin besar pendapatan seseorang maka pengeluarannya pun akan semakin besar. Rata-rata pengeluaran penduduk untuk konsumsi Kabupaten Langkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.376.127,64 perkapita/bulan yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.3543.840,00 perkapita/bulan.

Peningkatan konsumsi rumah tangga perkapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat. Namun peningkatan konsumsi ini perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah kebawah (kelompok miskin) sehingga ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat tidak semakin lebar.

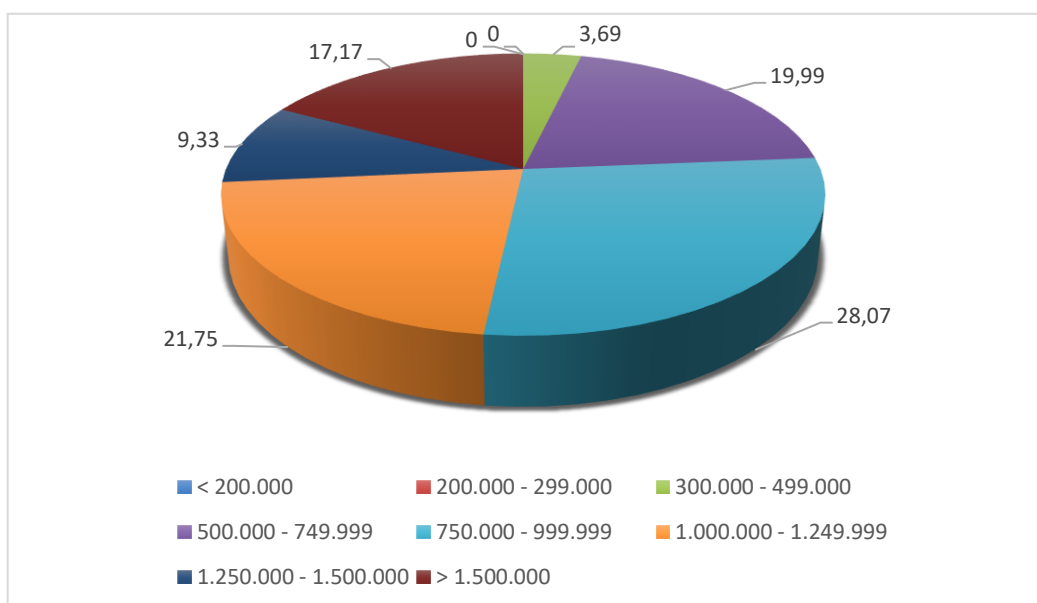
Grafik 2.
Konsumsi Rumah Tangga (rupiah/kapita/bulan)
Tahun 2019-2022



Sumber : BPS Langkat

Pada tahun 2022, pengeluaran perkapita penduduk perbulan terbesar adalah antara Rp. 750.000 – 999.999 (28,07%), antara Rp. 1000.000,- sampai dengan Rp.999.999,- yaitu sebesar 46,55 persen. Sedangkan yang terendah adalah golongan pengeluaran dengan besaran Rp. 200.000,- sampai dengan Rp.499.999,- yaitu sebesar 4,17 persen. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.
Persentase pengeluaran perkapita sebulan menurut golongan



pengeluaran Tahun 2022

Sumber : BPS Langkat

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi merupakan suatu prasyarat penting dalam memajukan perekonomian Kabupaten Langkat. Beberapa yang perlu menjadi pertimbangan yaitu dari tingkat kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, peraturan yang mendukung iklim berinvestasi, jenis dan macam perpajakan dan kondisi swasembada desa.

1) Tingkat Kriminalitas

Pada tahun 2022 angka kriminalitas/peristiwa kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Langkat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan, namun guna meningkatkan

kenyamanan dan keamanan lingkungan, perlu dilakukan upaya preventif maupun kuratif terhadap kejadian kriminalitas. Penyalahgunaan narkoba merupakan peristiwa kejahatan tertinggi sepanjang tahun 2020-2022 dibandingkan peristiwa kejahatan lainnya. Hal ini menjadi tugas berat pemerintah dalam memerangi narkoba terutama di kalangan remaja. Oleh karenanya pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah mulai menerapkan strategi terpadu dalam pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, antara lain dengan pembentukan Kampung Bersih Narkoba (Kampung Bersinar), membina organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Penguatan peningkatan keharmonisan keluarga juga menjadi salah satu poin penting dalam menurunkan penyalahgunaan penggunaan narkoba.

Tabel 2.60
Peristiwa kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Pembakaran/Kebakaran	1	7	5
2	Pemalsuan	15	5	8
3	Melanggar kesopanan	1	0	0
4	Pemeriksaan	4	4	4
5	Perjudian	51	37	43
6	Penganiayaan	206	219	192
7	Pencurian	87	60	47
8	Pemerasan	4	12	4
9	Penggelapan	105	94	103
10	Penipuan	56	51	71
11	Merusak barang orang	20	28	31
12	Penadahan	0	5	2
13	Pembunuhan	4	7	1
14	Narkoba	503	523	374
15	Pencurian kendaraan bermotor	64	56	73
16	Penculikan	0	2	2
17	Penghinaan	9	13	14
18	Lainnya	665	520	664
	JUMLAH	1.795	1.643	1.638

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

2) Jumlah dan Macam Pajak dan retribusi Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Kabupaten Langkat terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Tabel 2.61
Indikator pendapatan daerah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah/Macam Pajak daerah	12	12	12	12
2	Jumlah/macam retribusi daerah	15	15	15	15
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan	8,33	7,96	6,99	6,35

Fokus Sumber Daya Manusia

1) Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Langkat. Berdasarkan data kependudukan tahun 2022, penduduk usia kerja di Kabupaten Langkat tertinggi memiliki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yaitu sebesar 190.527 orang. Dan angkata kerja yang terendah adalah pada jenjang Pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 11.212 orang. Data penduduk usia 15 tahun keatas menurut Pendidikan tertinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2022

No	Pendidikan Tertinggi	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja
1	SD	194.289	10.021	204.310	95,10
2	SMP	118.193	9.164	127.357	92,80
3	SMA	105.956	10.973	116.929	90,62
4	SMK	69.151	6.156	75.307	91,83
5	Diploma I/II/III	7.313	-	7.313	100,00
6	Strata I/II/III	29.275	2.392	31.667	92,45

Sumber : BPS Langkat

2) Penduduk yang Bekerja Menurut Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaannya utamanya, pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Langkat bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 195.513 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 10.714 orang dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 184.799 atau meningkat



5,80 persen. Sedangkan status pekerjaan utama yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar yaitu sebesar 47,25 persen dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu sebesar 11,72 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Tahun 2022, penduduk yang bekerja di sector formal sebanyak 217.554 orang dan di sector informal sebanyak 306.623 orang.

3) Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data penduduk tahun 2022, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk total adalah sebesar 43,85, artinya setiap 100 penduduk usia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak lebih kurang 44 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar lebih kurang 44 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 36 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8. Rasio ketergantungan ini termasuk tinggi terutama untuk penduduk muda. Namun hal ini bisa menjadi bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Langkat dimasa yang akan datang. Namun penambahan penduduk usia kerja selain menjadi bonus demografi membawa konsekuensi dalam penyediaan lapangan pekerjaan, menumbuhkan jiwa wirausaha serta fasilitasi pengembangan usaha.

Standar Pelayanan Minimal

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat,



dan SPM Bidang Sosial. Capaian Keenam SPM tersebut pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Langkat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1.	Pendidikan			
a.	Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD usia 3-6 tahun	96,60	97,41
b.	Pendidikan Dasar	APK SD/MI Sederajat	110,20	106,38
		APK SMP/MTs Sederajat	99,31	97,45
		APM SD/MI Sederajat	118,94	94,99
		APM SMP/MTs Sederajat	85,95	80,89
2.	Kesehatan			
a.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil/Bersalin	% persalinan di Fasilitas Kesehatan	95	94,05
		Jumlah Kematian Ibu	9	8
b.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah kematian Bayi	45	16
c.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kematian balita	0	0
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	11,5	15,5
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	20,2	18,6
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	12	9,2
d.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC dan HIV	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	100%	100%
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Perpipa	11%	15%



b.	Penyediaan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sistem Layanan Air Limbah & Sanitasi	92%	93%
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
a.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Tidak Layak Huni	11,2%	n/a
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
a.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (penegakan perkara)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%
b.	Pelayanan penyelemaan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	15 menit	15 menit
c.	Pelayanan informasi rawan bencana	Prosentase ketersediaan data dan informasi kebencanaan	100%	100%
d.	Pelayanan penyelemaan dan evakuasi korban bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%
6.	Sosial			
a.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berdayaguna	27%	19%
b.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Anak Terlantar yang dibina	50%	35%
c.	Perlindungan dan jaminasn sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%



Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten Langkat sampai dengan Tahun 2022

Kinerja Pembangunan Kabupaten Langkat diukur dari realisasi ketercapaian indikator program Pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja PRPJMD di tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dari capaian Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.5.1 Evaluasi Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Langkat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
- Tingkat Kemiskinan,
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
- Rasio Gini

Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.





Tabel 2.64
Capaian Indikator Makro Kabupaten Langkat 2020-2022

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,1	-0,86	1,03	3,08	2,12	4,69	tercapai
2	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	70,27	70,5	71	72,8	71,35	72,8	71,86	belum tercapai
3	Persentase Kemiskinan	%	10,2	9,8	9,73	9,72	10,13	9,56	9,49	tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,67	4,5	7,02	6,56	5,12	6,09	6,88	belum tercapai
5	Indeks Gini	nilai	0,25	0,24	0,238	0,238	0,238	0,233	0,26	belum tercapai



2.5.2 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Langkat

Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Langkat menggambarkan capaian kinerja yang ingin dicapai Kepala Daerah pada periode tertentu. Indikator Kinerja Utama Bupati Langkat dalam RPJMD Kabupaten Langkat sebagai berikut :

1. Persentase Desa yang mengalami peningkatan status IDM
2. Indeks Pendidikan
3. Indeks Kesehatan
4. Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
5. Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB
6. Persentase jalan dalam kondisi mantap
7. Indeks kesenjangan wilayah
8. Indeks Kualitas lingkungan hidup
9. Indeks reformasi birokrasi



Tabel 2.65
Capaian Indikator Makro Kabupaten Langkat 2020-2022

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Desa yang mengalami peningkatan status IDM	%	n/a	n/a	5,83	6,3	5	7	10,8	tercapai
2	Indeks Pendidikan	nilai	0,644	n/a	0,653	0,653	0,656	0,656	0,679	tercapai
3	Indeks Kesehatan	nilai	0,748	n/a	0,754	0,754	0,753	0,758	0,798	tercapai
4	Persentase Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum & Jasa Lainnya.	%	2,34	2,4	2,36	2,36	2,03	2,52	2,16	belum tercapai
5	Persentase Peningkatan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	38,74	n/a	39,72	39,72	40,3	39,87	41,34	belum tercapai
6	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	%	50,11	52	55,43	57,3	58,77	59,2	62,23	tercapai
7	Indeks Kesenjangan Wilayah (Indeks Williamson)	nilai	0,41	0,59	0,415	0,41	0,415	0,38	0,415	belum tercapai
8	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	nilai	n/a	58	65,8	60	68,84	62	70,23	tercapai
9	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	n/a	60 (B0)	C	CC	C	B	CC	belum tercapai

Dari tabel diatas, dan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap capaian indikator kinerja utama disimpulkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Persentase desa yang mengalami peningkatan status IDM Tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 7 persen, telah berhasil mencapai target dengan capaian pada 10,8 persen
- 2) Indeks Pendidikan Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,656, telah berhasil melampaui target dengan capaian 0,679 poin
- 3) Indeks Kesehatan Tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 0,758 poin, telah berhasil melampaui target dengan capaian pada 0,798 poin
- 4) Persentase Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 2,52 persen belum berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 2,16 persen.
- 5) Persentase kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB Tahun 2022 yang diproyeksikan pada 39,87 persen, berhasil mencapai target dengan capaian pada 41,34 persen.
- 6) Persentase jalan dalam kondisi mantap Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 59,20 persen dan telah berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 62,23 persen.
- 7) Indeks Williamson Tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,38 poin dan telah melampaui target dengan capaian sebesar 0,415 poin.
- 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ditargetkan 62,00 poin dan telah melampaui target dengan capaian sebesar 70,23 poin.
- 9) Indeks Reformasi birokrasi Tahun 2022 ditargetkan dengan nilai B, belum melampaui target dengan capaian dengan nilai CC.



BAB III

KERANGKA KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian penggunaan keuangan daerah pada tahun sebelumnya dan memperoleh proyeksi yang tepat untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai program-program dalam rencana pembangunan daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan dan stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah sehingga memberikan multiplier effect yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat yang lebih meluas dan merata. Acuan yang mendasari pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; yang bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.



Rencana pendanaan pada RPD ini menjadi dasar dalam penetapan kerangka pendanaan untuk pembangunan tahunan baik dalam Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Renja SKPD. Dalam konteks visualisasi dan aktualisasi perubahan yang diinginkan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
5. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat



dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat selama periode tahun 2019 hingga tahun 2022. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis terhadap kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangannya. Selain itu, kondisi keuangan masa lalu dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proyeksi yang tepat, sehingga diketahui seberapa besar kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Langkat dalam kurun waktu Tahun 2019-2022 dapat diukur dari perkembangan APBD Kab. Langkat Tahun 2019-2022. Berdasarkan data realisasi anggaran Kab. Langkat Tahun 2019-2022 diperoleh bahwa trend realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah semakin meningkat setiap tahun hingga tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Langkat didominasi oleh peningkatan Dana Transfer dengan proporsi terbesar berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dilihat dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah PAD Kab. Langkat fluktuatif dan cenderung meningkat dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Kinerja belanja daerah Kab. Langkat Tahun 2019-2022 didominasi oleh Belanja Operasi terutama belanja pegawai (44,14%), belanja barang dan jasa (21,74%) serta Belanja Modal



(14,94%). Komponen belanja pegawai masih menempati proporsi belanja terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Langkat. Hal ini mengindikasikan alokasi belanja program Pembangunan di Kabupaten Langkat masih rendah.

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

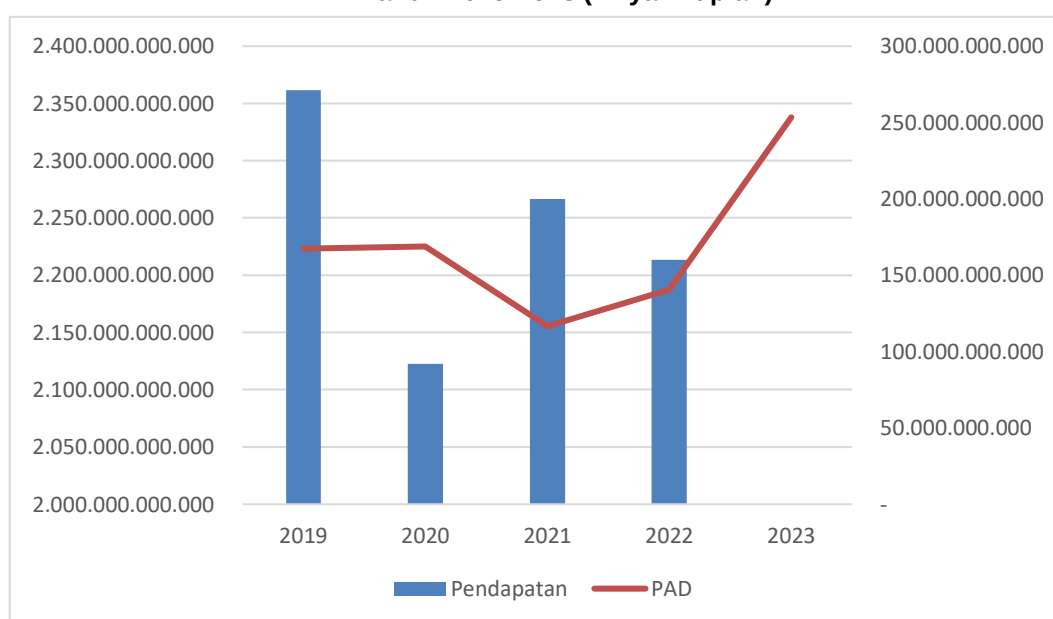


Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PENDAPATAN	2.361.512.739.444,63	2.122.684.872.331,88	2.266.625.881.854,64	2.213.563.402.095,09	2.371.226.843.848,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.523.076.879,63	168.843.723.199,88	116.599.098.496,64	140.628.891.267,09	253.393.415.220,00
4.1.01	Pajak Daerah	76.128.182.957,00	71.908.157.019,00	73.316.017.857,00	89.933.504.202,00	204.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	29.149.528.528,00	26.019.401.720,00	6.009.391.145,00	7.280.376.938,00	8.895.415.220,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.307.629.896,00	8.730.147.444,00	6.017.927.136,00	9.140.559.933,00	9.950.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.937.735.498,63	62.186.017.016,88	31.255.762.458,64	34.274.450.194,09	30.448.000.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.732.852.882.496,00	1.831.944.449.132,00	2.108.144.962.082,00	2.035.341.678.524,00	2.075.741.341.085,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.732.852.882.496,00	1.746.551.023.606,00	2.005.248.094.916,00	1.925.110.810.970,00	1.933.964.774.181,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	149.951.496.471,00	119.267.021.587	264.822.395.506,00	192.301.420.447,00	109.261.217.000,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.229.427.123.000,00	1.099.658.531.000	1.081.981.083.000,00	1.079.963.986.734,00	1.080.927.994.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	353.474.263.025,00	319.005.886.019	331.760.173.161,00	437.848.670.409,00	427.150.128.181,00
4.2.01.05	Dana Desa	0	208.619.585.000,00	212.579.084.649,00	214.996.733.380,00	236.620.647.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	72.886.818.526,00	102.896.867.167,00	110.230.867.554,00	141.776.566.904,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	461.136.780.069,00	121.896.700.000,00	37.592.832.304,00	41.881.821.175,00	42.092087.543,00

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Langkat menunjukkan peningkatan yang bervariasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,40% per tahun. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2023, dimana terjadi kenaikan target pendapatan yang meningkat 17% dibanding realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPKAD Kab. Langkat 2019-2023

Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah masih mengalami kenaikan sejak tahun 2019-2023 walaupun walaupun persentase kenaikan tidak begitu signifikan namun Dana Transfer pemerintah pusat tetap menjadi penyumbang terbesar pada proporsi belanja daerah Kabupaten Langkat. Kontribusi dana transfer terbesar masih berasal dari Adana Alokasi Umum. Namun, proporsi Dana Alokasi Umum mengalami penurunan setiap tahunnya. kontribusi PAD rata-rata 7,45%. Kontribusi PAD terbesar terjadi pada tahun anggaran 2023 yang mencapai 10,69%.

Tabel 3-2
Komposisi Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata (%)
1.	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,09	7,95	5,14	6,35	10,69	7,45
1.1.1	Pajak Daerah	3,22	3,39	3,23	4,06	8,60	4,5
1.1.2	Retribusi Daerah	1,23	1,23	0,27	0,33	0,38	0,69
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,27	0,41	0,27	0,41	0,42	0,36
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli	2,37	2,93	1,38	1,55	1,28	1,90
1.2.2	Pendapatan Transfer	73,38	86,30	93,01	91,95	87,54	86,44
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	73,38	82,28	88,47	86,97	81,56	82,53
1.2.4	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	6,35	5,62	11,68	8,69	4,61	7,39
1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	52,06	51,81	47,74	48,78	45,59	49,20
1.3.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	14,97	15,03	14,64	19,78	18,01	16,49
1.3.2	Dana Desa	0	9,83	9,38	9,71	9,98	7,78
1.3.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	3,43	4,54	4,98	5,98	3,79
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	19,53	5,74	1,66	1,89	1,78	6,12

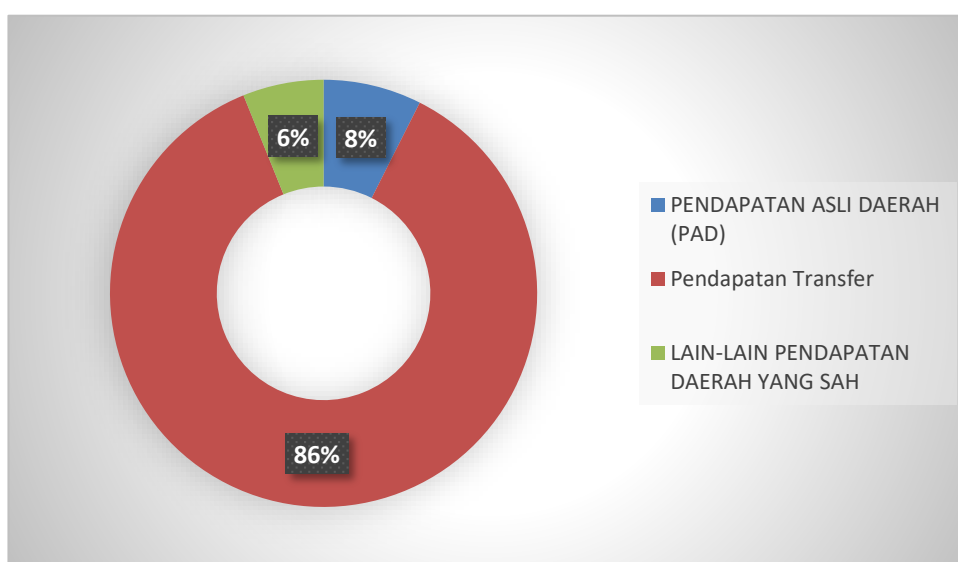
Sumber : BPKAD Kab. Langkat

Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2019 hingga 2023, angka pertumbuhannya cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 17,66%. Namun kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari Pajak Daerah bertumbuh rata-rata sebesar 36,47%/tahun dan Retribusi Daerah hanya bertumbuh rata-rata minus 22,15%/tahun. Nilai ini masih tergolong relatif kecil, diperlukan adanya upaya yang lebih kongkrit agar PAD meningkat secara wajar dan proporsional, agar Kabupaten Langkat mampu mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Secara umum besarnya realisasi Dana Perimbangan antara tahun 2019-2023 cenderung meningkat setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,66% pertahun. Pendapatan dari DAK dan DBH Pajak/bukan pajak antara tahun 2019-2023 fluktuatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 11,89% dan 15,51%. Khusus

untuk DAK pendapatan ini besaran penerimaannya tergantung dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sehingga dapat dipahami bila pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Langkat terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya dan Dana Desa. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Langkat rata-rata mencapai 6,12% pada tahun 2019-2023.

Gambar 3.2
Rata-Rata Proporsi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber
Tahun 2019-2023



B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan sebuah kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja daerah berkaitan dengan pendapatan daerah yang dapat diserap oleh suatu daerah. Sumber-sumber keuangan yang



menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Komponen Belanja Daerah ialah terdiri atas:

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer



Tabel 3-3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5.	BELANJA	2.224.061.799.668,00	2.182.612.411.902,00	2.166.967.560.816,95	2.265.521.092.187,00	2.607.746.317.588,00
5.1	Belanja Operasi	1.535.165.052.450,00	1.516.844.193.455,00	1.539.110.261.048,02	1.579.488.241.699,00	1.820.916.682.022,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.079.112.528.480,00	1.159.841.791.306,00	1.085.321.192.034,00	1.057.128.787.422,00	1.151.084.531.319,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	427.655.521.970,00	328.146.210.827,00	421.447.022.318,02	463.112.799.411,00	567.032.271.728,00
5.1.3	Belanja Hibah	17.594.952.000,00	18.760.891.322,00	21.271.156.288,00	47.385.554.866,00	90.917.178.975,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	10.802.050.000,00	10.095.300.000,00	11.070.890.408,00	11.861.100.000,00	11.882.700.000,00
5.2	Belanja Modal	346.035.9756.277,00	295.574.159.089,00	279.596.218.684,93	330.625.986.589,00	389.718.856.871,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	35.497.167.015,00	5.914.458.400,00	12.262.455.084,00	24.419.398.673,00
5.4	Belanja Transfer	342.860.770.941,00	334.696.892.342,00	342.346.622.684,00	343.144.408.815,00	372.691.380.022,00

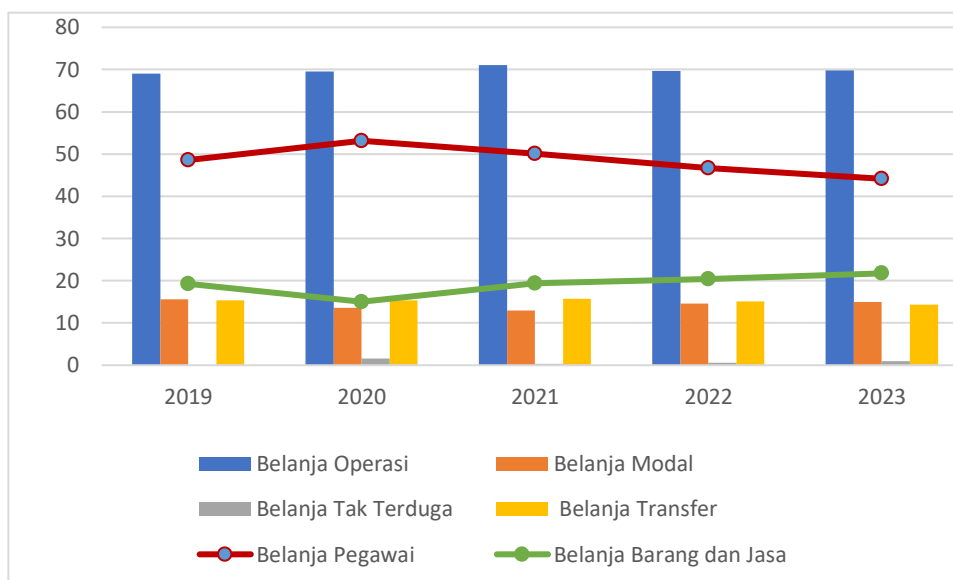
Pada tahun 2022, anggaran belanja Kabupaten Langkat mencapai Rp. 2.265.521.092.187,00. Besaran realisasi belanja ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 5,58% per tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan namun proporsi masing-masing pos belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2022 proporsi pegawai mencapai 46,66%. Proporsi Belanja Pegawai merupakan yang belanja terbesar dalam struktur APBD Langkat. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan, serta dengan tingginya proporsi tersebut berakibat mengurangi besaran belanja langsung secara signifikan. Dari Tabel 3-5 dan Gambar 3.2 tergambar bahwa proporsi realisasi Belanja Pegawai dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Namun terjadi kenaikan anggaran belanja pegawai pada tahun 2023 dikarenakan adanya alokasi belanja gaji P3K.

Tabel 3-4
Komposisi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Rata-rata (%)
5.	BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1	Belanja Operasi	69,03	69,50	71,03	69,72	69,83	69,82
5.1.1	Belanja Pegawai	48,52	53,14	50,08	46,66	44,14	48,51
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,23	15,03	19,45	20,44	21,74	19,18
5.1.3	Belanja Hibah	0,79	0,86	0,98	2,09	3,49	1,64
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,49	0,46	0,51	0,52	0,46	0,49
5.2	Belanja Modal	15,56	13,54	12,90	14,59	14,94	14,31
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	1,63	0,27	0,54	0,94	0,84
5.4	Belanja Transfer	15,42	15,33	15,80	15,15	14,29	15,20

Sumber : BPKAD Kab. Langkat 20219-2023

Gambar 3.3
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-20223



Sumber : BPKAD Kab. Langkat

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi keuangan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran. Ditinjau berdasarkan komponennya, pembiayaan daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang;

Realisasi pembiayaan Kabupaten Langkat Tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan terbesar berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Peningkatan



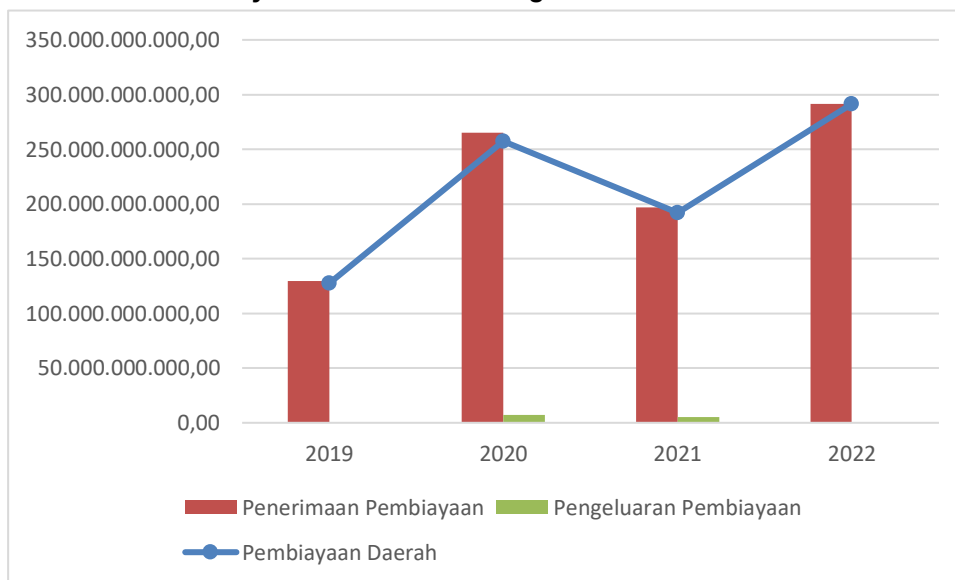
penggunaan SiLPA merupakan akibat dari alokasi anggaran pada program/kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan dan/atau alokasi anggaran yang tidak diserap. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara optimal.

Tabel 3-5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2022 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	PEMBIAYAN DAERAH	127.487.984.419,27	257.575.963.312,36	191.818.842.974,49	291.477.163.832,18
1.	Penerimaan Pembiayaan	129.610.314.419,37	264.938.924.196,36	197.035.973.844,49	291.477.163.832,18
1.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.610.314.419,37	264.938.924.196,36	197.035.973.844,49	291.477.163.832,18
1.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	2. 122.330.000,00	7.362.960.884,00	5.217.131.050,00	0,00
1.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	7.362.960.884,00	5.217.131.050,00	0,00
1.2.2	Pembayaran Pokok Utang	122.330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	129.610.314.419,37	272.301.885.080,36	191.818.842.794,49	291.477.163.832,18

Sumber : BPKAD Kab. Langkat

Gambar 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Langkat Tahun 2019-2022



Sumber : BPKAD Daerah Kab. Langkat 2019-2022



Tabel 3-6
Rata-Rata Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
	PENDAPATAN	2.361.512.739.444,63	2.122.684.872.331,88	2.266.625.881.854,64	2.213.563.402.095,09	2.371.226.843.848,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.523.076.879,63	168.843.723.199,88	116.599.098.496,64	140.628.891.267,09	253.393.415.220,00
	Pajak Daerah	76.128.182.957,00	71.908.157.019,00	73.316.017.857,00	89.933.504.202,00	204.000.000.000,00
	Retribusi Daerah	29.149.528.528,00	26.019.401.720,00	6.009.391.145,00	7.280.376.938,00	8.895.415.220,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.307.629.896,00	8.730.147.444,00	6.017.927.136,00	9.140.559.933,00	9.950.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.937.735.498,63	62.186.017.016,88	31.255.762.458,64	34.274.450.194,09	30.448.000.000,00
	Pendapatan Transfer	1.732.852.882.496,00	1.831.944.449.132,00	2.108.144.962.082,00	2.035.341.678.524,00	2.075.741.341.085,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.732.852.882.496,00	1.746.551.023.606,00	2.005.248.094.916,00	1.925.110.810.970,00	1.933.964.774.181,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	149.951.496.471,00	119.267.021.587	264.822.395.506,00	192.301.420.447,00	109.261.217.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.229.427.123.000,00	1.099.658.531.000	1.081.981.083.000,00	1.079.963.986.734,00	1.080.927.994.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	353.474.263.025,00	319.005.886.019	331.760.173.161,00	437.848.670.409,00	427.150.128.181,00
	Dana Desa	0	208.619.585.000,00	212.579.084.649,00	214.996.733.380,00	236.620.647.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	72.886.818.526,00	102.896.867.167,00	110.230.867.554,00	141.776.566.904,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	461.136.780.069,00	121.896.700.000,00	37.592.832.304,00	41.881.821.175,00	42.092087.543,00
	BELANJA	2.224.061.799.668,00	2.182.612.411.902,00	2.166.967.560.816,95	2.265.521.092.187,00	2.607.746.317.588,00
	Belanja Operasi	1.535.165.052.450,00	1.516.844.193.455,00	1.539.110.261.048,02	1.579.488.241.699,00	1.820.916.682.022,00
	Belanja Pegawai	1.079.112.528.480,00	1.159.841.791.306,00	1.085.321.192.034,00	1.057.128.787.422,00	1.151.084.531.319,00
	Belanja Barang dan Jasa	427.655.521.970,00	328.146.210.827,00	421.447.022.318,02	463.112.799.411,00	567.032.271.728,00
	Belanja Hibah	17.594.952.000,00	18.760.891.322,00	21.271.156.288,00	47.385.554.866,00	90.917.178.975,00
	Belanja Bantuan Sosial	10.802.050.000,00	10.095.300.000,00	11.070.890.408,00	11.861.100.000,00	11.882.700.000,00
	Belanja Modal	346.035.9756.277,00	295.574.159.089,00	279.596.218.684,93	330.625.986.589,00	389.718.856.871,00
	Belanja Tidak Terduga	0,00	35.497.167.015,00	5.914.458.400,00	12.262.455.084,00	24.419.398.673,00
	Belanja Transfer	342.860.770.941,00	334.696.892.342,00	342.346.622.684,00	343.144.408.815,00	372.691.380.022,00

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2025-2026



No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
	PEMBIAYAN DAERAH	127.487.984.419,27	257.575.963.312,36	191.818.842.974,49	291.477.163.832,18	0,00
	Penerimaan Pembiayaan	129.610.314.419,37	264.938.924.196,36	197.035.973.844,49	291.477.163.832,18	0,00
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.610.314.419,37	264.938.924.196,36	197.035.973.844,49	291.477.163.832,18	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	2. 122.330.000,00	7.362.960.884,00	5.217.131.050,00	0,00	3.000.00.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	7.362.960.884,00	5.217.131.050,00	0,00	3.000.000.000,00
	Pembayaran Pokok	122.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	129.610.314.419,37	272.301.885.080,36	191.818.842.794,49	291.477.163.832,18	(3.000.000.000,00)

Sumber : BPKAD Kab. Langkat



3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dengan ditetapkannya otonomi daerah sejak tahun 2001, telah membuka ruang bagi daerah untuk secara otonomi melaksanakan penyelenggaraan daerah, termasuk didalamnya dalam penetapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah apat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam penentuan APBD pengelolaan keuangan daerah antara lain Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 310, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, khususnya pasal 17 dan pasal 18, serta Peraturan Pemerintah Nomo 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya pasal 29 hingga pasal 42. Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2023 dikelompokkan ke dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien serta mendapat dukungan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada sehingga tercapai peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran setiap tahunnya, dengan demikian tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat ditekan menuju pembiayaan mandiri (self-financing).

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023, terdiri dari Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan



menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha usaha untuk memperbesar pendapatan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, tepat dan teliti. Sedangkan Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru namun tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan yang ada. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain:

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Program ini dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Langkat dengan prioritas kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan tersebut lebih dititik beratkan dalam inventarisasi data potensi Pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan koordinasi antar instansi terkait di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dengan data potensi yang akurat dan akurat, diharapkan didapatkan dasar pijakan yang riil (nyata) dalam penetapan target penerimaan daerah, baik dari sektor Pajak daerah maupun dari retribusi daerah.

b. Koordinasi/Sinkronisasi Lintas Sektoral

Program ini dimaksudkan untuk mendukung program pertama dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah.

c. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya



penggalan dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendataan, serta pembangunan di berbagai sektor yang ada di masyarakat.

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua belanja dianggarkan secara bruto dan jumlahnya merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja bersangkutan dan dilaksanakan melalui kas daerah. Belanja daerah dirinci menurut bidang pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Kelompok pembiayaan dirinci menurut jenis objek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah dalam APBD Kabupaten Langkat diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis belanja yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Tanah,



Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya), Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.

Didalam struktur APBD terdapat sisi pembiayaan yang fungsi pokoknya adalah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (surplus dan defisit anggaran). Didalam pos pembiayaan terdapat pos pembiayaan penerimaan dan pos pengeluaran sehingga memungkinkan daerah investasi untuk menggunakan surplus anggaran. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, serta dimaksudkan untuk membiayai selisih kurang bila belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah atau memanfaatkan surplus pendapatan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber penerimaan pembiayaan daerah adalah: (1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (3) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari: (1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; dan (2) Pembayaran Pokok Utang.



3.4 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah atau asumsi, antara lain :

1) Indikator ekonomi makro, mencakup :

- Rata-rata perkembangan inflasi Kabupaten Langkat tahun 2020-2022 ialah sebesar 3,087% per tahun (mengacu Kota Medan sebagai kota terdekat)
- Rata-rata LPE Kabupaten Langkat Tahun 2020-2022 sebesar 2,30% per tahun

2) Kebijakan di bidang keuangan negara

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Langkat tahun 2025-2026 dirumuskan dengan berdasar pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2020-2023, serta mempertimbangan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.



Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Langkat mulai Tahun anggaran 2021 harus menerapkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah yang baru, dikarenakan oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga, terdapat perbedaan penyusunan APBD Tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3.4.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1) Proyeksi Pendapatan Tahun 2025-2026

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.5 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2020-2023, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Peningkatan Dana Perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 3) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meingkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- 5) Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah.
- 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

- 8) Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional

2) Proyeksi Belanja Tahun 2025-2026

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang.



Gambar 3.6 Analisis Proyeksi Belanja Daerah
Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib Mengikat, Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah serta Belanja Pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

- 1) Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Langkat;

- 2) Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
- 3) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
- 4) Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah;
- 5) Melakukan analisis mengenai kesesuaian Program dan Kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat bagi masyarakat.

3) Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 2 (dua) tahun ke depan.



Gambar 3.7 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 3-7
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat pada RPD Tahun 2025-2026

URAIAN	2020	2021	2022	2023	Proyeksi	
					2025	2026
PENDAPATAN	2.122.684.872.331,88	2.262.336.892.882,64	2.217.852.390.966,09	2.371.226.843.848,00	2.691.001.063.303,00	2.806.252.433.376,00
Pendapatan Asli Daerah	168.843.723.199,88	116.599.098.496,64	140.628.891.267,09	253.393.415.220,00	305.564.034.579,00	320.842.226.307,00
Pajak Daerah	71.908.157.019,00	73.316.017.857,00	89.933.504.202,00	204.000.000.000,00	246.840.000.000	259.182.000.000
Retribusi Daerah	26.019.401.720,00	6.009.391.145,00	7.280.376.938,00	8.995.415.220,00	10.389.704.579	10.909.179.807
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.730.147.444,00	6.017.927.136,00	9.140.559.933,00	9.950.000.000,00	11.492.250.000	12.066.862.500
Lain-lain PAD yang sah	62.186.017.016,88	31.255.762.458,64	34.274.450.194,09	30.448.000.000,00	36.842.080.000	38.684.184.000
Pendapatan Transfer	1.831.944.449.132,00	2.108.144.962.082,00	2.035.341.678.524,00	2.075.741.341.085,00	2.341.240.336.804,00	2.441.213.515.149,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.746.551.023.606,00	2.005.248.094.916,00	1.925.110.810.970,00	1.933.964.774.181,00	2.165.427.978.500,00	2.221.448.067.269,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	119.267.021.587	264.822.395.506,00	192.301.420.447,00	109.261.217.000,00	143.529.565.503,00	150.706.043.780,00
Dana Alokasi Umum	1.099.658.531.000	1.081.981.083.000,00	1.079.963.986.734,00	1.160.932.782.000,00	1.291.421.626.697,00	1.304.335.842.963,00
Dana Alokasi Khusus	319.005.886.019	331.760.173.161,00	437.848.670.409,00	427.150.128.181,00	470.194.074.600,00	493.109.333.241,00
Dana Desa	208.619.585.000,00	212.579.084.649,00	214.996.733.380,00	236.620.647.000,00	260.282.711.700,00	273.296.847.285,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	72.886.818.526,00	102.896.867.167,00	110.230.867.554,00	141.776.566.904,00	175.812.358.304,00	219.765.447.880,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	72.886.818.526,00	102.896.867.167,00	110.230.867.554,00	141.776.566.904,00	175.812.358.304,00	219.765.447.880,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	121.896.700.000,00	37.592.832.304,00	41.881.821.175,00	42.092.087.543,00	44.196.691.920,00	44.196.691.920,00
BELANJA	2.138.033.683.337,00	2.166.967.560.816,95	2.265.521.092.187,00	2.607.746.317.588,00	2.688.001.063.303,00	2.803.252.433.376,00
Belanja Operasi	1.516.034.508.431,00	1.539.110.261.048,02	1.579.488.241.699,00	1.820.916.682.022,00	1.894.578.626.963,00	1.932.929.693.269,00
- Belanja Pegawai		1.085.321.192.034,00	1.057.128.787.422,00	1.151.084.531.319,00	1.185.617.067.260,00	1.197.473.237.932,00
- Belanja Barang dan Jasa		421.447.022.318,02	463.112.799.411,00	567.032.271.728,00	606.724.530.748,00	630.719.426.382,00
- Belanja Hibah		21.271.156.288,00	47.385.554.866,00	90.917.178.975,00	89.760.193.955,00	89.760.193.955,00
- Belanja Bantuan Sosial		11.070.890.408,00	11.861.100.000,00	11.882.700.000,00	12.476.835.000,00	14.976.835.000,00
Belanja Modal	250.933.824.227,00	279.596.218.684,93	330.625.986.589,00	389.718.856.871,00	396.311.657.645,00	435.942.823.410,00
Belanja Tak Terduga	35.497.167.015,00	5.914.458.400,00	12.262.455.084,00	24.419.398.673,00	24.419.398.673,00	24.419.398.673,00

Belanja Transfer	335.568.183.664,00	342.346.622.684,00	343.144.408.815,00	372.691.380.022,00	372.691.380.022,00	409.960.518.024,00
PEMBIAYAAN	257.575.963.312,00	191.818.842.794,00	291.477.163.832,00	- 3.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan	264.938.924.196,00	197.035.973.844,00	291.477.163.832,00	0,00	0,00	0,00
SILPA	264.938.924.196,00	197.035.973.844,00	291.477.163.832,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	7.362.960.884,00	5.217.131.050,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Investasi Daerah	7.362.960.884,00	5.217.131.050,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian penting dari dokumen perencanaan karena akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Langkat. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Langkat mendatang

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya. Permasalahan pembangunan ini dapat dilihat berdasarkan gap yang terjadi antara target dan realisasi capaian pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah serta memperhatikan isu publik yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Pada bagian ini akan dibahas permasalahan dari sisi



pembangunan daerah dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib, Urusan Non Wajib Dasar, dan Urusan Pilihan dan Penunjang Urusan).

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan pada Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kinerja seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu perumusan permasalahan di Kabupaten Langkat dibagi menjadi dua yaitu Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Identifikasi Masalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Tahapan dalam perumusan permasalahan tersebut harus terstruktur dan mampu memberikan relevansi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan akan terus muncul dan berkembang seiring pelaksanaan pembangunan tersebut. Begitu pula dengan pembangunan yang relatif dinamis pada setiap periode pembangunannya sehingga kebijakan dapat berubah dengan syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan. Berbagai permasalahan pembangunan perlu diantisipasi dan diminimalisir dampaknya terhadap capaian Pembangunan.

4.1.2 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sesuai amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator pembangunan daerah adalah kinerja kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menjabarkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih rinci sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 dokumen ini. Permasalahan aspek kesejahteraan



masyarakat pada bagian ini merupakan hasil identifikasi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat skala Kabupaten yang mencerminkan outcome serta dampak (impact) dari pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini. Beberapa indikator kesejahteraan yang telah diidentifikasinya adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pemerintah Kabupaten Langkat harus berjuang lebih keras dalam memulihkan pertumbuhan perekonomian diakibatkan dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kategori lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya di tahun 2019 (5,405%) mengalami kontraksi yang cukup besar pada tahun 2020 yaitu 00,86%. Beberapa kategori yang mengalami penurunan terbesar ada pada Jasa perusahaan, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya.

Pada tahun 2021 pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Langkat mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,08 persen. Akan tetapi harus berusaha lebih keras lagi dikarenakan beberapa kategori pada lapangan usaha pertumbuhan ekonominya masih kecil. Meskipun tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat Kembali mengalami kenaikan sebesar 4,69 persen namun posisinya masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional.

- **Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, hingga tahun 2021 mencapai 10,12 persen dari total penduduk Kabupaten Langkat. Tingkat kemiskinan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Langkat mengalami penurunan menjadi sebesar 9,49 persen. Ini merupakan tingkat kemiskinan terendah selama lima tahun terakhir. Namun dari 9,49 persen tersebut, terdapat 2 persen penduduk langkat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE dari Kementerian



Koordinator PMK. Berbagai strategi harus dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat yang lebih merata. Salah satu aspek penting dari tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan yang mencerminkan seberapa dalam perbedaan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan masalah laten yang perlu terus diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Langkat pada masa mendatang.

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah keluarga miskin, karena pemutusan hubungan kerja (PHK); usaha keluarga terganggu, bangkrut, dan bahkan terlilit utang; serta anggota keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami sakit, dirawat, atau bahkan meninggal.

- **Pengangguran**

Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Langkat merupakan salah satu indikator yang perlu perhatian lebih serius bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir memiliki kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2019 berkisar 5,28 persen. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,02 persen di tahun 2020 sebagai dampak tinggi pandemic covid pada masa itu. Pada tahun 2021 Tingkat Penangguran terbuka kemabali mengalami penurunan menjadi 5,12 persen. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 6,88 persen. Kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya penduduk usia kerja yang menjadi Angkatan kerja naun tidak diiringi dengan serapan di pasar kerja. Hal ini bisa jadi dikarenakan bidang keahlian Angkatan kerja Kabupaten Langkat tidak dibutuhkan oleh pasar kerja yang tersedia.

Jumlah pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan



usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

- **Prevelensi Kekurangan Gizi pada Balita**

Persentase balita stunting di Kabupaten Langkat tercatat sebesar 30,5 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 18,6 persen dan sudah dibawah standar WFO sebesar 20% dan dibawah nasional yaitu 24,4% serta dibawah Provinsi Sumatera Utarayaitu 24,5 persen. Namun angka ini masih perlu didorong untuk terus diturunkan mengingat target nasional angka stunting tahun 2024 adalah 14 persen. Faktor penyebabnya antara lain, terdapat ketimpangan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan, sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman dan urbanisasi yang mempengaruhi tumbuh kembang balita serta kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan.

permasalahan utama Kabupaten Langkat dibagi kedalam 4 (empat) aspek untuk diuraikan kedalam bentuk masalah pokok, masalah dan akar masalah agar lebih mudah dalam melakukan intervensi penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Uraian terkait permasalahan Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.1
Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA		
	1.1	Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan fasilitas Pendidikan
			Belum optimalnya peningkatan kualitas dan mutu Pendidikan sekolah serta peningkatan literasi masyarakat
		Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan kualitas Pembangunan kepemudaan	1. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan fasilitas sekolah PAUD, SD dan SMP
			1. Belum optimalnya tingkat Pendidikan tenaga pendidik di satuan Pendidikan
			2. Belum optimalnya peningkatan mutu kurikulum Pendidikan yang terstandar
			3. Belum optimalnya capaian SPM bidang pendidikan
			4. Masih rendahnya minat baca masyarakat
			5. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
			6. Belum optimalnya pemerataan jumlah tenaga Pendidikan
		Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan kualitas Pembangunan kepemudaan	1. Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar
			2. Belum optimalnya prestasi atlet
			3. Belum optimalnya peningkatan peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan Pembangunan
	1.2	Belum optimalnya peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Belum optimalnya penurunan angka kematian Ibu dan Bayi
			2. Belum optimalnya penurunan angka prevalensi stunting

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2025-2026



				3.	Belum Optimalnya capaian SPM bidang Kesehatan
				4.	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas tenaga Kesehatan yang sesuai standar kompetensi
				5.	Belum optimalnya Peningkatan Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan
				6.	Belum optimlanuya peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit
				7.	Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
	1.3	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam Pembangunan serta perlindungan anak	Masih rendahnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan perencanaan penganggaran yang responsive gender	1.	Belum optimalnya paartisipasi Perempuan dalam Pembangunan
				2.	Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender
				3.	Rendahnya pemberdayaan ekonomi Perempuan
			Belum optimalnya implementasi layak anak di Kabupaten	1.	Masih rendahnya capaian penilaian Kota Layak Anak
	1.4	Belum optimalnya pengendalian penduduk	Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk	1.	Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi
				2.	Belum optimalnya peserta KB aktif PUS pria dan wanita
				3.	Masih tingginya angka kelahiran remaja
	2	ASPEK EKONOMI			
	2.1	Belum optimalnya peningkatan PDRB sektor ekonomi unggulan (Pertanian, perikanan, perdagangan dan Industri)	Belum optimalnya PDRB sektor pertanian dan perikanan	1.	Masih rendahnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
				2.	Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
				3.	Belum optimalnya peran pendampingan dari penyuluh

			Belum optimalnya PDRB sektor perindustrian dan perdagangan	1.	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industry
				2.	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah siap ekspor
				3.	Masih rendahnya daya saing produk UKM dan IKM untuk go digital
				4.	Belum optimalnya kinerja Koperasi
				5.	Belum tersedianya sistem pemasaran online produk UKM dan IKM unggulan daerah
				6.	Belum optimalnya pengembangan skala bisnis produk UKM dan IKM
	2.2	Belum optimalnya peningkatan investasi dan Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya Peningkatan Investasi dan Pendapatan Asli Daerah	1.	Masih rendahnya realisasi PMDN dan PMA
				2.	Belum tersedianya peta investasi daerah
				3.	Belum tersedianya Investment project ready to offer
				4.	Belum maksimalnya implementasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi
				5.	Belum tersedianya peta/kajian potensi PAD Kabupaten Langkat
				6.	Masih tingginya pitang PAD yang belum terselesaikan
	2.3	Belum optimalnya daya saing pariwisata	Belum optimalnya daya Tarik pariwisata	1.	Masih rendahnya kualitas 4A pada objek wisata
				2.	Belum optimalnya promosi pariwisata
				3.	Masih rendahnya diversifikasi atraksi dan keunggulan wisata
				4.	Masih belum optimalnya pengembangan desa wisata
				5.	Masih rendahnya keamanan di destinasi wisata
				6.	Kurangnya peran serta Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata
				7.	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata

	24	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kompetensi pelatihan	1.	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
				2.	Belum optimalnya penyusunan rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
				3.	Belum Optimalnya kualitas tenaga pelatih
				4.	Belum maksimalnya sarana dan prasaarana pada BLK
			Masih rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha	1.	Belum tersedianya informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan dunia usaha
				2.	Masih rendahnya Kerjasama dengan Perusahaan swasta/BUMN/BUMD dalam penempatan tenaga kerja
	2.5	Belum optimalnya peningkatan status desa berdasarkan IDM	Belum optimalnya peningkatan pemerataan pendapatan masyaarakat melalui peningkatan status desa	1	Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin dan miskin ekterem Kabupaten by name by address by NIK
				2.	Belum optimalnya jumlah PPKS yang tertangani
				3.	Belum optimalnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
				3.	Belum optimalnya peran BUMDES
				4.	Belum optimalnya peran Lembaga desa
				5.	Belum optimalnya ketahanan keluarga dalam penanggulangan bahaya narkoba
				6.	Belum optimalnya implementasi Desa Bersinar dan penurunan desa rawan narkoba
				7.	Belum terlakananya penegakan perda secara optimal
3		ASPEK INFRASTTUKTUR DAN LINGKUNGA HIDUP BERKELANJUTAN			
	3.1	Belum Optimalnya konektivitas dan kinerja transportasi	Belum optimalnya konektivitaas wilayah pendukung ekomomi	1.	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap

				2.	Masih rendahnya jumlah jembatan dalam kondisi baik
				3.	Masih rendahnya fasilitas pendukung jalan di ruas jaalan kabupaten
	3.2	Belum optimalnya kinerja infrasrtuktur permukiman	Belum optimalnya kinerja infrasrtuktur pendukung perumahan dan permukiman	1.	Belum optimalnya penataan kawasan kumuh
				2.	Masih tingginya jumlah RTLH yang belum tertangani
				3.	Belum optimalnya korban bencana yang memperoleh RTLH
				4.	Belum optimalnya ketersediaan air bersih
				5.	Belum optimalnya ketersediaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman
				6.	Belum optimalnya pelayanan persampahan
	3.3	Rendahnya kualitas lingkungan hidup	Terjadinya pencemaran udara, air dan tutupan lahan	1.	Rendahnya kesadaran lingkungan
				2.	Masih rendahnya pemahaman terhadap kegiatan Pembangunan pro lingkungan
				3.	Belum optimalnya pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup
				4.	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pengaduan terkait lingkungan hidup
	3.4	Belum optimalnya penurunan resiko bencana di Masyarakat	Belum optimalnya kesiapsiagaan, ketangguhan dan penanganan bencana	1.	Belum optimalnya budaya kesadaran tanggap bencana di Masyarakat
				2.	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana
				3.	Belum tersedianya Kajian rawan bencana
				4.	Belum optimalnya peringatan dini dan respon cepat penanganan darurat bencana alam dan non alam
				5.	Belum Optimalnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
				6.	Belum Optimalnya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

4.		TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
	4.1	Belum optimalnya Pemerintahan Daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Belum optimalnya akuntabilitas, kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah	1.	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Kinerja di Instansi Pemerintah
				2.	Belum optimalnya kualitas dan keselarasan perencanaan dan penganggaran
				3.	Belum Optimalnya Kualitas Capaian Kinerja Pembangunan di Instansi Pemerintah
				4.	Kurangnya optimalnya kemampuan ASN dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan berkualitas
				5.	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja internal oleh APIP
				6.	Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
				7.	Belum Optimalnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
				8.	Belum optimlnya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
	4.2	Belum optimalnya pelayanan publik kepada Masyarakat	Belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat	1.	Belum adanya SOP dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat
				2.	Belum optimalnya kualitas dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat
				3.	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada Masyarakat
				4.	Masih panjangnya alur pelayanan
	4.3	Belum optimalnya implementasi SPBE	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.	Belum Optimalnya Penerapan dan Integrasi SPBE di Instansi Pemerintah
	4.4	Belum optimalnya kualitas Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas dan Sejahtera	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	1.	Belum Optimalnya Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
				2.	Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi

					Jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara
				3.	Belum Optimalnya Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegras
	4.5	Belum optimalnya Penerapan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Masih rendahnya perangkat daerah dalam menciptakan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas	1.	Kurangnya kesadaran dan kemampuan ASN dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
				2.	Kurangnya pemahaman ASN tentang inovasi
				3.	Inovasi yang diciptakan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan



4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Identifikasi Isu Global

Isu strategis Global merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis global sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi. Isu global yang relevan bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang bagi Kab. Langkat adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta Revolusi Industri 4.0 (kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi).

1) *Sustainable Development Goals/SDGs*

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti.

Konsep SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh kesepakatan untuk menjadi tujuan bersama yang universal. Tujuan bersama tersebut merupakan arah untuk memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam menjaga tiga dimensi tersebut SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berupa SDGs. Tujuan global dari SDGs sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan Gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, industri dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga Ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Gambar Error! No text of specified style in document..1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang

akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

2) Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan pertengahan tahun 2016, tak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menimbulkan permasalahan serius, yaitu jutaan penduduk yang menjadi pengungsi dan belum jelas masa depannya. Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain juga adanya pandemi COVID-19 telah memberi tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan termasuk Kabupaten Langkat.

3) Antisipasi Perubahan Iklim Global (Global Warming/Climate Change)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan

pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kabupaten Langkat merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan pulau kecil, sehingga isu kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global dapat berpengaruh terhadap pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kab. Langkat. Selain itu, Kabupaten Langkat merupakan kabupaten yang memiliki kerawanan terhadap bencana banjir. Efek global warming dan climate change dapat berpengaruh terhadap besarnya resiko banjir di Kabupaten Langkat jika tidak dilakukan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi terhadap bencana banjir.

4) *Revolusi Industri 4.0*

Sejak tahun 2000 hingga saat ini terjadi era penerapan teknologi modern, antara lain teknologi fiber (fiber technology) dan sistem jaringan terintegrasi (integrated network), yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi, dari produksi hingga konsumsi. The World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (fusion) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologis. Pembauran teknologi dianggap mampu mengintegrasikan faktor sumberdaya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional, dalam mencapai tujuan.

Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Adapun pengertian dari istilah-istilah tersebut adalah:

a. *Advanced Robotics*

Instrumen ini merupakan peralatan yang digunakan secara mandiri, yang mampu berinteraksi secara langsung dengan manusia, serta menyesuaikan perilaku berdasarkan sensor data yang diberikan. Fungsi utamanya adalah untuk memperpendek waktu tunggu dan waktu layanan, sehingga menghasilkan efisiensi.

b. *Artificial Intelligence (AI)*

AI adalah sistem mesin berteknologi komputer yang mampu mengadopsi kemampuan manusia. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja manusia.

c. *Internet of Things (IoT)*

IoT merupakan teknologi yang memungkinkan setiap instrumen terkoneksi satu sama lain secara virtual, sehingga mampu mendukung kinerja operasional usaha, pengawasan terhadap performa manajemen, serta peningkatan nilai guna output.

d. *Virtual and Augmented Reality*

Virtual Reality merupakan simulasi yang dilakukan oleh komputer dalam membentuk sebuah realitas rekaan. Teknologi ini mampu memanipulasi penglihatan manusia sehingga seolah-olah berada di tempat atau lingkungan yang berbeda dari kenyataan sesungguhnya. Sementara Augmented Reality adalah teknologi yang mampu menghasilkan informasi dari kondisi lingkungan sebenarnya, lalu diproses secara digital dan digunakan untuk tujuan tertentu.

e. *Additive Manufacturing*

Teknologi ini merupakan otomatisasi proses produksi melalui teknologi 3D (three dimensional). Hal ini memberi pengaruh positif pada kecepatan pengolahan dan transportasi produk.

f. *Distributed Manufacturing*

Merupakan konsep penempatan lokasi produksi dan pengintegrasian proses produksi, sehingga bisa berada sedekat mungkin dengan konsumen untuk menjawab kebutuhan riil mereka.

Tujuannya adalah untuk mencapai economies of scale, sekaligus mengurangi beban biaya (cost efficiency).

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata-mata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen (World economic Forum. Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains, October, 2017). The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menekankan agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya agenda-agenda pembangunan seperti yang tertuang dalam the Sustainable Development Goals (SDGs). UNIDO menegaskan beberapa poin penting terkait perkembangan industri 4.0, yakni:

- a. Industri 4.0 diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama
- b. Industri 4.0 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia , sehingga menjadi semakin terdidik dan terampil.
- c. Akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bisa diterapkan di semua negara.
- d. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi.
- e. Kemajuan teknologi diharapkan bisa menggeser paradigma lama, dari persaingan (competition) menjadi koneksi (connection) dan kerjasama (collaboration).
- f. Penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Sementara itu, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, antara lain:

- a. Mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output.

- b. Menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkungan hidup.
- c. Mempersiapkan infrastruktur, serta program pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi.

Kementerian Perindustrian Indonesia telah membuat roadmap sebagai tanggapan terjadinya revolusi industri 4.0 dengan menyusun “Making Indonesia 4.0”. Terdapat 10 prioritas nasional yang ditetapkan, yaitu :

1. Perbaiki alur aliran material, dengan memperkuat produksi material sektor hulu.
2. Mendesain ulang zona industry, dengan membangun peta jalan zona industri nasional dan mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industry.
3. Akomodasi standar sustainability, melalui pemanfaatan kesempatan daya saing melalui tren sustainability global.
4. Pemberdayaan UMKM, dengan memberdayakan 3,7 juta UMKM (termasuk usaha mikro) melalui teknologi.
5. Membangun infrastruktur digital nasional, melalui pembangunan jaringan dan platform digital.
6. Menarik investasi asing, dengan menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi.
7. Peningkatan kualitas SDM, dengan perancangan ulang kurikulum pendidikan menyesuaikan era Industri 4.0 dan program talent mobility untuk professional.
8. Pembentukan ekosistem inovasi, dengan pengembangan sentra Research, Development, and Design oleh pemerintah, swasta, publik, maupun universitas.
9. Menerapkan insentif investasi teknologi, dengan memperkenalkan tax exemption/subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan.
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan, dengan melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian.

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Isu strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan, melalui:
 - Optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan
 - Optimalisasi peningkatan derajat kesehatan Masyarakat
 - Optimalisasi kesetaraan gender dalam Pembangunan
 - Optimalisasi iklim demokrasi di Masyarakat
 - Optimalisasi penurunan resiko bencana di Masyarakat
 - Optimalisasi penurunan jumlah penduduk miskin
2. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, melalui:
 - Optimalisasi peningkatan kualitas pelatihan
 - Peningkatan pertumbuhan UKM dan IKM baru
 - Peningkatan akses tenaga kerja terhadap dunia usaha
 - Peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas pertanian
 - Peningkatan daya saing pariwisata berkelanjutan
 - Optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan kejuruan
 - Optimalisasi peningkatan kualitas pelatihan
 - Optimalisasi peningkatan kualitas sarana pelatihan
 - Peningkatan akses tenaga kerja terhadap dunia usaha
 - Optimalisasi peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha
 - Optimalisasi iklim investasi
 - Peningkatan pertumbuhan UKM dan IKM baru
 - Peningkatan daya saing pariwisata yang berkelanjutan
 - Peningkatan nilai tambah sektor ekonomi kreatif
 - Optimalisasi pemajuan kebudayaan

3. Optimalisasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Kegiatan Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah melalui:
 - Optimalisasi layanan sistem transportasi
 - Optimalisasi layanan infrastruktur permukiman
 - Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - Penurunan kesenjangan wilayah
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif melalui:
 - Optimalisasi peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 - Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
 - Optimalisasi peningkatan pelayanan publik yang prima
 - Optimalisasi kualitas aparatur sipil negara

4.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 menetapkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara ialah untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Arahana tata ruang terkait Kabupaten Langkat dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 ialah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

- Sistem perkotaan dalam rencana struktur ruang Provinsi Sumatera Utara ialah PKL Pangkalan Brandan dan PKL Stabat
- Rencana sistem jaringan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Kab. Langkat ialah :
 - Pengembangan jaringan jalan nasional (Batas Provinsi Aceh – Simpang Pangkalan Susu, Simpang Pangkalan Susu – Tanjung Pura, Tanjung Pura – Batas Kota Stabat, Jln. Zaenal Arifin, dan Batas Kota Stabat – Batas Kota Binjai)

- Pengembangan jaringan jalan provinsi (SP. Pangkalan Susu – Pangkalan Ssu, Tanjung Pura – Tanjung Selamat, Tanjung Selamat – Namu Unggas – Tangkahan, Batas Binjai – Kuala, Kuala – Timbang Lawang, SP. Durian Mulo – Namu Ukur, Namu Ukur – Batas Karo, Jalan Susur Pantai Timur)
- Terminal Tipe B (Terminal Bahorok, Terminal Tanjung Pura, Terminal Selesai, Terminal Tanjung Beringin)
- Pelabuhan Pengumpul Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan
- Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pulau Kampai, Tapak Kuda, Kuala Serapuh)
- Pengembangan Pembangkit Listrik Baru di PLTU Pangkalan Susu 2 (FTP 1)
- Pengembangan Daerah Irigasi
- Pengembangan Instalasi PDAM Tirta Wampu
- Sistem drainase dan pengendalian banjir
- Sistem penanganan erosi dan longsor di aliran sungai
- Sistem pengamanan abrasi pantai, dan pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa
- Pengembangan jaringan terestrial telekomunikasi
- Pengembangan Wilayah Sungai Belawan – Ular – Padang dan Wilayah Sungai Wampu Besitang
- Pengembangan Cekungan Air Tanah Langsa, Cekungan Air Tanah Medan,

2. Rencana Pola Ruang

- Kawasan Lindung
 - Kawasan Hutan Lindung
 - Kawasan Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut
 - Kawawasan Taman Nasional Gunung Leuser
 - Kawasan lahan gambut
 - Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan

sekitar mata air, kawasan RTH. Kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil)

- Kawasan Lindung Geologi (Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan CAT Medan)
- Kawasan rawan bencana , yaitu kawasan rawan gerakan tanah dan kawasan rawan angin puting beliung.
- Kawasan Budidaya
 - Kawasan hutan produksi
 - Kawasan pertanian
 - Kawasan perkebunan
 - Kawasan peternakan hewan besar
 - Kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - Kawasan perikanan (PPI Pangkalan Susu, PPI Pangkalan Berandan, PPI Kuala Gebang)
 - Kawasan Industri Pangkalan Susu
 - Kawasan pariwisata Bahorok, Bukit Lawang
 - Kawasan pariwisata budaya Situs Kota Tua Tanjung Pura
 - Kawasan pariwisata minat khusus di Sei Asahan – Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu
 - Kawasan tambang minyak, gas bumi, panas bumi, dan batu bara
 - Kawasan pertahanan dan keamanan berupa pendaratan pasukan di Pangkalan Susu

3. Rencana Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Langkat ialah Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

4.2.3 Kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025, yang menjadi Visi Pembangunan jangka Panjang adalah:

**“MASYARAKAT YANG RELIGIUS, MAJU, BERDAYA SAING
DAN SEJAHTERA”**

1. Masyarakat yang religius; mengandung pengertian ketaatan Masyarakat untuk menerapkan perilaku dan sikap hidup beragama. Antar sesama umat beragama dapat hidup rukun serta mampu diterapkan dalam setiap kegiatan Pembangunan.
2. Masyarakat yang maju; mengandung pengertian masyarakat yang mampu menguasai IPTEK, dan mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan produk-produk unggulan hasil pertanian, perikanan, peternakan, industri, pariwisata, dan perdagangan/jasa. Dengan Indikator kinerja yang mampu melampaui rata-rata Kabupaten di Sumatera Bagian Utara.

Hal lain yang perlu disampaikan bahwa masyarakat yang maju tersebut adalah adanya suatu masyarakat berupaya yang keras ingin mewujudkan masyarakat yang unggul, produktif, dan sejahtera lahir bathin. Upaya tersebut merupakan upaya yang sangat tepat oleh karena di dalamnya terkandung unsur-unsur responsif terkait situasi kondisi dan kebutuhan Kabupaten Langkat, bijak terkait dengan ketepatan pilihan upaya, dan pintar terkait dengan tingkat pemahaman persoalan dan pilihan upaya pengatasan permasalahan. Ringkasnya upaya diatas merupakan upaya yang cerdas.
3. Masyarakat yang berdaya saing; perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sehingga mampu bersaing secara sehat dengan didasari oleh keyakinan akan potensi dan peluang yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
4. 4. Masyarakat yang Sejahtera; masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program pembangunan. Serta berkeadilan bagi seluruh lapisan dan kelompok masyarakat Kabupaten Langkat.

Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Langkat yang sehat, layak dan manusiawi. Penjabaran pernyataan tersebut diatas adalah:

- a. Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli. Perwujudan dari visi ini sangat penting, karena merupakan inti dari tujuan pembangunan secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Society welfare).
- b. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan ada imbas peningkatan aktivitas ekonomi baik secara langsung atau sebagai dampak multiplier effect , sehingga ada peningkatan produktivitas di segala sektor yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat 2005-2025, selanjutnya ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Langkat 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, serta memelihara dan mengembangkan budaya berdasar kearifan lokal;
- 2) Mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial.
- 3) Mewujudkan peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- 4) Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum;
- 5) Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan Lestari.

Arahan pembangunan periode keempat dalam RPJPD Kabupaten Langkat 2005-2025, ditujukan untuk mewujudkan visi Kabupaten Langkat yaitu **“Masyarakat yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera ”** melalui Percepatan dan sinergisitas pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politikserta supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai olehmeningkat dan meratanya kesejahteraan sosial, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungananak. Sumber daya manusia Kab.Langkat diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis danberorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor.Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertat serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Langkat

Isu strategis pembangunan Kabupaten Langkat menempatkan isu penguatan struktur ekonomi Kabupaten sebagai inti dari isu strategis pembangunan Kabupaten yang terintegrasi dengan isu strategis pada urusan pemerintah daerah yang meliputi aspek urusan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026, karena pada tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Penjabat Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 2 tahun kedepan sampai terpilihnya Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Isu strategis dalam Perencanaan Pembangunan daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
6. Kesesuaian dengan RPJPD-P.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, akan berdampak pada masa depan, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal

pembangunan yang signifikan. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis yang muncul dari setiap bidang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Langkat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Langkat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Langkat; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Langkat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Langkat; maka ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Langkat yaitu :

1) PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA;

Sumber Daya Manusia merupakan suatu elemen penting dalam perwujudan Golden Generation menuju 100 Tahun Indonesia pada tahun 2045. Indonesia akan berada pada fase bonus demografi dimana terjadi peningkatan penduduk sebesar 70 persen pada usia produktif (16-65 tahun) sementara 30% persen merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

Kualitas sumber daya manusia digambarkan melalui pencapaian pada nilai Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019-2022. Namun peningkatan tersebut masih sangat kecil setiap tahunnya. Dan nilai IPM Kabupaten Langkat masih berada dibawah IPM Provinsi Sumatera Utara dan IPM Nasional. Bahkan diantara Kaabupaten Kota yang berada di wilayah Pantai timur sumatera utara Kabaupaten Langkat masuk dalam 5 Kabupaten/Kota dengan IPM terendah.

Indeks Pembangunan manusia dibentuk oleh 3 dimensi yaitu Pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), Kesehatan (Usia harapan hidup) dan kualitas hidup layak (pengeluaran perkapita).

Untuk dimensi Pendidikan yang digambarkan oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Langkat juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah selama 8,68 tahun dan Harapan lama sekolah Kabupaten Langkat adalah 13,26 tahun. Berdasarkan capaian tersebut terlihat bahwa rata-rata lama sekolah Masyarakat Kabupaten Langkat adalah 8,68 tahun, ini berarti rata-rata Pendidikan Masyarakat Kabupaten Langkat tidak tamat SMP.

Untuk itu perlu dilaksanakan optimalisasi pemerataan akses dan kualitas Pendidikan dalam rangka peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Masyarakat kabupaten langkat. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung Pendidikan, peningkatan mutu kurikulum serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pemerataan tenaga pendidik pada semua sekolah, peningkatan kompetensi guru/pendidik dalam memberi materi kepada siswa.

Kondisi Kesehatan Kabupaten Langkat digambarkan melalui indikator Usia Harapan Hidup. Usia harapan hidup kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah 69,39. Angka ini masih berada dibawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Derajat Kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Pelayanan Kesehatan terhadap ibu hamil/bersalin dan bayi belum optimal. Capaian indikator pelayanan minimal juga belum optimal. Selain itu angka stunting Kabupaten Langkat juga masih cukup tinggi yaitu 18,6 persen pada tahun 2022 (data SSGI). Sementara pada tahun 2024 target stunting nasional harus berada di angka 14 persen.

Kesetaraan gender dalam pembangunan juga belum optimal. Hal ini tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Langkat yang walaupun selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya namun masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Indeks Pembangunan gender Kabupaten Langkat Tahun 2022 adalah sebesar 89,03 poin dan indeks pemberdayaan gender sebesar 67,50 poin.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban keluarga terutama bagi keluarga yang rentan kemiskinan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan kurang optimalnya pelaksanaan KB pada PUS dan terjadi peningkatan pernikahan terutama di kalangan remaja. Untuk mengatasi hal ini maka perlu digerakkan dengan maksimal pelaksanaan KB bagi pasangan usia subur untuk mencegah serta menjarangkan kehaamilan baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Selain itu peningkatan dalam pendampingan pencegahan pernikahan dini/usia muda pada anak remaja.

2) PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS;

Laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta pemerataan pendapatan merupakan indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Karena peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pemerataan distribusi pendapatan mengindikasikan jika Pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh semua lapisan Masyarakat bukan hanya orang-orang tertentu saja.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan tahun 2022. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami kontraksi sebesar -0,86 persen dikarenakan terjadinya pandemic covid 19. Namun tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat sudah mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 3,08 persen tahun 2021 dan 4,69 persen pada tahun 2022. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor unggulan Kabupaten Langkat terutama sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Distribusi PDRB sektor pertanian perikanan dan kehutanan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada masa pandemic covid hanya sektor ini yang

tetap tumbuh walaupun sangat kecil. Beberapa strategi dalam peningkatan PDRB sektor pertanian antara lain peningkatan produksi dan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor UMKM dan IKM unggulan, peningkatan investasi dan pendapatan daerah, peningkatan daya Tarik dan daya saing pariwisata, peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan status Indeks Desa Membangun.

3) PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN;

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas merupakan sesuatu yang mutlak dalam mewujudkan kabupaten yang maju. Hal ini perlu didukung oleh infrastruktur yang berkualitas. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran drainase, PSU lingkungan, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni serta sarana pendukung transportasi pendukung jalan, serta infrastruktur dasar pendukung capaian SPM yaitu ketersediaan air bersih dan akses sanitasi. Pemerintah Kabupaten Langkat telah banyak melakukan Pembangunan infrastruktur melalui APBD Kabupaten Langkat. Meskipun Pembangunan infrastruktur telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana persentase Panjang jalan kondisi mantap Kabupaten Langkat tahun 2022 sepanjang 63,23 persen atau sepanjang 987,20 km dari total Panjang jalan Kabupaten yaitu 1.561,3 km. Namun ini belum optimal karena masih terdapat 4,10 persen jalan dalam kondisi rusak dan 32,67 persen jalan dalam kondisi rusak berat. Pembangunan jalan dan sarana infrastruktur lain pendukungnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah.

Selain permasalahan infrastruktur, permasalahan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga masih menjadi isu strategis di Kabupaten Langkat. Angka Indeks kualitas lingkungan hidup sudah cukup baik. Namun belum begitu optimal terutama dalam pencapaian indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang

terjadi. Selain itu pengelolaan Tata Ruang Wilayah juga belum maksimal. Masih tingginya indeks resiko bencana masih menjadi permasalahan di Kabupaten Langkat dimana indeks resiko bencana Kabupaten Langkat mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 142 poin. Angka ini masuk dalam kategori sedang namun sudah mendekati angka 144 yang merupakan ambang batas kategori sedang.

4) PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH SERTA INOVASI DAERAH

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Langkat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih perlu ditingkatkan antara lain akuntabilitas kinerja dan keuangan dan asset, belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya implementasi SPBE, belum optimalnya profesionalisme aparatur, serta masih rendahnya penerapan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Langkat, kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perizinan dan profesionalisme aparaturnya belum berjalan efektif dan optimal namun Kabupaten Langkat secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Langkat tahun 2022 dengan kategori “CC”. Capaian ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang masih dalam kategori “C”. Capaian ini menunjukkan PR besar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Langkat harus menyelesaikan permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Keterkaitan antara permasalahan daerah dengan isu strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis

No	AKAR MASALAH		MASALAH	POKOK PERMASALAHAN		ISU STRATEGIS
1	ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA					
	1.	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan fasilitas sekolah PAUD, SD dan SMP	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan fasilitas Pendidikan	1.	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIAA
	1.	Belum optimalnya tingkat Pendidikan tenaga pendidik di satuan Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan mutu Pendidikan sekolah serta peningkatan literasi masyarakat			
	2.	Belum optimalnya peningkatan mutu kurikulum Pendidikan yang terstandar				
	3.	Belum optimalnuya capaian SPM bidang pendidikan				
	4.	Masih rendahnya minat baca masyarakat				
	5.	Belum optimalnya pengelolaan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat	Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan kualitas Pembangunan kepemudaan			
	6.	Belum optimalnya pemerataan jumlah tenaga Pendidikan				
	1.	Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar				
	2.	Belum optimalnya prestasi atlet				
	3.	Belum optimalnya peningkatan peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan Pembangunan				
	1.	Belum optimalnya penurunan angka kematian Ibu dan Bayi	Belum optimalnya peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat	1.	Belum optimalnya peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	
	2.	Belum optimalnya penurunan angka prevalensi stunting				
	3.	Belum Optimalnya capaian SPM bidang Kesehatan				
	4.	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas tenaga Kesehatan yang sesuai standar kompetensi				
	5.	Belum optimalnya Peningkatan Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan				
	6.	Belum optimlanuya peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit				
	7.	Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				

NO	AKAR MASALAH		MASALAH	PERMASALAHAN POKOK		ISU STRATEGIS
	1.	Belum optimalnya paartisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Masih rendahnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan perencanaan penganggaran yang responsive gender	1.	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam Pembangunan serta perlindungan anak	
	2.	Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender				
	3.	Rendahnya pemberdayaan ekonomi Perempuan				
	1.	Masih rendahnya capaian penilaian Kota Layak Anak	Belum optimalnya implementasi layak anak di Kabupaten			
	1.	Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk	1.	Belum optimalnya pengendalian penduduk	
	2.	Belum optimalnya peserta KB aktif PUS pria dan wanita				
	3.	Masih tingginya angka kelahiran remaja				
	2	ASPEK EKONOMI				
	1.	Masih rendahnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Belum optimalnya PDRB sektor pertanian dan perikanan	1.	Belum optimalnya peningkatan PDRB sektor ekonomi unggulan (Pertanian, perikanan, perdagangan dan Industri)	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
	2.	Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan				
	3.	Belum optimalnya peran pendampingan dari penyuluh				
	1.	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industry	Belum optimalnya PDRB sektor perindustrian dan perdagangan			
	2.	Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah siap ekspor				
	3.	Masih rendahnya daya saing produk UKM dan IKM untuk go digital				
	4.	Belum optimalnya kinerja Koperasi				
	5.	Belum tersedianya sistem pemasaran online produk UKM dan IKM unggulan daerah				
	6.	Belum optimalnya pengembangan skala bisnis produk UKM dan IKM				

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
1.	Masih rendahnya realisasi PMDN dan PMA	Belum optimalnya Peningkatan Investasi dan Pendapatan Asli Daerah	1. Belum optimalnya peningkatan investasi dan Pendapatan Asli Daerah	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
	Belum tersedianya peta investasi daerah			
	Belum tersedianya Investment project ready to offer			
	Belum maksimalnya implementasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi			
	Belum tersedianya peta/kajian potensi PAD Kabupaten Langkat			
	Masih tingginya pitang PAD yang belum terselesaikan			
	1. Masih rendahnya kualitas 4A pada objek wisata	Belum optimalnya daya Tarik pariwisata	1. Belum optimalnya daya saing pariwisata	
	2. Belum optimalnya promosi pariwisata			
	3. Masih rendahnya diversifikasi atraksi dan keunggulan wisata			
	4. Masih belum optimalnya pengembangan desa wisata			
	5. Masih rendahnya keamanan di destinasi wisata			
	6. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata			
	7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata			
	1. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kompetensi pelatihan	1. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja	
	2. Belum optimalnya penyusunan rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja			
	3. Belum Optimalnya kualitas tenaga pelatih			
	4. Belum maksimalnya sarana dan prasaarana pada BLK			

NO		AKAR MASALAH	MASALAH		PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
	1.	Belum tersedianya informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan dunia usaha	Masih rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha			
	2.	Masih rendahnya Kerjasama dengan Perusahaan swasta/BUMN/BUMD dalam penempatan tenaga kerja				
	1	Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin dan miskin ekterem Kabupaten by name by address by NIK	Belum optimalnya peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan status desa	1.	Belum optimalnya penurunan ketimpangan distribusi pendapatan	
	2.	Belum optimalnya jumlah PPKS yang tertangani				
	3.	Belum optimalnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial				
	3.	Belum optimalnya peran BUMDES				
	4.	Belum optimalnya peran Lembaga desa				
	5.	Belum optimalnya ketahanan keluarga dalam penanggulangan bahaya narkoba				
	6.	Belum optimalnya implementasi Desa Bersinar dan penurunan desa rawan narkoba				
	7.	Belum terlaksananya penegakan perda secara optimal				
3	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGA HIDUP BERKELANJUTAN					
	1.	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	Belum optimalnya konektivitaas wilayah pendukung ekomomi	1.	Belum Optimalnya konektivitas dan kinerja transportasi	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN
	2.	Masih rendahnya jumlah jembatan dalam kondisi baik				
	3.	Masih rendahnya fasilitas pendukung jalan di ruas jaalan kabupaten				

NO		AKAR MASALAH	MASALAH		PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
4.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
	1.	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Kinerja di Instansi Pemerintah	Belum optimalnya akuntabilitas, kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah	1.	Belum Optimalnya capaian nilai evaluasi SAKIP	PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN INOVASI DAERAH
	2.	Belum otimalnya kualitas dan keselarasan perencanaan dan penganggaran				
	3.	Belum Optimalnya Kualitas Capaian Kinerja Pembangunan di Instansi Pemerintah				
	4.	Kurangnya optimalnya kemampuan ASN dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan berkualitas				
	5.	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja internal oleh APIP				
	6.	Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah				
	7.	Belum Optimalnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	8.	Belum optimlnya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah				
	1.	Belum adanya SOP dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat	Belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat	1.	Belum optimalnya pelayanan publik kepada Masyarakat	
	2.	Belum optimalnya kualitas dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat				
	3.	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada Masyarakat				
	4.	Masih panjangnya alur pelayanan				
1.	Belum Optimalnya Penerapan dan Integrasi SPBE di Instansi Pemerintah	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.	Belum optimalnya implementasi SPBE		

NO		AKAR MASALAH	MASALAH		PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
	1.	Belum Optimalnya Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Belum Optimalnya Kapasitas & Manajemen Aparatur Sipil Negara	1	Belum optimalnya kualitas Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas dan Sejahtera	
	2.	Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi Jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara				
	3.	Belum Optimalnya Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegras				
	1	Kurangnya kesadaran dan kemampuan ASN dalam mengembangkan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Masih rendahnya perangkat daerah dalam menciptakan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas	1	Belum optimalnya Penerapan InovasiDaerah Dalam Pembangunan	
	2	Kurangnya pemahaman ASN tentang inovasi				
	3	Inovasi yang diciptakan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan				

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Langkat 2025-2026

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Jika dalam RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu lima tahun, maka dalam RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 ini diukur dalam jangka waktu dua tahun saja. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator pembangunan yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam penyusunan RPJMD pada kondisi normal, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPD, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 maka menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Langkat merumuskan sebuah konsep RPD 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesesuaian sasaran pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2025;

2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun 2023;
3. RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku.

Selain itu, rumusan tujuan dan sasaran RPD juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara umum yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan Tujuan dan sasaran Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Langkat 20245-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA		KONDISI AKHIR
					2025	2026	
1	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,33	74,95	75,26	75,26
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,73	8,82	9,00	9,01
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,27	13,41	13,48	13,48
1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,14	74,44	74,59	74,59
1.3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan anak	Indeks pembangunan gender	Nilai	89,03	89,13	89,19	89,19
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,69	4,8-5,0	5,0-5,2	5,0-5,2
		Tingkat Kemiskinan	Persen	9,23	9,0-8,8	8,8-8,6	8,8-8,6
		Indeks Gini	Nilai	0,257	0,25	0,24	0,24
2.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	%	41,34	42,74	43,20	43,20
		Kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	10,77	11,25	11,41	11,41
		Kontribusi PDRB sektor industri	%	15,47	16,02	16,21	16,21

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA		KONDISI AKHIR
					2025	2026	
2.2	Meningkatnya investasi dan pendapatan asli daerah	Pertumbuhan PMDN/PMA	%	-48,97	1,5	1,7	1,7
		Pertumbuhan PAD	%	20,61	10	10	10
2.3	Meningkatnya Daya saing pariwisata	Kontribusi PDRB sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya)	%	2,16	2,58	2,8	2,8
2.4	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,33	6,0-5,7	5,7-5,5	5,7-5,5
2.5	Meningkatnya status Desa	Persentase peningkatan status desa menurut IDM	%	10,8	11	12	12
3.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Nilai	n/a	0,65	0,67	0,67
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	n/a	7	8	8
3.1	Meningkatnya konektivitas dan kinerja transportasi	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	%	58,85	62,23	64,76	64,76
		Persentase fasilitas transportasi di ruas jalan Kabupaten	%	N/A	55	60	60
3.2	Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	Luas kawasan kumuh	Ha	97,81	94,91	93,43	93,43
3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Nilai	72,96	73,35	73,70	73,70
3.4	Penuruna resiko kejadian bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai	142,62	139,32	138,22	138,22
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	BB	BB
4.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	BB	BB
		Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
4.2	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,82 (B)	4,01 (A-)	4,11 (A-)	4,11 (A-)
4.3	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan berbasis SPBE	Indeks SPBE	Nilai	3,02	3,3	3,4	3,4
4.4	Meningkatnya kualitas ASN	Sistem Merit	Nilai	165	200	250	250
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,88	70	75	75
4.5	Meningkatnya impelementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	Predikat	inovatif	inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif

5.2 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Kabupaten Tahun Langkat 2025-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 disusun mengacu kepada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025. Keterkaitan terkait RPJPD Kabupaten Langkat dengan RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026.

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2023	Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025	Tujuan RPD Tahun 2025-2026	Sasaran RPD
Terwujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk peningkatan peran Perempuan dalam pembangunan.	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan anak
		Tercapainya pertumbuhan penduduk yang terkendali dan seimbang	Terjaganya Laju Pertumbuhan Penduduk
Meningkatnya peningkatan daya saing perekonomian daerah	Terwujudnya pembangunan perekonomian masyarakat berdasarkan keunggulan kompetitif dengan berbasis agri industri serta industri setrategis lainnya yang berwawasan lingkungan. Sehingga terbangun struktur ekonomi yang kuat dan berimbang dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis di Pedesaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan Meningkatnya status Desa
	Terwujudnya pertumbuhan investasi yang mampu secara langsung mengangkat perekonomian dan kesejahteraan		Meningkatnya investasi dan pendapatan asli daerah

	masyarakat		
	Tercapainya pembangunan dan terpeliharanya infrastruktur perhubungan yang memadai dan terintegrasi satu sama lain	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatnya konektivitas dan kinerja transportasi
			Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman
Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, serta profesional dalam menunjang pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta inovasi daerah	Meningkatnya kinerja akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah
	Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini sesuai dengan misi adanya pemerintahan / birokrasi sebagai pelayan masyarakat		Meningkatnya pelayanan publik kepada Masyarakat

5.2 Keterkaitan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dengan RPD Kabupaten Tahun Langkat 2025-2026

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 disusun juga mengacu pada RPD Provinsi Sumatera Utara, Keterkaitan RPD Kabupaten Langkat dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Konsistensi RPD Kabupaten Langkat dengan RPD Provinsi Sumatera Utara

Tujuan RPD Provsu 2024-2026	Sasaran RPD Provsu 2024-2026	Tujuan RPD Kab. Langkat 2025-2026	Sasaran RPD Kab. Langkat 2025-2026
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya perlindungan anak dan gender		Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan dan perlindungan anak

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Peningkatan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Peningkatan status desa
	Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka		Peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja
	Meningkatnya kesejahteraan petani		Peningkatan PDRB sektor ekonomi unggulan (pertanian, perikanan, perdagangan dan industry
	Meningkatnya kontrinusi sektor pariwisata		Peningkatan daya saing sektor pariwisata
Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan		Peningkatan kualitas Infrastruktur lingkungan dan berkelanjutan	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan		Peningkatan konektivitas dan kinerja transportasi
	Meningkatnya akses hunian yang layak		Peningkatan kinerja infrastruktur permukiman
	Meningkatnya kinerja ketahanan pangan berkelanjutan		
	Penurunan ketimpangan wilayah		Peningkatan konektivitas dan kinerja transportasi
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Meningkatnya ketangguhan bencana		Peningkatan penurunn resiko bencana di masyarakat
Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif		Peningkatan kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan dan inovasi daerah	
	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Peningkatan pelayanan publik kepada Masyarakat
	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan		Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam Pembangunan
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah		

Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat diarahkan untuk mendukung prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2026 yang tertuang dalam RPD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat yang termuat dalam RPD Kabupaten Langkat memiliki kaitan dan mendukung prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, terdapat indikator makro Pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan Pembangunan Kabupaten Langkat secara umum, perbandingan penetapan target indikator makro Kabupaten Langkat dan Target Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Perbandingan penetapan target indikator kinerja Maakro Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara:

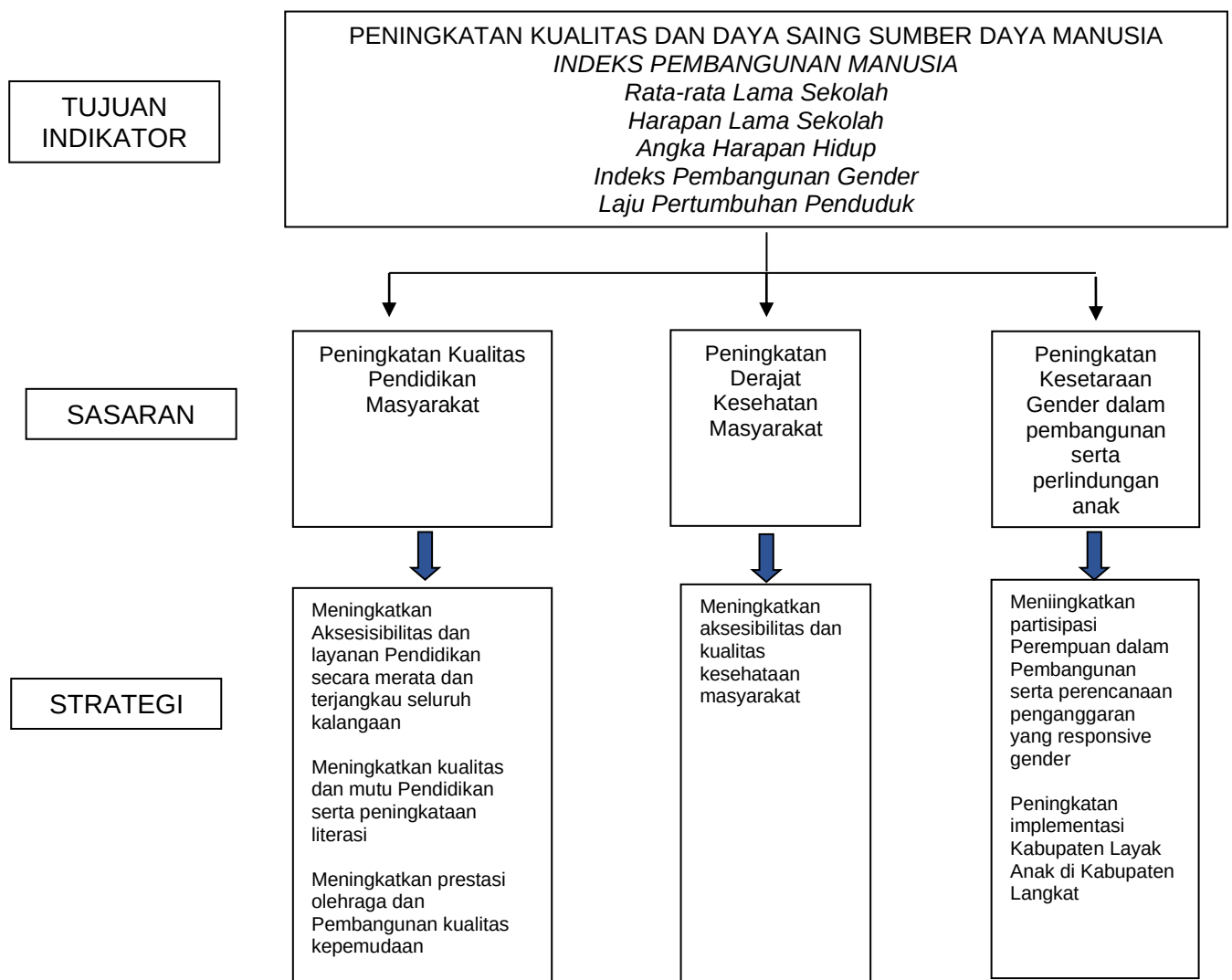
No	RPD Provinsi Sumatera Utara				RPD Kabupaten Langkat		
	Indikator	2024	2025	2026	Indikator	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	73,65	74,12	74,58	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	74,95	75,26
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,83	7,59	7,34	Tingkat Kemiskinan (%)	9,0-8,8	8,8-8,6
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0-5,2	5,2-5,4	5,4-5,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8-5,0	5,0-5,2
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,8-5,5	5,5-5,2	5,2-4,9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,0-5,7	5,7-5,5
5	Indeks Gini (poin)	0,324	0,322	0,320	Indeks Gini (poin)	0,25	0,24
6	Inflasi	3±1	2,75±1	2,5±1	Inflasi	2,75±1	2,5±1
7	Emisi Gas Rumah Kaaca	28,61	30,16	31,64	Emisi Gas Rumah Kaca	7%	8%

5.3 CASCADING KINERJA

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, serta menjaga laju pertumbuhan penduduk agar dapat tercipta sumber daya manusia di

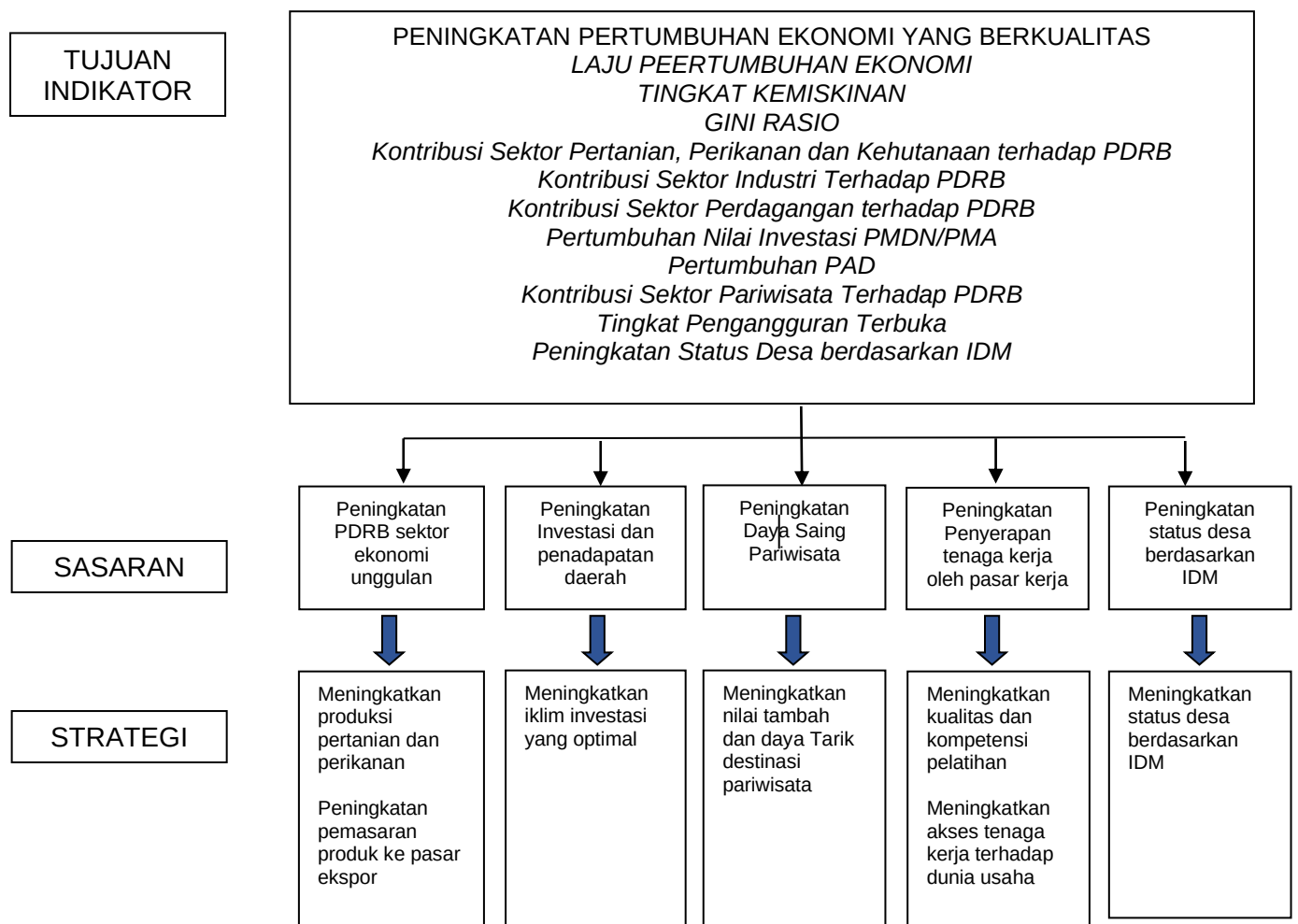
Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten dan berdaya saing. Pencapaian tujuan Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading serbagimana berikut ini :



2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan dan menurunnya perekonomian dengan sektor yang paling berdampak adalah sektor pariwisata. Kabupaten Langkat termasuk salah satu daerah yang terdampak hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi makro tahun 2020 antara lain LPE yang mengalami kontraksi sebesar -0,86 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,02 persen, persentase penduduk miskin yang tercatat sebesar 9,73 persen, serta meningkatnya angka gini rasio. Pada tahun

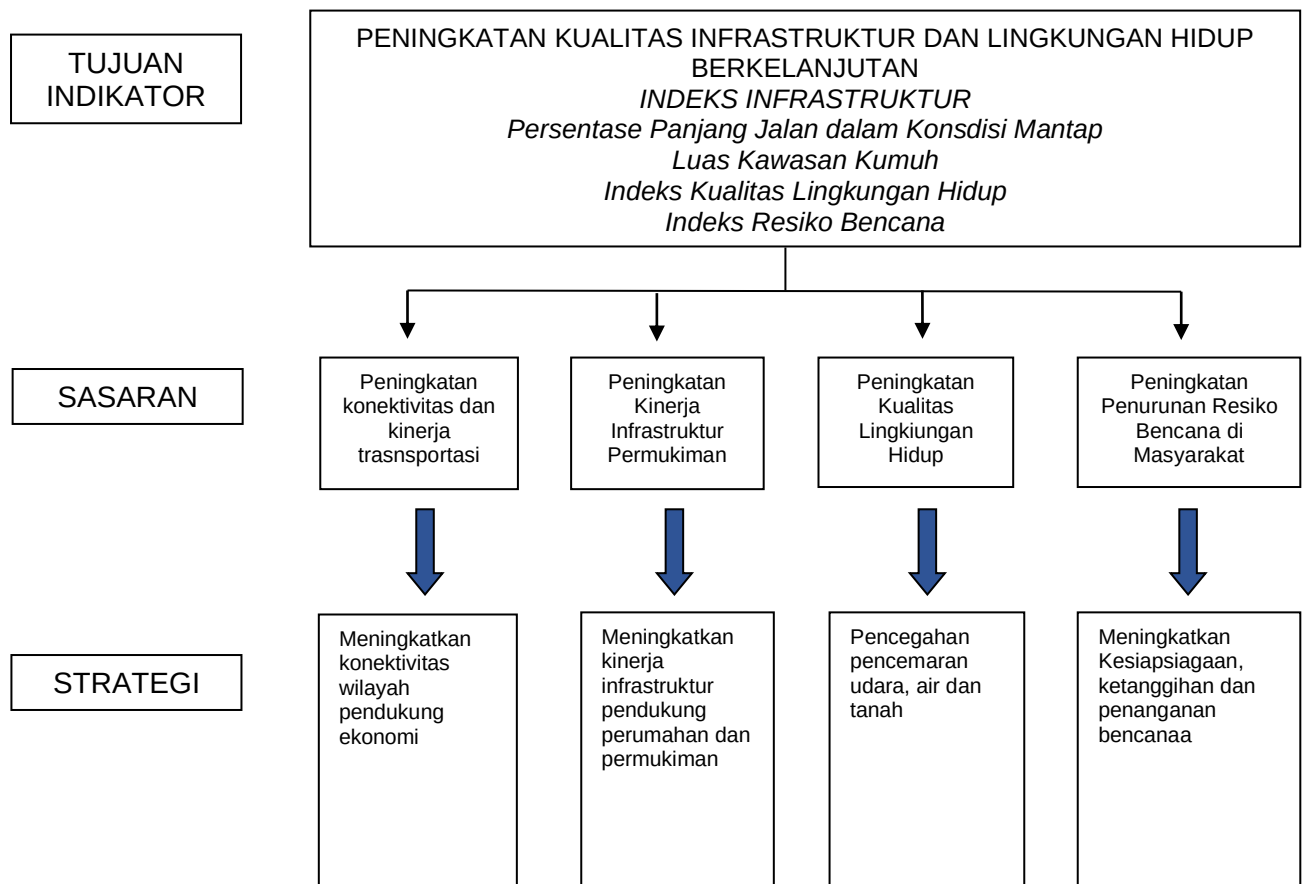
2022, perekonomian Sumatera Utara mulai bangkit digambarkan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08 %. Hal ini disebabkan peningkatan sektor perekonomian Kabupaten Langkat dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Pencapaian tujuan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading berikut ini:



3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Percepatan pembangunan infrastruktur masih menjadi Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Langkat dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi Masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada satu

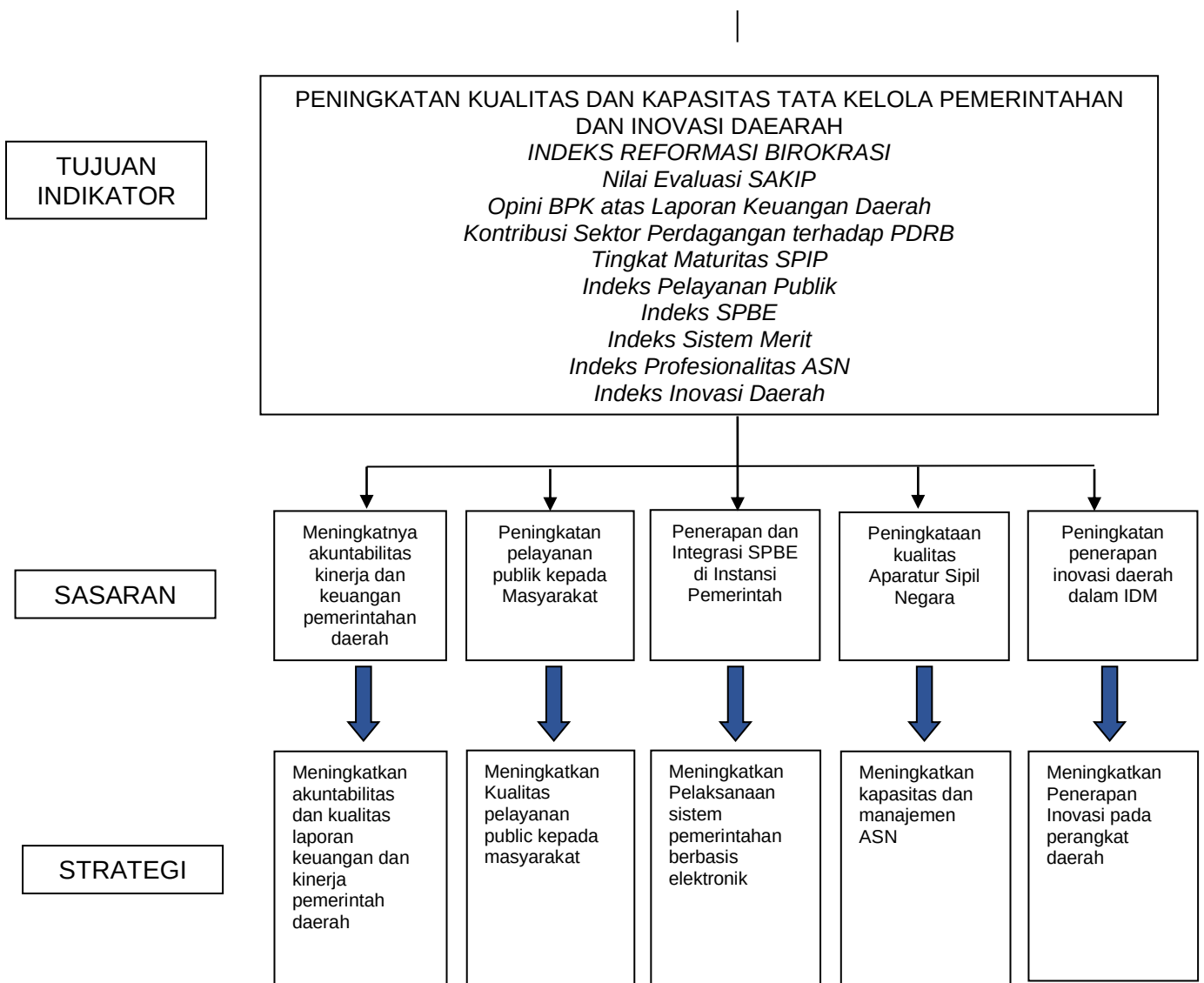
aspek saja, tetapi memperhatikan semua aspek baik dari Hulu sampai dengan ke Hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dapat dilihat pada cascading berikut ini:



4. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah

Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan

Good Governance tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Pencapaian tujuan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan cascading sebagaimana berikut ini :



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program prioritas ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat 2025-2026 merancang strategi pembangunan secara komprehensif mencakup aspek kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan dan kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan.

Pada aspek peningkatan kualitas dan daya saing pembangunan manusia, strategi diarahkan untuk menopang pembangunan di sektor Pendidikan, dan Kesehatan di samping itu juga sektor keluarga, gender, serta menjaga pertumbuhan penduduk. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat atau Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan dirancang strategi dengan fokus pembangunan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan akan dirancang strategi dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas layanan dan derajat Kesehatan masyarakat. Terkait pembangunan gender strategi yang akan dipakai akan berfokus pada peningkatan kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pembentukan etos kemandirian dan pemenuhan hak dasar. Sedangkan pada aspek pengendalian laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pengguna kontrasepsi serta penguatan keluarga untuk mencegah pernikahan usia remaja.

Pada aspek ketahanan ekonomi, strategi yang akan dibangun diarahkan untuk menyukseskan peningkatan pertumbuhan ekonomi

berbagai sektor, penurunan kemiskinan dan pemerataan pendapatan Masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pemerataan distribusi akan diterapkan strategi yang berfokus pada peningkatan kontribusi PDRB sektor unggulan (pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata), peningkatan investasi dan pendapatan daerah, pelatihan bagi tenaga kerja terutama tenaga kerja yang masuk data Masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, fasilitasi produk UMKM terhadap akses permodalan, peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi, pembukaan ruang-ruang pemasaran produk UMKM/IKM unggulan, serta peningkatan status desa berdasarkan IDM melalui pemberdayaan Masyarakat serta peningkatan kualitas BUMDES.

Sementara pada aspek pembangunan infrastruktur, strategi diarahkan pada pemenuhan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta pemenuhan layanan dasar. Fokus pembangunannya akan mencakup bidang infrastruktur ke-PU-an, perhubungan, perumahan, permukiman, penataan ruang, lingkungan hidup serta kebencanaan. Fokus pembangunan infrastruktur ke-PU-an diaplikasikan melalui strategi peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan, serta restorasi sistem drainase dan sungai untuk mengurangi dampak banjir serta pemenuhan akses layanan dasar akses air minum/bersih dan akses sanitasi. Di sektor perhubungan strategi yang akan diterapkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung jalan terutama di ruas jalan Kabupaten. Di sektor perumahan, permukiman strategi yang akan digunakan adalah penataan luas kawasan kumuh, pemenuhan PSU pada kawasan perumahan dan permukiman, pengurangan jumlah RTLH, serta penanganan Rumah Layak Huni bagi korban bencana. Untuk sektor penataan ruang strategi yang akan diterapkan mencakup evaluasi penataan dan pemanfaatan ruang untuk lingkungan hijau berkelanjutan serta peningkatan kualitas tata ruang Kabupaten berkelanjutan. Terakhir di sektor lingkungan hidup strategi yang akan digunakannya adalah penurunan beban pencemaran

lingkungan, beban limbah domestik, peningkatan kapasitas ruang terbuka hijau, dan optimalisasi layanan persampahan dengan mendorong Kerjasama antar daerah, swasta dan masyarakat.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, strategi diarahkan pertama-tama untuk menysasar peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah. Dalam konteks ini strategi yang dibangun Kabupaten Langkat akan fokus pada peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penerapan teknologi/transformasi digital. Sasaran berikutnya adalah peningkatan kualitas manajemen dan kinerja pemerintahan. Strategi yang dikembangkan di sektor ini akan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, kolaborasi dan kerja sama antar daerah, pengendalian proses pembangunan, transparansi kinerja dan promosi aparatur berbasis sistem.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari 20245 sampai dengan 2026. Pada saat yang sama arah kebijakan juga dirancang untuk menjadi payung bagi pencapaian prioritas pembangunan dalam RPD Kabupaten Langkat 2025-2026 pada aspek peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan, dan peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi daerah

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Terwujudnya Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber daya manusia melalui arah kebijakan pada RPD 2025-2026 Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata, Penguatan Pembangunan gender dan ketahanan keluarga serta menjaga laju pertumbuhan penduduk.

Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas arah kebijakan RPD 20245-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian Kabupaten melalui sektor-sektor unggulan Kabupaten Langkat serta peningkatan investasi untuk dapat menciptakan lapangan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta peningkatan pemberdayaan Masyarakat desa untuk dapat meningkatkan indeks desa membangun.

Untuk mendukung pemenuhan tujuan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan melalui penguatan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar infrastruktur dan serta penguatan pencegahan kerusakan/pencemaran lingkungan.

Dan Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah arah kebijakan RPD 2025-2026 adalah Penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas ASN, peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta penguatan inovasi daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan.

Secara lebih detil, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Langkat tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama sekolah	1. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan pendidikan secara meratadan terjangkau seluruh kalangan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas sekolah PAUD, SD dan SMP
			2. Meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat	Meningkatkan jenjang Pendidikan tenaga pendidik di satuan Pendidikan
				Meningkatkan mutu kurikulum Pendidikan yang terstandar
				Meningkatkan capaian SPM bidang pendidikan
				Meningkatkan minat baca masyarakat
				Meningkatkan pengelolaan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
				Pemerataan jumlah tenaga Pendidikan
			3. Peningkatan prestasi olahraga dan Pembangunan kuaalitas kepemudaan	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar
				Meningkatkan prestasi atlet Tingkat provinsi, nasional dan internasional
				Meningkat peran serta pemuda dalam menunjang keberhasilan Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Peningkatan aksesibilitis dan kualitas Kesehatan masyarakat	Penurunan angka kematian ibu dan bayi
				penurunan angka prevalensi stunting
				Peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas tenaga Kesehatan yang sesuai standar kompetensi
				Peningkatan Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan
				peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit
				Peningkatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi
				Peningkatan peserta KB aktif PUS pria dan wanita
				Peningkatan ketahanan keluarga untuk mengendalikan angka pernikahan dan kelahiran pada remaja
1.3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam Pembangunan serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan gender	Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan perencanaan penganggaran yang responsive gender	Peningkatan partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
				Implementasi perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG)
				Peningkatan SDM yang terlatih PPRG
			Peningkatan implementasi Kabupaten Layak anak di Kabupaten Langkat	Peningkatan capaian penilaian Kabupaten Layak Anak
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Kemiskinan 3. Gini Rasio		
2.1	Peningkatan PDRB sektor ekonomi unggulan (pertanian, perikanan, perdagangan dan industry)	Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutana terhadap PDRB	Peningkatan Produksi pertanian dan perikanan	Peningkatan skill petani dalam pengelolaan pertanian dan perikanan
				Peningkatan diversifikasi produk pertanian
				Pengembangan kawasan pertanian terpadu
				Peningkatan Pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit (tanaman, ternak dan ikan)
		Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	Peningkatan pemasaran produk ke pasar ekspor	Fasilitasi/pendampingan produk unggulan masuk ke pasar ekspor
				Pengembangan industry berbasis sumber daya lokal

		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Peningkatan sektor perdagangan	Perencanaan pembangunan kawasan industri Pangkalan Susu
				Rehabilitasi/revitalisasi Pasar
				Peningkatan aktifitas perdagangan lokal
				Peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM
				Penmbinaan dan peningkatan manajemen koperasi
2.2	Peningkatan Investasi dan Pendapatan Daerah	1. Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN/PMA	Peningkatan iklim investasi yang optimal	1. Penyusunan Peta Investasi Daerah
		2. Pertumbuhan PAD		2. Implementasi Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada investor
				3. Penyusunan dokumen IPRO
				4. Peningkatan pelayanan dan kemudahan proses perizinan dan non perizinan
				5. Peta/Kajian potensi PAD Kabupaten Langkat
				6. Penyelesaian piutang pajak daerah dengan belkerjasama dengan pihak APH
2.3	Peninkatan daya saing pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (makan minum dan jasa lainnua)	Peningkatan nilai tambah dan daya Tarik destinasi pariwisata	Penigkatan kualitas 4A pada objek wisata
				Peningkatan promosi pariwisata diversifikasi atraksi dan keunggulan wisata
				Peningkatan kualitas dan daya Tarik desa wisata
				Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata
				Peningkatan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata
				Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata
2.4	Peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja	Tingkat pengangguran terbuka	peningkatan kualitas dan kompetensi pelatihan	Peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
				penyusunan rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
				Peningkatan kualitas tenaga pelatih/instruktur
				Peningkatan sarana dan prasaarana pada BLK
			Peningkatan akses tenaga kerja terhadap dunia usaha	Penyediaan informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan dunia usaha
				Peningkatan Kerjasama dengan Perusahaan swasta/BUMN/BUMD dalam penempatan tenaga kerja

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2.5	Peningkatan Status Desa	Peningkatan status desa berdasarkan IDM	Peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun	Percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi data Masyarakat miskin dan miskin ekterem Kabupaten by name by address by NIK
				Peningkatan jumlah PMKS yang tertangani
				Peningkatan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
				Peningkatan kapasitas dan kulaitas BUMDES
				Peningkatan ketahanan keluarga dalam penanggulangan bahaya narkoba
				Peningkatan implementasi Desa Bersinar dan penurunan desa rawan narkoba
				Peningkatan penegakan perda secara optimal
3.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur		
3.1	Peningkatan konektivitas dan kinerja transportasi	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	Peningkatan konektivitaas wilayah pendukung ekomomi	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap
				Peningkatan jembatan dalam kondisi baik
				Peningkatan fasilitas pendukung jalan di ruas jalan kabupaten
3.2	Peningkatan kinerja infrasrtuktur permukim	Luas Kawasan Kumuh	Peningkatan kinerja infrasrtuktur pendukung perumahan dan permukiman	Peningkatan penataan kawasan kumuh
				Peningkatan penanganan RTLH
				Peningkatan korban bencana untuk mendapatkan Rumah Layak Huni
				Peningkatan ketersediaan PSU di lingkungan permahan dan permukiman
				Peningkatan pelayanan permsamlahan
				Penyediaan infrastruktur pelaynan dasar air bersih dan sanitasi
3.3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran udara, air dan tutupan lahan	Peningkatan kesadaran peran Masyarakat untuk menjaga lingkungan
				Peningkatan pemahaman terhadap kegiatan Pembangunan pro lingkungan
				Peningkatan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penyelesaian permasalahan pengaduan terkait lingkungan hidup
3.4	Peningkatan penurunan resiko bencana di Masyarakat	Indeks Resiko Bencana	Peningkatan kesiapsiagaan, ketangguhan dan penanganan bencana	Peningkatan budaya kesadaran tanggap bencana di Masyarakat Peningkatan kesiapsiagaan bencana Penyusunan dokumen Kajian rawan bencana peringatan dini dan respon cepat penanganan darurat bencana alam dan non alam Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Peningkatan dan percepatan penanganan kebakaran
4.	Peninkatan kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan dan inovasi daerah	Indeks reformasi birokrasi		
4.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Opini BPK atas Laporan Keuangan Tingkat maturitas SPIP	Peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah	Peningkatan kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Peningkatan kualitas dan akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan Peningkatan kemampuan ASN dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras dan berkualitas Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4.2	Peningkatan pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat	Penyusunan SOP dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat Peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatansarana dan prasarana pelayanan kepada Masyarakat Peningkatan kapasitas pelayanan publik melalui pendampingan terhadap aparatur pemerintahan pengampu pelayanan publik

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.3	Penerapan dan Integrasi SPBE di Instansi Pemerintah	Indeks SPBE	Meningkatkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penyusunan dan penetapan regulasi keamanan informasi daerah
				Peningkatan kompetensi SDM pengelola SPBE
				Meningkatkan audit dan supervise SPBE
				Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana keamanan informasi
4.4	Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks sistem merit	Peningkatan Kapasitas & Manajemen Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
		Indeks Profesionlitas ASN		Peningkatan Kualifikasi Jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara
				Peningkatan Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi
4.5	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam Pembangunan	Indeks inovasi daerah	Peningkatan penerapan inovasi pada perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Meningkatkan diseminasi inovasi
				Peningkatan kapasitas ASN tentang inovasi
				Penerapan program 1 opd 1 inovasi per tahun

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

Program prioritas disusun selaras sekaligus untuk mendukung pemenuhan target tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Langkat 2025-2026. Program pembangunan daerah jumlahnya sangat banyak, namun tidak semua program akan menjadi prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Di samping itu, ketersediaan anggaran pembangunan Kabupaten Langkat juga memiliki keterbatasan, maka tidak semua program pemerintahan daerah akan menjadi prioritas dalam rangka pelaksanaan RPD 2025-2026.

Penentuan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan program prioritas:

a. Peningkatan kualitas dan mutu Pendidikan, melalui :

- Pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi dan pemenuhan fasilitas pendukung pelaksanaan belajar mengajar PAUD, SD, dan SMP pada 23 Kecamatan.
- Peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui pelatihan berbasis kompetensi
- Peningkatan mutu kurikulum Pendidikan sesuai dengan standar nasional
- Peningkatan minat baca pelajar melalui kegiatan pelajar masuk perpustakaan
- Pengembangan e-library pada 23 kecamatan serta penambahan koleksi e-book digital
- Pembinaan dan peningkatan atlet berprestasi tingkat provinsi, Nasional dan Internasional.
- Pembinaan pemuda pelopor kabupaten Langkat

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui :

- Penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui pendampingan oleh bidan desa (1 bidan 10 ibu hamil/bayi).
- Penurunan angka prevalensi stunting melalui penyediaan makanan pendamping ASI dengan kandungan pangan lokal, Penguatan implementasi BAAS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting), Pembentukan Dapur Stunting di 100 Desa Lokus Stunting, edukasi dan kampanye pencegahan stunting terutama bagi remaja.
- Peningkatan Masyarakat yang mendapatkan jaminan Kesehatan

- Peningkatan layanan rumah sakit umum Tanjung Pura melalui peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang memiliki kompetensi.
 - Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada 23 Kecamatan.
 - Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, melalui Pembentukan kampung KB, Peningkatan Cakupan peserta KB aktif melalui edukasi serta pelayanan keliling, Pelaksanaan Sosialisasi Masyarakat Peduli KB berkualitas, Peningkatan kapasitas kader KB se Kabupaten Langkat.
- c. Peningkatan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan serta Perlindungan Anak, melalui:
- Peningkatan peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga
 - Peningkatan Pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender
 - Peningkatan capaian Layak Anak.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang berkualitas

- a. Peningkatan PDRB sektor ekonomi unggulan (pertanian, perikanan, perdagangan dan industry), melalui:
- Peningkatan Produksi komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan melalui pemberian bantuan benih/bibit dan sarana dan prasarana serta pendampingan secara intensif di lapangan oleh penyuluh pertanian dan perikanan.
 - Fasilitasi keikutsertaan petani dan nelayan dengan AUP dan AUP.
 - Fasilitasi dan pendampingan pelaku UMKM dan IKM masuk ke pasar digital.

- Fasilitasi dan penampungan produk unggulan masuk ke pasar ekspor.

b. Peningkatan nilai investasi dan PAD, melalui:

- Pelaksanaan Ground Breaking IPRO Taman Safari dan Pariwisata Bukit Lawang Tangkahan.
- Implementasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi investor
- Peta Potensi Investasi
- Membuat Kajian potensi PAD
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

c. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, melalui:

- Peningkatan digitalisasi Promosi Pariwisata
- Pengembangan travel pattern BULANGTALAM (Bukit Lawang-Tangkahan-besilam).
- Pelaksanaan even pariwisata di Objek wisata unggulan

d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh Pasar Kerja, melalui:

- Peningkatan kualitas BLK dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dari kebutuhan pasar kerja
- Penguatan Kerjasama dengan dunia usaha terkait informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan Sistem Informasi pasar kerja.

e. Peningkatan Status Desa, melalui:

- Percepatan verifikasi dan validasi data Masyarakat Miskin dan Miskin ekstrem

- Peningkatan kapasitas dan kualitas BUMDES
- Peningkatan ketahanan keluarga dalam penanggulangan narkoba
- Optimalisasi kampung besinar (bersih narkoba)

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, melalui:

a. Peningkatan konektivitas dan kinerja transportasi melalui:

- Pembangunan jalan, jembatan serta infrastruktur pendukung jalan terutama yang mendukung akses pendidikan, Kesehatan, ekonomi untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
- Penyediaan infrastruktur layanan dasar Air bersih dan sanitasi terutama bagi keluarga stunting dan Masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
- Penyediaan fasilitas transportasi jalan pada ruas jalan kabupaten
- Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi genangan air

b. Peningkatan Kinerja Infrastruktur Permukiman, melalui:

- Pengurangan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh
- Penanganan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh
- Penanganan rumah layak huni bagi korban bencana
- Penanganan jaringan irigasi dengan produktivitas tinggi

c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui:

- Peningkatan pengawasan terhadap kerusakan/ pencemaran air, udara dan tutupan lahan

- Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.

d. Peningkatan penurunan resiko bencana, melalui:

- Peningkatan penguatan Masyarakat sadar dan Tangguh bencana
- Peningkatan peringatan dini dan respon cepat penanganan darurat bencana alam dan non alam.
- Penyusunan peta kajian resiko bencana

4. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah, melalui:

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, melalui:

- Peningkatan capaian evaluasi SAKIP melalui pelaksanaan coaching klinik SAKIP terintegrasi.
- Peningkatan kualitas laporan keuangan dan asset dalam rangka pencaapaian WTP atas OPINI BPK
- Peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan
- Peningkatan kualifikasi ASN melalui pemberian beasiswa bagi ASN
- Peningkatan inovasi daerah melalui program 1 opd 1 inovasi pertahun serta pelaksanaan inovasi award.

TABEL 6.2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

No	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH						
					2025		2026		KONDISI AKHIR								
					K	RP	K	RP	K	RP							
I	Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,33	74,95	#REF!	75,26	#REF!	75,26	#REF!							
I.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,73	8,82	211.313.448.784	9	222.432.008.079	9	433.745.456.863							
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,27	13,41		13,48		13,48								
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	27,17	27,26	202.322.393.654		212.438.513.337		414.760.906.991	Dinas Pendidikan						
		APS 5-6 Tahun	%	72,34	100		27,29		27,29								
		APK SD/ sederajat	%	106,38	108,39		100		100								
		APK SMP/ Sederajat	%	97,45	99,15		110,41		110,41								
		APS 7-15 Tahun	%	97,95	100												
		Rata-rata Kompetensi Literasi SD Berdasarkan Asessmen Nasional	%	45,48	53,12												
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SD Berdasarkan Asessmen Nasional	%	35,5	39,87												
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asessmen Nasional	%	55,26	64,32												
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asessmen Nasional	%	50,5	56,46												
		Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV/S1	%	n/a	100												
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	n/a	100												
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	n/a	100												
		Indeks Iklim Keamanan SD	%	80,94	91,56												
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD	%	80	87,47												
		Indeks Inklusivitas SD	%	69,74	79,04												
		Indeks Iklim Keamanan SMP	%	76,25	85,64												
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	%	70,15	76,78												
		Indeks Inklusivitas SMP	%	71,06	80,36												
		2	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpus		N/A		30			1.668.313.793	30	1.710.021.638	30	3.378.335.431	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan organisasi pemuda	%		0,65		40			1.793.635.446	42	1.845.635.446	42	3.639.270.892	Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah wirausaha muda yang dibina	Orang			60	40	42	42										

		Jumlah Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	pelajar	45	46		48		48		
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi pemuda dalam kejuaraan olahraga	Medali/Juara	158	100	5.529.105.891	105	6.437.837.658	105	11.966.943.549	
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Unit	425	8		8		8		
I.2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,14	74,44	171.950.291.854	74,59	177.958.571.476	74,59	349.908.863.330	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian ibu	jiwa	8	7	130.578.713.414	6	134.991.604.476	6	265.570.317.890	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kematian bayi	jiwa	16	15		14		14		
		Cakupan UHC	%	80	90		95		95		
		Cakupan Posbindu	%	72,56	75		78		78		
		Persentasi UCI	%	73,6	80		85		85		
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	15,5	14,5		14		14		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,6	13		12		12		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	%	9,2	9		8,9		8,9		
		Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Pustu & jaringannya) dalam kondisi baik	%	85	87		90		90		
		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	90	100		100		100		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Puskesmas yang memiliki dokter minimal 3 orang	%	69	80	2.376.938.440	90	2.597.938.000	90	4.974.876.440	
		Persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	%	94	95		96		96		
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah sarana distribusi obat yang memenuhi persyaratan	Sarana	40	80	993.990.000	100	1.038.069.000	100	2.032.059.000	
		Sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) memiliki Nomor SPP-IRT dan memenuhi persyaratan lainnya	Sarana	60	90		110		110		
		Jumlah HATRA (Penyehat Tradisional) yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	Sarana	3	15		20		20		
		UMOT memenuhi persyaratan dan sesuai dengan standart	Sarana	1	5		5		5		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Keluarga yang Menerapkan PHBS	%	70	75	2.015.000.000	80	2.205.000.000	80	4.220.000.000	
		Pelayanan anak sekolah	%	90	95		97		97		
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM Rumah Sakit	%	85	90	22.806.200.000	93	23.946.510.000	93	46.752.710.000	RSU Tanjung Pura
		Presentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	78,75	80		82		82		

6	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,52	0,45	3.301.550.000	0,41	3.301.550.000	0,41	6.603.100.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak
		TFR (total fertility rate)	%	2,49	2,45		2,4		2,4		
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	%	72	72,5	5.087.700.000	73	5.087.700.000	73	10.175.400.000	
		ASFR 15 - 19	jiwa	22,7	22,65		22,5		22,5		
		Unmeet Need	poin	n/a	22,2		22		22		
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase kelompok UPPPKS/UPPKA yang aktif	%	n/a	10	4.790.200.000	15	4.790.200.000	15	9.580.400.000	
		Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan	kelompok	n/a	25		30		30		
I.3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan anak	Indeks pembangunan gender	Nilai	89,03	89,13	2.723.500.000	89,19	2.809.500.000	89,19	5.533.000.000	
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran responsif gender (ARG) pada Belanja APBD diluar gaji	%	n/a	0,5	1.029.000.000	0,6	1.075.000.000	0,6	2.104.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang mendapatkan pemahaman peningkatan kualitas hidup keluarga	%	n/a	100	583.500.000	100	613.500.000	100	1.197.000.000	
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase penyediaan data gender dan anak ter up date	%	n/a	100	337.500.000	100	337.500.000	100	675.000.000	
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai evaluasi kabupaten layak anak	%	n/a	500	773.500.000	598	783.500.000	598	1.557.000.000	
II.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,69	4,8-5,0	49.147.688.407	5,0-5,2	46.828.764.311	5,0-5,2	128.909.589.603	
		Tingkat Kemiskinan	Persen	9,23	9,0-8,8		98,8-8,6		98,8-8,6		
		Indeks Gini	Nilai	0,257	0,25		0,24		0,24		
II.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	%	41,34	42,74	16.312.379.108	43,2	17.967.336.255	43,2	57.939.652.448	
		Kontribusi PDRB sektor Perdagangan	%	10,77	11,25		11,41		11,41		
		Kontribusi PDRB sektor industri	%	15,47	16,02		16,2		16,2		
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi komoditi Padi	Ton	279.736	294.847	1.965.000.000	299.958	2.161.500.000	299.958	4.126.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah produksi komoditi Jagung	Ton	97.052	98.552		99.052		99.052		
		Jumlah produksi komoditi Kelapa Sawit	Ton	747.255	769.673		777.370		777.370		
		Jumlah produksi daging	Ton	8.896	9.565		9.776		9.776		
		Jumlah produksi telur	Ton	14.624	20.578		22.795		22.795		
		Jumlah populasi ternak sapi	ekor	228.814	237.889		242.647		242.647		
		Jumlah populasi ternak domba	ekor	359.013	369.783		373.481		373.481		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan sawah yang diairi jaringan irigasi usaha tani	ha	6.552	100	1.900.000.000	100	2.090.000.000	100	3.990.000.000	
		Jumlah jalan usaha pertanian yang dibangun	unit	75	3		5		5		
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kejadian Penyakit Ternak yang ditangani	%	100	100	420.500.000	100	462.550.000	100	883.050.000	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang meningkat kelasnya	%	24,63	9,85	761.000.000	9,85	837.100.000	9,85	1.598.100.000	

5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	34.268,20	39.802,07	929.478.290	41.792,17	1.022.426.119	41.792,17	15.327.878.550	Dinas Perikanan dan Kelautan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	8,00	25,00		25,00		25,00		
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	30.252,28	35.422,15	1.243.190.000	37.193,26	1.367.509.000	37.193,26	8.023.750.000	
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	5	25		60		60		
7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	477,29	517,29	634.600.200	548,79	698.060.220	548,79	2.660.000.000	
		Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	%	0	2		2		2		
		Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk Perikanan	%	0	2		3		3		
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Volume Ketersediaan Pangan Strategis	Ton	146.244	154.144	1.450.000.000	156.816	1.595.000.000	156.816	3.045.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Nilai	93,4	96,4	525.000.000	97,9	577.500.000	97,9	1.102.500.000	
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan di kelola secara modern	unit	unit	1 unit	2.199.921.693	1 unit	2.322.319.343	1 unit	6.522.241.036	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	5 Produk	15	1.044.066.985	15	1.396.500.000	15	3.146.500.000	
12	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran Poduk dalam negeri	%	100	100	260.164.640	100	267.969.579	100	528.134.219	
13	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1 Sentra	2	1.679.457.300	3	1.847.403.030	3	4.364.499.679	
		Jumlah Kebijakan Perindustrian	Ranperda	1	1		2		2		
14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi	%	100	100	100.000.000	100	121.498.964	100	221.498.964	
15	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang naik kelas	%	n/a	25	500.000.000	30	500.000.000	30	1.000.000.000	Dinas Koperasi
16	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha	%	n/a	45	700.000.000	46	700.000.000	46	1.400.000.000	
II.2	Meningkatnya investasi dan pendapatan asli daerah	Pertumbuhan PMDN/PMA	%	-48,97	1,5	7.264.805.052	1,7	7.878.092.407	1,7	15.142.897.459	
		Pertumbuhan PAD	%	20,61	10		10		10		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen/ Regulasi investasi	dokumen	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Promosi Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	%	-44	1,5	550.000.000	1,7	550.000.000	1,7	1.100.000.000	
3	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi	%	n/a	40	150.000.000	70	150.000.000	70	300.000.000	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat pertumbuhan PAD	%	20	5	6.214.805.052	6	6.828.092.407	6	13.042.897.459	Badan Pendapatan Daerah
II.3	Meningkatnya Daya saing pariwisata	Kontribusi PDRB sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya)	%	2,16	2,58	4.969.723.797	2,8	5.466.696.177	2,8	17.803.400.774	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	2	2	1.837.152.000	2	2.020.867.200	2	11.225.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		Jumlah Desa Wisata berkembang	desa	25	27		29		29		
		Jumlah Kamar Tercatat	kamar	803	820		850		850		
2	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	76.514	104.119	1.055.000.000	106.200	1.160.500.000	106.200	2.215.500.000	
		Jumlah Sistem Informasi Kepariwisataan	unit	4	5		6		6		
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	hak kekayaan	0	5	825.000.000	10	907.500.000	10	1.732.500.000	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	orang	1.071	1.100	898.124.375	1.150	987.936.812	1.150	1.886.061.187	
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pembinaan/pelatihan	%	27	27	150.712.280	30	165.783.508	30	316.495.788	
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar budaya yang ditetapkan atau dikelola	cagar budaya	10	15	203.735.142	20	224.108.657	20	427.843.799	
II.4	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,88	6,0-5,7	2.312.600.000	5,7-5,5	2.545.000.000	5,7-5,5	6.763.819.000	
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang sudah bekerja/mandiri	%	34,82	38,46	1.155.600.000	40	1.200.000.000	40	3.198.600.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58	60	557.000.000	61	565.000.000	61	2.185.219.000	
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja	dokumen	0	0	-	1	180.000.000	1	180.000.000	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha	Orang	n/a	75	600.000.000	75	600.000.000	75	1.200.000.000	Dinas Koperasi
II.5	Meningkatnya status Desa	Persentase peningkatan status desa menurut IDM	%	10,8	11	18.288.180.450	12	12.971.639.473	12	31.259.819.923	
1	Program Penataan Desa	Jumlah Desa yang mengalaami peningkatan status IDM	%	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan	%	100	100		100		100		
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Antar Desa	Mou	1	2	250.000.000	2	250.000.000	2	500.000.000	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa baik	%	60	70	9.835.000.000	80	3.935.000.000	80	13.770.000.000	
		jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	1	2		2		2		
4	Program Pemberdayan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	%	73	78	2.350.000.000	85	2.550.000.000	85	4.900.000.000	
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak terlantar yang dibina	Anak	n/a	30	1.114.739.000	30	1.170.475.950	30	2.285.214.950,00	Dinas Sosial
		Jumlah fakir miskin yang menerima bantuan	KK	n/a	65.000		65.000		65.000		
6	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Orsos yang berkualitas	%	n/a	100%	959.061.450	100%	1.007.014.523	100%	1.966.075.972,50	

7	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	%	100%	100%	1.975.380.000	100%	2.074.149.000	100%	4.049.529.000,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan pemberian layanan kepada PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA luar panti sosial	%	100%	100%		100%		100%		
		Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	100	100		100		100		
8	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Kasus Pekat	Persen	100	100	504.000.000	100	575.000.000	100	1.079.000.000	
9	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Persentasi Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	100	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	2.310.000.000	
III.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Nilai	n/a	0,65	234.913.082.267	0,67	248.757.883.236	0,67	483.670.965.503	
III.1	Meningkatnya konektivitas dan kinerja transportasi	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	%	63,23	68,93	158.062.032.259	71,83	167.839.097.125	71,83	325.901.129.384	
		Persentase fasilitas transportasi di ruas jalan Kabupaten	%	N/A	55		60		60		
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	%	63,23	68,93	120.582.767.187	71,83	126.611.905.546	71,83	247.194.672.733	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	71,02	74,21		76,25		76,25		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase v/c rasio di jalan Kabupaten	persen	76	73	37.479.265.072	70	41.227.191.579	70	78.706.456.651,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	unit	6000	1000		1000		1000		
		Marka	unit	0	10		10		10		
		Rambu	unit	500	300		300		300		
		Persentase LPJU	%	100	100		100		100		
III.2	Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	Luas kawasan kumuh	Ha	97,81	94,91	56.546.442.063	93,43	59.675.014.166	93,43	116.221.456.229	
1	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak layak Huni yang tertangani di Kawasan Kumuh	%	66,57	11,66	8.875.000.000	11,66	8.425.000.000	11,66	17.300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani di luar Kawasan Kumuh	persen	92,17	1,70	8.000.000.000	1,70	8.000.000.000	1,70	16.000.000.000	
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang didukung PSU	meter	337.248	35.100	31.450.000.000	35.100	34.595.000.000	35.100	66.045.000.000	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	86,69	87,09	4.132.800.000	87,29	4.339.440.000	87,29	8.472.240.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	85,05	85,28	641.392.063	85,48	673.461.666	85,48	1.314.853.729	

6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	75,51	76,51	1.097.250.000	77,51	1.152.112.500	77,51	2.249.362.500	
7	Program Pengelolaan Persampahan	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah	%	88,49	100	2.350.000.000	100	2.490.000.000	100	4.840.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
III.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Nilai	72,96	73,35	12.402.140.945	73,7	12.666.910.945	73,7	25.069.051.890	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	100	1.262.050.000	100	1.297.000.000	100	2.559.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pembinaan dan Pengawas Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	Meningkatnya Ketaatan Penganggunjawab Usaha Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	100	268.325.000	100	278.720.000	100	547.045.000	
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Teridentifikasinya Masalah Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	%	100	100	208.450.000	100	231.250.000	100	439.700.000	
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	59.00	65.00	1.550.815.945	65.00	1.570.815.945	65.00	3.121.631.890	
		Indeks Kualitas Udara	Poin	56.32	59.00		59.00		59.00		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	62.00	67.00		67.00		67.00		
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR	%	22	43	8.482.500.000	65	8.069.125.000	65	16.551.625.000	
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau terpelihara, dan sarana prasarana ruang terbuka hijau	%	100	100	600.000.000	100	800.000.000	100	1.400.000.000	
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah keikutsertaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata, Jumlah Penghargaan Perorangan/ Kelompok kalpataru, penyuluhan LH	%	100	100	30.000.000	100	420.000.000	100	450.000.000	
III.4	Penuruna resiko kejadian bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai	142,62	139,32	7.902.467.000	138,22	8.576.861.000	138,22	16.479.328.000	
1	Program Penanggulangan bencana	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	2.966.719.000	100	3.165.950.000	100	6.132.669.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100		100		100		
		Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100		100		100		
2	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100%	100%	78.620.000	100%	82.551.000	100%	161.171.000,00	Dinas Sosial

		Persentase SDM TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang terlatih	%		100%		100%		100%		
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah yang terkena bencana yang tertangani	Unit	n/a	5	175.000.000	7	245.000.000	7	420.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase cakupan layanan Kejadian Kebakaran	Persen (%)	100	100	4.682.128.000	100	5.083.360.000	100	9.765.488.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penanggulangan bencana kebakaran sesuai layanan WMK	Persen (%)	70	75		80		80		
IV.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	550.527.992.732	BB	601.560.335.771	BB	1.076.949.615.899	
IV.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	BB	535.579.431.432	BB	585.891.240.341	BB	1.046.331.959.169	
		Opini BPK	Opini	WDP	WTP		WTP		WTP		
		Maturitas SPIP	Level	3	3		3		3		
1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	%	100	100	3.342.500.000	100	6.772.674.590	100	10.115.174.590	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	dokumen	5	5	1.479.500.000	5	1.627.449.995	5	3.106.949.995	
		Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam	dokumen	5	5		5		5		
		Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	dokumen	5	5		5		5		
3	Program Pengelolaan Keuangan	Persentase pengesahan anggaran tepat waktu	%	100	100	418.285.490.902	100	460.114.039.992	100	878.399.530.894	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase laporan keuangan sesuai standar dan aturan	%	100	100		100		100		
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan aset sesuai standar dan standar	%	100	100	1.686.649.210	100	1.855.314.131	100	3.541.963.341	
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	585.146.420	3	643.661.062	3	1.228.807.482	Inspektorat
6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan (Keuangan Negara/ Daerah dan Administrasi)	Persen(%)	84	88	1.467.306.940	89	1.614.037.634	89	3.081.344.574	
7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	585.146.420	3	643.661.062	3	1.228.807.482	Sekretariat Daerah
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	64.570.438.460	B	67.798.960.383	B	57.230.686.239	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC	CC	43.577.253.080	BB	44.821.441.492,00	BB	88.398.694.572	Sekretariat DPRD
		Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	Persen	100	100		100		100		
		Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Persen	100	100		100		100		

IV.2	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,82 (B)	4,01 (A-)	4.569.200.000	4,11 (A-)	4.920.200.000	4,11 (A-)	9.489.400.000	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Melakukan Perekam Data Kependudukan	%	99,28	99,40	550.000.000	99,45	577.500.000	99,45	1.127.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	95,97	96,00		96,10		96,10		
2	Program Pencatatan Sipil	Rata- Rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	3	2	720.000.000	2	756.000.000	2	1.476.000.000	
		Persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	%	93,9	99,40		99,00		99,00		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	%	95,97	96,00		96,10		96,10		
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	93,63	93,70	300.000.000	94	340.000.000	94	640.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	90.000.000	55	90.000.000	55	180.000.000	Kecamatan Bahorok
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	125.000.000	55	125.000.000	55	250.000.000	Kecamatan Salapian
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	97.35	95	255.000.000	100	280.000.000	100	535.000.000	Kecamatan Kuala
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	65%	70%	150.000.000	75%	175.000.000	75%	325.000.000	Kecamatan Selesai
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	150.000.000	55	150.000.000	55	300.000.000	Kecamatan Sei Bingei
10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	245.200.000	100	245.200.000	100	490.400.000	Kecamatan Binjai
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	81,97	81,99	129.000.000	82	129.000.000	82	258.000.000	Kecamatan Stabat
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	120.000.000	100	125.000.000	100	245.000.000	Kecamatan Wampu
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	70.000.000	100	97.000.000	100	167.000.000	Kecamatan Secanggang
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100.000.000	100	120.000.000	100	220.000.000	Kecamatan Hinaí
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	165.000.000	100	170.000.000	100	335.000.000	Kecamatan Tanjung Pura
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	80	85	125.000.000	85	125.000.000	85	250.000.000	Kecamatan Gebang

17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	30.000.000	100	40.000.000	100	70.000.000	Kecamatan Babalan	
18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	80	85	90.000.000	85	99.000.000	85	189.000.000	Kecamatan Brandan Barat	
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	370.000.000	100	460.000.000	100	830.000.000	Kecamaatan Sei Lapan	
20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Pangkalan Susu	
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	84,54	90	60.000.000	100	69.500.000	100	129.500.000	Kecamatan Besitang	
22	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	100.000.000	60	100.000.000	60	200.000.000	Kecamatan Padang Tualang	
23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	55.000.000	55	55.000.000	55	110.000.000	Kecamatan Sawit Seberang	
24	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	150.000.000	55	150.000.000	55	300.000.000	Kecamatan Batang Serangan	
25	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	125.000.000	100	125.000.000	100	250.000.000	Kecamatan Kutambaru	
26	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	55	60	20.000.000	75	22.000.000	75	42.000.000	Kecamatan Pematang Jaya	
27	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	125.000.000	60	145.000.000	60	270.000.000	Kecamatan Sirapit	
IV.3	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan berbasis SPBE	Indeks SPBE	Nilai	3,02	3,3	4.898.721.300	3,4	5.199.191.430	3,4	10.097.912.730		
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jumlah aplikasi umum SPBE yang digunakan	%	100	100	3.338.889.000	100	3.523.375.900	100	6.862.264.900	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah yang sudah terintegrasi	%	85	85		100		100			
2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengaman informasi dilingkup pemeritah kabupaten/kota	%	100	100	624.879.300	100	687.367.230	100	1.312.246.530		
		Persentase layanan berbasis elektroknik yang memiliki sistem keamanan	%	100	100		100		100			
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kabupaten/kota yang terintegrasi	%	100	100	934.953.000	100	988.448.300	100	1.923.401.300		
IV.4	Meningkatnya kualitas ASN	Sistem Merit	Nilai	165	200	4.395.000.000	250	4.395.000.000	250	8.790.000.000		
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,88	70		75		75			

1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Usulan Formasi Calon ASN yang sesuai dengan Pengadaan Calon ASN	%	90	95	4.395.000.000	95	4.395.000.000	95	8.790.000.000	Badan Kepegawaiaan Daerah
		Persentase nilai IP ASN OPD dengan Nilai Sedang		0	60		70		70		
		Nilai SKM	predikat	baik (89,62)	baik (90,00)		baik (91,00)		baik (91,00)		
		Persentase ASN yang memiliki nilai kinerja baik	%	81,35	83		85		85		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat PIM Tahunan	orang		10	800.000.000	15	1.000.000.000	15	1.800.000.000	
IV.5	Meningkatnya impelementasi inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	Predikat	inovatif	inovatif	1.085.640.000	Sangat Inovatif	1.154.704.000	Sangat Inovatif	2.240.344.000	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	1.085.640.000	100	1.154.704.000	100	2.240.344.000	Bappeda
		Persentase OPD yang memiliki inovasi	%	9,26	18,52		22,22		22,22		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Langkat berisi program-program baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPD ini maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran Pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPD ini.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Uraian	PAGU ANGGARAN	
	2025	2026
BELANJA	2.688.001.063.303,00	2.803.252.433.376,00
Belanja Operasi	1.894.578.626.963,00	1.932.929.693.269,00
Belanja Pegawai	1.185.617.067.260,00	1.197.473.237.932,00
Belanja Barang dan Jasa	606.724.530.748,00	630.719.426.382,00
Belanja Hibah	89.760.193.955,00	89.760.193.955,00
Belanja Bantuan Sosial	12.476.835.000,00	14.976.835.000,00
Belanja Modal	396.311.657.645,00	435.942.823.410,00
Belanja Tidak Terduga	24.419.398.673,00	24.419.398.673,00
Belanja Transfer	372.691.380.022,00	409.960.518.024,00

7.2 Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif

Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025-2026 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7-2
Indikasi Rencana Program per urusan Pemerintah Kabupaten Langkat disertai Paagu Indikatif

No	BIDANG URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	2025		2026		KONDISI AKHIR RPJMD		PERANGKAT DAERAH
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN PENDIDIKAN					870.669.884.361		880.786.004.044		1.751.455.888.405	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	B	B	668.347.490.707	B	668.347.490.707	B	1.336.694.981.414	Dinas Pendidikan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	97,41		202.322.393.654		212.438.513.337		414.760.906.991	
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	27,17	27,26		27,29		27,29		
		APS 5-6 Tahun	%	72,34	100		100		100		
		APK SD/ sederajat	%	106,38	108,39		110,41		110,41		
		APK SMP/ Sederajat	%	97,45	99,15				100,89		
		APS 7-15 Tahun	%	97,95	100		100		100		
		Rata-rata Kompetensi Literasi SD Berdasarkan Asessmen Nasional	%	45,48	53,12		55,66		55,66		
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SD Berdasarkan Asessmen Nasional	%	35,5	39,87		41,32		41,32		
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asessmen Nasional	%	55,26	64,32		67,34		67,34		
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asessmen Nasional	%	50,5	56,46		58,44		58,44		
		Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV/S1	%	n/a	100		100		100		
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	n/a	100		100		100		
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	n/a	100		100		100		
		Indeks Iklim Keamanan SD	%	80,94	91,56		95,1		95,1		
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD	%	80	87,47		89,96		89,96		
		Indeks Inklusivitas SD	%	69,74	79,04		82,14		82,14		
		Indeks Iklim Keamanan SMP	%	76,25	85,64		88,87		88,87		
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	%	70,15	76,78		78,99		78,99		
		Indeks Inklusivitas SMP	%	71,06	80,36	83,46	83,46				
2	URUSAN KESEHATAN					354.127.355.138		357.718.611.670		711.845.966.808	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	218.162.713.284	100	216.886.000.194	100	435.048.713.478	Dinas Kesehatan
		Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Nilai	B	B		B		B		
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian ibu	jiwa	8	7	130.578.713.414	6	134.991.604.476	6	265.570.317.890	
		Jumlah Kematian bayi	jiwa	16	15		14		14		
		Cakupan UHC	%	80	90		95		95		
		Cakupan Posbindu	%	72,56	75		78		78		
		Persentasi UCI	%	73,6	80		85		85		
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	15,5	14,5		14		14		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,6	13		12		12		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	%	9,2	9		8,9		8,9		
		Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Pustu & jaringannya) dalam kondisi baik	%	85	87		90		90		
		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	90	100		100		100		

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Puskesmas yang memiliki dokter minimal 3 orang	%	69	80	2.376.938.440	90	2.597.938.000	90	4.974.876.440		
		Persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	%	94	95		96		96			
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah sarana distribusi obat yang memenuhi persyaratan	Sarana	40	80	993.990.000	100	1.038.069.000	180	2.084.859.000		
		Sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) memiliki Nomor SPP-IRT dan memenuhi persyaratan lainnya	Sarana	60	90		110		200			
		Jumlah HATRA (Penyehat Tradisional) yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	Sarana	3	15		20		35			
		UMOT memenuhi persyaratan dan sesuai dengan standart	Sarana	1	5		5		10			
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Keluarga yang Menerapkan PHBS	%	70	75	2.015.000.000	80	2.205.000.000	80	4.220.000.000		
		Pelayanan anak sekolah	%	90	95		97		97			
RSU TANJUNG PURA						65.856.773.322		68.507.111.988		134.363.885.310		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM Rumah Sakit	%	85	90	22.806.200.000	93	23.946.510.000	93	46.752.710.000	RSU Tanjung Pura	
		Presentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	78,75	80		82		82			
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP	NILAI	B	B	43.050.573.322	B	44.560.601.988	B	87.611.175.310		
		Cakupan PelayananAdministrasi Perkantoran	%	95,58	100		100		100			
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						219.879.301.780		229.925.766.869		449.805.068.649		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PelayananAdministrasi Perkantoran	100	100	100	26.020.656.627	100	27.321.689.458	100	53.342.346.085	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataar Ruang	
		Nilai Implementasi AKIP	B	B	B		B		B			
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,2	78	35.689.867.500	80	37.474.360.875	80	73.164.228.375		
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	86,69	87,09	4.132.800.000	87,29	4.339.440.000	87,29	8.472.240.000		
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	%	60	65	1.050.000.000	70	1.102.500.000	70	2.152.500.000		
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	85,05	85,28	641.392.063	85,48	673.461.666	85,48	1.314.853.729		
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	75,51	76,51	1.097.250.000	77,51	1.152.112.500	77,51	2.249.362.500		
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	%	80	85	19.982.068.403	90	20.981.171.824	90	40.963.240.227		
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR	%	22	43	8.482.500.000	65	8.069.125.000	65	16.551.625.000		
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetens	%	100	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	4.400.000.000		
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	%	63,23	68,93	120.582.767.187	71,83	126.611.905.546	71,83	247.194.672.733		
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	71,02	74,21		76,25		76,25			

4	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					53.436.876.500,00		56.384.173.175,00		109.821.049.675	
1	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak layak Huni yang tertangani di Kawasan Kumuh	%	66,57	11,66	8.875.000.000	11,66	8.425.000.000	43,26	17.300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani di luar Kawasan Kumuh	persen	92,17	1,70	8.000.000.000	1,70	8.000.000.000	88,78	16.000.000.000	
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang didukung PSU	meter	312.346	35.100	31.450.000.000	35.100	34.595.000.000	267.048	66.045.000.000	
4	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah yang terkena bencana yang tertangani	Unit	n/a	5	175.000.000	7	245.000.000	12	420.000.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	4.936.876.500	100	5.119.173.175	100	10.056.049.675	
		Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	NILAI	B	B		B		B		
5	SATPOL PP					19.246.256.000		20.850.488.000		40.096.744.000	
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen (%)	100	100	4.682.128.000	100	5.160.128.000	100	9.842.256.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	Persen (%)	100	100		100		100		
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase cakupan layanan Kejadian Kebakaran	Persen (%)	100	100	4.682.128.000	100	5.083.360.000	100	9.765.488.000	
		Persentase penanggulangan bencana kebakaran sesuai layanan WMK	Persen (%)	70	75		80		80		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	9.882.000.000	B	10.607.000.000	B	20.489.000.000	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		
6	BPBD					11.594.369.000		13.000.785.200		24.595.154.200	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	C	B	8.627.650.000	B	9.834.835.200	B	18.462.485.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		
2	Program Penanggulangan bencana	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	2.966.719.000	100	3.165.950.000	100	6.132.669.000	
		Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100		100		100		
		Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100		100		100		
7	SOSIAL					9.189.663.951,00		9.649.147.148,50		18.838.811.100	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	NILAI	B	B	4.906.099.501,00	B	5.151.404.476	B	10.057.503.977,00	Dinas Sosial
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah anak terlantar yang dibina	ANAK	n/a	30	1.114.739.000	30	1.170.475.950	60	2.285.214.950,00	
		Jumlah fakir miskin yang menerima bantuan	KK	n/a	65.000		65.000		130.000		
3	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Orsos yang berkualitas	%	n/a	100%	959.061.450	100%	1.007.014.523	100%	1.966.075.972,50	
4	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	%	100%	100%	1.975.380.000	100%	2.074.149.000	100%	4.049.529.000,00	
		Cakupan pemberian layanan kepada PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA luar panti sosial	%	100%	100%		100%		100%		
		Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	100	100		100		200		

5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100%	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	51.250.000,00	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang telah dikelola	Makam	3 TMP	3 TMP	130.764.000	3 TMP	137.302.200	3 TMP	268.066.200,00	
7	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100%	100%	78.620.000	100%	82.551.000	100%	161.171.000,00	
		Persentase SDM TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang terlihat	%		100%		100%				
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR											
1	URUSAN KETENAGAKERJAAN					9.100.574.200		9.538.489.700		18.639.063.900	Dinas Ketenagakerjaan
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang sudah bekerja/mandiri	%	34,82	38,46	1.155.600.000	40	1.200.000.000	40	3.198.600.000	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58	60	557.000.000	61	565.000.000	61	2.185.219.000	
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Tertangani dengan PB	%	28	34	2.162.199.200	36	2.263.199.200	36	5.336.398.400	
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja	dokumen	0	0	5.225.775.000	1	180.000.000	1	180.000.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	NILAI	B	B		BB	5.330.290.500	BB	10.556.065.500	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		
	PEREMPUAN DAN ANAK					5.084.000.000		5.247.000.000		10.331.000.000	
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran responsif gender (ARG) pada Belanja APBD diluar gaji	%	n/a	0,05	1.029.000.000	0,06	1.075.000.000	0,06	2.104.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan, Anak
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	%	100	100	1.249.000.000	100	1.326.000.000	100	2.575.000.000	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang mendapatkan pemahaman peningkatan kualitas hidup keluarga	%	n/a	100	583.500.000	100	613.500.000	100	1.197.000.000	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase penyediaan data gender dan anak ter up date	%	n/a	100	337.500.000	100	337.500.000	100	675.000.000	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai evaluasi kabupaten layak anak	%	n/a	500	773.500.000	598	783.500.000	598	1.557.000.000	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilayani	%	100	100	1.111.500.000	100	1.111.500.000	100	2.223.000.000	
2	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					22.495.375.000		22.495.375.000		44.990.750.000	
1	Program Pengendalian Penduduk	TFR (total fertility rate)	%	2,49	2,45	3.301.550.000	2,4	3.301.550.000	2,4	6.603.100.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan, Anak
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	%	72	72,5	5.087.700.000	73	5.087.700.000	73	10.175.400.000	
		ASFR 15 - 19 jiwa		22,7	22,65		22,5		22,5		
		Unmeet Need poin		n/a	22,2		22		22		
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase kelompok UPPPKS/UPPKA yang aktif	%	n/a	10	4.790.200.000	15	4.790.200.000	15	9.580.400.000	
4		Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan	kelompok	n/a	25		30		30		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	NILAI	B	B	9.315.925.000	BB	9.315.925.000	BB	18.631.850.000	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		
3	PANGAN					27.275.000.000		30.002.500.000		57.277.500.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	BB	24.850.000.000	BB	27.335.000.000	BB	52.185.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Volume Ketersediaan Pangan Strategis	Ton	146.244	154.144	1.450.000.000	156.816	1.595.000.000	156.816	3.045.000.000	
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Nilai	93,4	96,4	525.000.000	97,9	577.500.000	97,90	1.102.500.000	
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa yang rentan rawan pangan	%	14,44%	1,80%	450.000.000	2,16%	495.000.000	0,02	945.000.000	

4	LINGKUNGAN HIDUP					25.088.749.863		25.921.894.863		51.010.644.726	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	100	1.262.050.000	100	1.297.000.000	100	2.559.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pembinaan dan Pengawas Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Ketaatan Penganggunjawab Usaha Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	100	268.325.000	100	278.720.000	100	547.045.000	
3	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait kearifan Lokal dan Hak MHA dengan PPLH	%	100	100	175.000.000	100	190.000.000	100	365.000.000	
4	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Teridentifikasinya Masalah Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	%	100	100	208.450.000	100	231.250.000	100	439.700.000	
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	59,00	65,00	1.550.815.945	65,00	1.570.815.945	65,00	3.121.631.890	
		Indeks Kualitas Udara	Poin	56,32	59,00		59,00		59,00		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	62,00	67,00		67,00		67,00		
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau terpelihara, dan sarana prasarana ruang terbuka hijau	%	100	100	600.000.000	100	800.000.000	100	1.400.000.000	
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah keikutsertaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata, Jumlah Penghargaan Perorangan/ Kelompok Kaligatari, penyuluhan LH	%	100	100	30.000.000	100	420.000.000	100	450.000.000	
8	Program Pengelolaan Persampahan	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah	%	88,49	100	2.350.000.000	100	2.490.000.000	100	4.840.000.000	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	18.644.108.918	100	18.644.108.918	100	37.288.217.836	
		Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	NILAI	B	B		B		B		
5	PENCATATAN SIPIL					13.545.047.720		13.648.547.720		27.193.595.440	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Melakukan Perekaman Data Kependudukan	%	99,28	99,40	550.000.000	99,45	577.500.000	99,45	1.127.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	95,97	96,00		96,10		96,10		
2	Program Pencatatan Sipil	Rata- Rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	3	2	720.000.000	2	756.000.000	2	1.476.000.000	
		Persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	%	93,9	99,40		99,00		99,00		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	%	95,97	96,00		96,10		96,10		
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Database Kependudukan Skala Kabupaten	%	-	1	500.000.000	1	525.000.000	1	1.025.000.000	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	%	100	100	300.000.000	100	315.000.000	100	615.000.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	11.475.047.720	100	11.475.047.720	100	22.950.095.440	
		Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	NILAI	B	BB		BB		B		
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					21.206.437.577		15.938.581.335		37.145.018.912	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	8.571.437.577	100	9.003.581.335	100	17.575.018.912	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	NILAI	B	B		BB		BB		
		Nilai SKM Kaupaten Langkat	Baik/Cukup/Rendah	n/a	baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
		Standar Kepatuhan Pelayanan Publik	Tinggi/Sedang/Rendah	Tinggi/Zona Hijau	Tinggi/Zona Hijau		Tinggi/Zona Hijau		Tinggi/Zona Hijau		
2	Program Penataan Desa	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan status IDM	%	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	
		Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan	%	100	100		100		100		
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Antar Desa	Mou	1	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa baik	%	60	70	9.835.000.000	80	3.935.000.000	80	13.770.000.000	

		jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	1	2		2		4	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	%	73	78	2.350.000.000	85	2.550.000.000	85	4.900.000.000
7	PERHUBUNGAN					Rp 50.563.652.917		Rp 55.282.191.579		Rp 105.845.844.496
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase v/c rasio di jalan Kabupaten	%	76	73	Rp 37.479.265.072	70	Rp 41.227.191.579	70	Rp 78.706.456.651,00
		Persentase Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	unit	6000	1000		1000			
		Marka	unit	0	10		10			
		Rambu	unit	500	300		300			
		Persentase LPJU	%	100	100		100			
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Fasilitas Dermaga dalam kondisi Baik	unit	n/a	4	Rp 1.830.000.000	4	Rp 1.840.000.000	4	Rp 420.000.000,00
3	Program Pengelolaan Perkretaapiian	Dokumen Rencana Induk Kereta Api	dokumen	0	1	Rp 2.000.000.000	1	Rp 2.000.000.000	2	Rp 4.000.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	Rp 9.254.387.845	BB	Rp 10.215.000.000	BB	Rp 19.469.387.845
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100			
8	KOMUNIKASI DAN INFORMASI					Rp 15.851.839.893		Rp 16.899.884.972		Rp 32.751.724.865
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	%	100	100	Rp 6.335.860.000	100	Rp 5.964.000.000	100	Rp 12.299.860.000
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jumlah aplikasi umum SPBE yang digunakan	%	100	100	Rp 3.338.889.000	100	Rp 3.523.375.900	100	Rp 6.862.264.900
		Persentase jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah yang sudah terintegrasi	%	85	85		100		100	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Rp 6.177.090.893	100	Rp 7.412.509.072	100	Rp 13.589.599.965
		Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	NILAI	B	B		B		B	
9	PERSANDIAN					Rp 624.879.300		Rp 687.367.230		Rp 1.312.246.530
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengaman informasi dilingkup pemeritah kabupaten/kota	%	100	100	Rp 624.879.300	100	Rp 687.367.230	100	1.312.246.530
		Persentase layanan berbasis elektronik yang memiliki sistem keamanan	%	100	100		100		100	
10	STATISTIK					Rp 934.953.000		Rp 988.448.300		Rp 1.923.401.300
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kabupaten/kota yang terintegrasi	%	100	100	Rp 934.953.000	100	Rp 988.448.300	100	1.923.401.300
11	URUSAN KOPERASI					Rp 7.883.857.421		Rp 8.317.243.163		Rp 16.201.100.584
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	C	B	Rp 4.333.857.421	B	Rp 4.767.243.163	B	Rp 9.101.100.584
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100	
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang undangan	%	n/a	40	Rp 800.000.000	45	Rp 800.000.000	45	Rp 1.600.000.000
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat	Unit	n/a	4	Rp 800.000.000	5	Rp 800.000.000	9	Rp 1.600.000.000
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang memilki SDM yang kompeten	%	n/a	60	Rp 150.000.000	70	Rp 150.000.000	70	Rp 300.000.000
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha	%	n/a	45	Rp 700.000.000	46	Rp 700.000.000	46	Rp 1.400.000.000
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha	Orang	n/a	75	Rp 600.000.000	75	Rp 600.000.000	150	Rp 1.200.000.000
7	Prooram Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang naik kelas	%	n/a	25	Rp 500.000.000	30	Rp 500.000.000	30	Rp 1.000.000.000

12	URUSAN PENANAMAN MODAL					Rp	7.466.740.000		Rp	7.540.000.000		Rp	15.006.740.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	B	BB	Rp	5.500.000.000	BB	Rp	5.500.000.000	BB	Rp	11.000.000.000	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Nilai	100			100			100			
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen/ Regulasi investasi	dokumen	1	1	Rp	350.000.000	1	Rp	350.000.000	1	Rp	700.000.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	%	-44	1,5	Rp	550.000.000	1,7	Rp	550.000.000	1,7	Rp	1.100.000.000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	93,63	93,70	Rp	300.000.000	94	Rp	340.000.000	94	Rp	640.000.000	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	%	30	50	Rp	616.740.000	70	Rp	650.000.000	70	Rp	1.266.740.000	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi	%	n/a	40	Rp	150.000.000	70	Rp	150.000.000	70	Rp	300.000.000	
13	PEMUDA DAN OLAHRAGA					Rp	13.313.741.337		Rp	14.683.473.104		Rp	27.997.214.441	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan organisasi pemuda	%	65	40	Rp	1.793.635.446	42	Rp	1.845.635.446	42	Rp	3.639.270.892	
		Jumlah wirausaha muda yang dibina	Orang	60	40			42			42			
		Jumlah Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	pelajar	45	46			48			48			
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi pemuda dalam kejuaraan olahraga	Medali/Juara	158	100	Rp	5.529.105.891	105	Rp	6.437.837.658	105	Rp	11.966.943.549	
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Unit	425	8			8			541			
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP	NILAI	B	B	Rp	5.991.000.000	B	Rp	6.400.000.000	B	Rp	12.391.000.000	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			
14	BUDAYA					Rp	7.723.805.752		Rp	8.733.219.935		Rp	16.457.025.687	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	B	BB	Rp	6.265.008.200	BB	Rp	7.128.542.627	BB	Rp	13.393.550.827	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi atau dikembangkan	Objek	20	30	Rp	546.537.080	40	Rp	601.190.788	40	Rp	1.147.727.868	
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pembinaan/pelatihan	%	27	27	Rp	150.712.280	30	Rp	165.783.508	30	Rp	316.495.788	
4	Program Pembinaan Sejarah	Dokumen/Media Informasi Sejarah yang tersedia	dokumen	10	12	Rp	157.107.050	15	Rp	172.817.755	15	Rp	329.924.805	
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar budaya yang ditetapkan atau dikelola	cagar budaya	10	15	Rp	203.735.142	20	Rp	224.108.657	20	Rp	427.843.799	
6	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum yang dikelola	museum	1	1	Rp	400.706.000	1	Rp	440.776.600	1	Rp	841.482.600	
15	PERPUSTAKAAN					Rp	1.668.313.793		Rp	1.710.021.638		Rp	3.378.335.431	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	PERPUSTAKAAN	N/A	30	Rp	1.668.313.793	30	Rp	1.710.021.638	30	Rp	3.378.335.431	
16	KEARSIPAN					Rp	935.091.660		Rp	6.764.539.555		Rp	7.699.631.215	
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Elektronik	%	N/A	100	Rp	372.386.945	100	Rp	381.696.619	100	Rp	754.083.564	
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dokumen/Arsip Daerah yang dapat diselamatkan	OPD	10	10	Rp	562.704.715	10	Rp	576.772.333	30	Rp	1.139.477.048	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP	NILAI	B	B	Rp	5.278.246.003	B	Rp	5.806.070.603	B	Rp	11.084.316.606	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			
URUSAN PILIHAN														
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					Rp	10.074.015.624		Rp	10.718.079.830		Rp	20.792.095.454	
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	34.268,20	39.802,07	Rp	929.478.290	41.792,17	Rp	1.022.426.119	81.594,24	Rp	15.327.878.550	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	8,00	25,00			25,00			50,00			
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	30.252,28	35.422,15	Rp	1.243.190.000	37.193,26	Rp	1.367.509.000	72.615,41	Rp	8.023.750.000	
		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	5	25			60			85			
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	477,29	517,29	Rp	634.600.200	548,79	Rp	698.060.220	1066,1	Rp	2.660.000.000	
		Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	%	0	2			2			4			
		Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk Perikanan	%	0	2			3			5			
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	90	Rp	7.266.747.134	100	Rp	7.630.084.491	100	Rp	11.225.000.000	

		Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	BB	B		B		B		
2	PARIWISATA					Rp 4.615.276.375		Rp 5.076.804.012		Rp 9.692.080.387	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	2	2	Rp 1.837.152.000	2	Rp 2.020.867.200	2	Rp 11.225.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah Desa Wisata berkembang	desa	25	27		29		29		
		Jumlah Kamar Tercatat	kamar	803	820		850		850		
2	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	76.514	104.119	Rp 1.055.000.000	106.200	Rp 1.160.500.000	106.200	Rp 2.215.500.000	
		Jumlah Sistem Informasi Kepariwisataaan	unit	4	5		6		6		
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	hak kekayaan	0	5	Rp 825.000.000	10	Rp 907.500.000	10	Rp 1.732.500.000	
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	orang	1.071	1.100	Rp 898.124.375	1.150	Rp 987.936.812	1.150	Rp 1.886.061.187	
3	URUSAN PERTANIAN					Rp 5.397.000.000		Rp 5.936.700.000		Rp 11.333.700.000	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi komoditi Padi	Ton	279.736	294.847	Rp 1.965.000.000	299.958	Rp 2.161.500.000	299.958	Rp 4.126.500.000	
		Jumlah produksi komoditi Jagung	Ton	97.052	98.552		99.052		99.052		
		Jumlah produksi komoditi Kelapa Sawit	Ton	747.255	769.673		777.370		777.370		
		Jumlah produksi daging	Ton	8.896	9.565		9.776		9.776		
		Jumlah produksi telur	Ton	14.624	20.578		22.795		22.795		
		Jumlah populasi ternak sapi	ekor	228.814	237.889		242.647		242.647		
		Jumlah populasi ternak domba	ekor	359.013	369.783		373.481		373.481		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan sawah yang diairi jaringan irigasi usaha tani	ha	6.552	100	Rp 1.900.000.000	100	Rp 2.090.000.000	100	Rp 3.990.000.000	
		Jumlah jalan usaha pertanian yang dibangun	unit	75	3		5		5		
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kejadian Penyakit Ternak yang ditangani	%	100	100	Rp 420.500.000	100	Rp 462.550.000	100	Rp 883.050.000	
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Pengendalian Serangan OPT/DPI	ha	348	535	Rp 350.500.000	585	Rp 385.550.000	585,00	Rp 736.050.000	
5	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang meningkat kelasnya	%	24,63	9,85	Rp 761.000.000	9,85	Rp 837.100.000	9,85	Rp 1.598.100.000	
4	PERDAGANGAN					Rp 12.424.592.079		Rp 13.177.992.807		Rp 25.602.584.886	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	Rp 7.686.256.987	100	Rp 7.896.225.686	100	Rp 15.582.482.672	
		Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Nilai	B(60-70)	B(60-70)		B(60-70)		B(60-70)		
2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	15	25	Rp 270.359.230	25	Rp 284.705.007	25	Rp 555.064.236	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan di kelola secara modern	unit	unit	1 unit	Rp 2.199.921.693	1 unit	Rp 2.322.319.343	2 unit	Rp 6.522.241.036	
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan okok	%	5	5	Rp 677.892.644	5	Rp 698.014.195	5	Rp 1.575.906.839	
5	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	5 Produk	15	Rp 1.044.066.985	15	Rp 1.396.500.000	15	Rp 3.146.500.000	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	15	20	Rp 285.929.900	25	Rp 312.258.997	25	Rp 598.188.897	
		Jumlah pasar tertib ukur	Pasar	3 Pasar	3 Pasar		4 Pasar		4 Pasar		
7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran Poduk dalam negeri	%	100	100	Rp 260.164.640	100	Rp 267.969.579	100	Rp 528.134.219	

5	PERINDUSTRIAN					Rp	1.873.455.228		Rp	2.065.719.860		Rp	3.939.175.088	
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1 Sentra	2	Rp	1.679.457.300	3	Rp	1.847.403.030	3	Rp	4.364.499.679	
		Jumlah Kebijakan Perindustrian	Ranperda	1	1			1			2			
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi	%	100	100	Rp	100.000.000	100	Rp	121.498.964	100	Rp	221.498.964	
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi Industri yang tersedia	%	48	100	Rp	93.997.928	100	Rp	96.817.866	100	Rp	190.815.794	
URUSAN PENUNJANG														
1	PERENCANAAN					Rp	13.557.849.624		Rp	17.914.343.272		Rp	31.472.192.896	
1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	%	100	100	Rp	3.342.500.000	100	Rp	6.772.674.590	100	Rp	10.115.174.590	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	dokumen	5	5	Rp	1.479.500.000	5	Rp	1.627.449.995	5	Rp	3.106.949.995	
		Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam	dokumen	5	5			5			5			
		Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	dokumen	5	5			5			5			
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	B	Rp	8.735.849.624	BB	Rp	9.514.218.687	BB			
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Rp	1.085.640.000		Rp	1.154.704.000		Rp	2.240.344.000	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	Rp	1.085.640.000	100	Rp	1.154.704.000	100	Rp	2.240.344.000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase OPD yang memiliki inovasi	%	9,26	18,52			22,22			22,22			
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					Rp	13.195.000.000		Rp	13.595.000.000		Rp	26.790.000.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	B	BB	Rp	8.000.000.000	BB	Rp	8.200.000.000	BB	Rp	16.200.000.000	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			
2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Usulan Formasi Calon ASN yang sesuai dengan Pengadaan Calon ASN	%	90	95	Rp	4.395.000.000	95	Rp	4.395.000.000	95	Rp	8.790.000.000	
		Persentase nilai IP ASN OPD dengan Nilai Sedang		0	60			70			70			
		Nilai SKM	predikat	baik (89,62)	baik (90,00)			baik (91,00)			baik (91,00)			
		Persentase ASN yang memiliki nilai kinerja baik	%	81,35	83			85			85			
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat PIM Pertama	orang		10	Rp	800.000.000	15	Rp	1.000.000.000	25	Rp	1.800.000.000	
4	URUSAN KEUANGAN													
	BPKAD					Rp	433.434.462.426		Rp	476.777.908.669		Rp	910.212.371.095	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	B	BB	Rp	13.462.322.314	BB	Rp	14.808.554.545	BB	Rp	28.270.876.859	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			
2	Program Pengelolaan Keuangan	Persentase pengesahan anggaran tepat waktu	%	100	100	Rp	418.285.490.902	100	Rp	460.114.039.992	100	Rp	878.399.530.894	
		Persentase laporan keuangan sesuai standar dan aturan	%	100	100			100			100			
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan aset sesuai standar dan standar	%	100	100	Rp	1.686.649.210	100	Rp	1.855.314.131	100	Rp	3.541.963.341	
	BAPENDA					Rp	33.426.548.968		Rp	35.465.227.516		Rp	68.891.776.484	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat pertumbuhan PAD	%	20	5	Rp	6.214.805.052	6	Rp	6.828.092.407		Rp	13.042.897.459	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	B	B	Rp	27.211.743.916	BB	Rp	28.637.135.109	BB	Rp	55.848.879.025	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			
FUNGSI LAINNYA														
1	SEKRETARIAT DAERAH					Rp	91.720.243.001			97.497.876.260		Rp	189.218.119.261	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	Rp	64.570.438.460	B		67.798.960.383	B		57.230.686.239	Sekretariat Daerah
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100			100			100			

2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan antar pemerintah daerah	MoU	15	15	Rp	23.911.431.341	15	26.165.705.357	15	26.165.705.357	
		Jumlah Festival, dan event keagamaan	Kegiatan	11	14			14		14		
		Cakupan peraturan kepala daerah yang dapat diakses secara online	%	100	100			100		100		
		Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat yang terbentuk	Unit	2	2			2		2		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase peningkatan harga barang pokok yang tersubsidi	%	80	100	Rp	3.238.373.200	100	3.533.210.520	100	3.533.210.520	
		Tervujudnya koordinasi pengembangan perekonomian daerah, SDA dan peningkatan kinerja BUMD	%	100	100			100		100		
		Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	%	100	100			100		100		
		Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tepat waktu	%	100	100			100		100		
2	SEKRETARIAT DPRD					Rp	90.730.853.673		94.175.222.117		Rp	184.906.075.790
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	%	100	100	Rp	47.153.600.593	100	49.353.780.625,00	100	96.507.381.218	Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	%	100	100			100		100		
		Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	%	100	100			100		100		
		Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	%	100	100			100		100		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC	CC	Rp	43.577.253.080	BB	44.821.441.492,00	BB	88.398.694.572	
		Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	Persen	100	100			100		100		
		Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Persen	100	100			100		100		
3	INSPEKTORAT					Rp	14.699.244.839		16.631.251.687		Rp	31.330.496.526
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen(%)	1	1	Rp	12.646.791.479	1	14.373.552.991	1	27.020.344.470	
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	68	68,5 (B)			69 (B)		69 (B)		
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan (Keuangan Negara/ Daerah dan Administrasi)	Persen(%)	84	88	Rp	1.467.306.940	89	1.614.037.634	89	3.081.344.574	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	Rp	585.146.420	3	643.661.062	3	1.228.807.482	
UNSUR KEWILAYAHAN												
1	BAHOROK						4.051.062.342		4.051.062.342		Rp	8.102.124.684
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	75	90		3.475.370.000	100	3.475.370.000	100	6.950.740.000	Kecamatan Bahorok
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	CC	B			B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55		90.000.000	55	90.000.000	55	180.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55		365.692.342	55	365.692.342	55	731.384.684	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55		100.000.000	55	100.000.000	55	200.000.000	
		Jumlah Festival dan Evant Keagamaan	%	3	100			100		100		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55		20.000.000	55	20.000.000	55	40.000.000	
2	SALAPIAN						3.969.670.928		4.302.138.021		Rp	8.271.808.949

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	75%	90%	3.324.670.928	100%	3.657.138.021	100%	6.981.808.949	Kecamatan Salapian
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	CC	B		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	125.000.000	55	125.000.000	55	250.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	400.000.000	55	400.000.000	55	800.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55	95.000.000	55	95.000.000	55	190.000.000	
		Jumlah Festival dan Evant Keagamaan	%	3	100		100		100		
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	25.000.000	55	25.000.000	55	50.000.000	
3	KUALA					5.881.253.757		6.416.379.132		Rp 12.297.632.889	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	75	90	4.601.253.757	100	5.061.379.132	100	9.662.632.889	Kecamatan Kuala
		Nilai Implementasi AKIP	NILAI	C	CC		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	97.35	95	255.000.000	100	280.000.000	100	535.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	800.000.000	100	850.000.000	100	1.650.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	92.48	90	200.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	1	4		5		5		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	99.98	100	25.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	
4	SELESAI					5.588.074.358		6.134.381.793		Rp 11.722.456.151	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Iplementasi AKIP	Nilai	B (60-70)	BB (70-80)	4.713.074.358	BB (70-80)	5.184.381.793	BB (70-80)	9.897.456.151	Kecamatan Selesai
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	83	88		90		90		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	65%	70%	150.000.000	75%	175.000.000	75%	325.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	65%	75%	504.000.000	80%	554.000.000	80%	1.058.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Festifal dan Event Keagamaan	Kegiatan	3	3	176.000.000	3	176.000.000	3	352.000.000	
		Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	50%	50%		70%		70%		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	98%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	90.000.000	

5	SEI BINGEI					5.336.194.161		5.819.370.000		Rp	11.155.564.161	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	75%	90%	4.636.194.161	100%	5.114.370.000	100%		9.750.564.161	Kecamatan Sei Bingei
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	CC	B		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	150.000.000	55	150.000.000	55		300.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	400.000.000	55	400.000.000	55		800.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55	125.000.000	55	130.000.000	55		255.000.000	
		Jumlah Festival dan Evant Keagamaan	%	3	100		100		100			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	25.000.000	55	25.000.000	55		50.000.000	
6	BINJAI					5.137.980.000		5.137.980.000		Rp	10.275.960.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	4.106.780.000	100%	4.106.780.000	100%		8.213.560.000	Kecamatan Binjai
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	245.200.000	100	245.200.000	100		490.400.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	586.000.000	100	586.000.000	100		1.172.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	170.000.000	100	170.000.000	100		340.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100		60.000.000	
7	STABAT					11.762.096.724		12.517.658.397		Rp	24.279.755.121	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	82 %	83 %	9.239.096.724	84 %	9.994.658.397	84 %		19.233.755.121	Kecamatan Stabat
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	CC	B		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	81,97	81,99	129.000.000	82	129.000.000	82		258.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100%	100%	2.196.000.000	100%	2.196.000.000	100%		4.392.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	1	2	90.000.000	2	90.000.000	2		180.000.000	
		Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	88 %	89 %		90 %		90 %			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD	%	90%	92%	108.000.000	93%	108.000.000	93%		216.000.000	
8	WAMPU					5.050.083.026		5.533.091.329		Rp	10.583.174.355	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90	4.380.083.026	100	4.818.091.329	100		9.198.174.355	Kecamatan Wampu
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	120.000.000	100	125.000.000	100		245.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100		800.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	125.000.000	100	165.000.000	100		290.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100		50.000.000	

9	SECANGGANG					4.478.120.600		4.946.820.600		Rp	9.424.941.200	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	3.933.120.600	100	4.321.820.600	100		8.254.941.200	Kecamatan Secanggang
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	70.000.000	100	97.000.000	100		167.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	365.000.000	100	388.000.000	100		753.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	90.000.000	100	110.000.000	100		200.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	20.000.000	100	30.000.000	100		50.000.000	
10	HINAI					4.557.325.338		4.960.557.872		Rp	9.517.883.211	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	3.832.325.338	100%	4.215.557.872	100%		8.047.883.211	Kecamatan Hinaí
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100.000.000	100	120.000.000	100		220.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100		800.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	200.000.000	100	200.000.000	100		400.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100		50.000.000	
11	TANJUNG PURA					5.167.330.400		6.223.925.266		Rp	11.391.255.666	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	4.386.330.400	100%	5.270.925.266	100%		9.657.255.666	Kecamatan Tanjung Pura
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	165.000.000	100	170.000.000	100		335.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	446.000.000	100	561.000.000	100		1.007.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	125.000.000	100	157.000.000	100		282.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5			
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	45.000.000	100	65.000.000	100		110.000.000	
12	GEBANG					4.056.406.530		4.543.047.183		Rp	8.599.453.713	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	75%	100	3.356.406.530	100	3.692.047.183	100		7.048.453.713	Kecamatan Gebang
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	CC	B		B		B			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	80	85	125.000.000	85	125.000.000	85		250.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100		900.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100		200.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	4	4		4		4			
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan Dana Desa	%	100	100	25.000.000	25000000	176.000.000	100		201.000.000	

13	BABALAN					7.623.828.479		8.233.371.368		Rp 15.857.199.847	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	5.445.428.898	100	5.989.971.787	100	11.435.400.685	Kecamatan Babalan
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	30.000.000	100	40.000.000	100	70.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	1.963.399.581	100	1.963.399.581	100	3.926.799.162	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	170.000.000	100	220.000.000	100	390.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	4	4		4		4		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	15.000.000	100	20.000.000	100	35.000.000	
14	BRANDAN BARAT					4.762.000.000		5.238.200.000		Rp 10.000.200.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	75%	100	3.655.000.000	100	4.020.500.000	100	7.675.500.000	Kecamatan Brandan Barat
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	CC	B		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	80	85	90000000	85	99.000.000	85	1.684.200.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	802.000.000	100	882.200.000	100	304.500.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	100	100	145.000.000	100	159.500.000	100	304.500.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	4	4		4		4		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan Dana Desa	%	100	100	70.000.000	100	77.000.000	100	147.000.000	
15	SEI LEPAN					9.191.662.311		9.918.340.374		Rp 19.110.002.685	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	5.986.780.632	100%	6.585.458.695	100%	12.572.239.327	Kecamatan Sei Lapan
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	370.000.000	100	460.000.000	100	830.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	2.554.881.679	100	2.554.881.679	100	5.109.763.358	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	250.000.000	100	288.000.000	100	538.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	
16	PANGKALAN SUSU					5.700.265.465		6.207.292.011		Rp 11.907.557.476	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	4.610.265.465	100%	5.071.292.011	100%	9.681.557.476	Kecamatan Pangkalan Susu
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	820.000.000	100	846.000.000	100	1.666.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100.000.000	100	120.000.000	100	220.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000	

17	BESITANG				5.822.000.000		6.267.600.000		Rp	12.089.600.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	87,28%	93%	4.265.000.000	100%	4.551.600.000	100%	8.816.600.000	Kecamatan Besitang
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	84,54	90	60.000.000	100	69.500.000	100	129.500.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	1.176.000.000	100	1.298.000.000	100	2.474.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	140	150	306.000.000	170	330.000.000	170	636.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	15.000.000	100	18.500.000	100	33.500.000	
18	PADANG TUALANG				4.601.000.000		4.965.000.000		Rp	9.566.000.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	85,61	100	3.701.000.000	100	3.945.000.000	100	7.646.000.000	Kecamatan Padang Tualang
		Nilai Iplementasi AKIP	Nilai	C	B		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	100.000.000	60	100.000.000	60	200.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	50	55	500.000.000	60	500.000.000	60	1.000.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Festifal dan Event Keagamaan	Kegiatan	4	4	250.000.000	5	350.000.000	5	600.000.000	
		Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	50	55		60		60		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	50	55	50.000.000	60	70.000.000	60	120.000.000	
19	SAWIT SEBERANG				3.639.000.000		3.639.000.000		Rp	7.278.000.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	75%	90%	2.929.000.000	100%	2.929.000.000	100%	5.858.000.000	Kecamatan Sawit Seberang
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	CC	B		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	55.000.000	55	55.000.000	55	110.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	500.000.000	55	500.000.000	55	1.000.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55	135.000.000	55	135.000.000	55	270.000.000	
		Jumlah Festival dan Evant Keagamaan	%	3	100		100		100		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	20.000.000	55	20.000.000	55	40.000.000	
20	BATANG SERANGAN				4.066.157.287		4.403.273.015		Rp	8.469.430.302	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	75	90	3.371.157.287	100	3.708.273.015	100	7.079.430.302	Kecamatan Batang Serangan
		Nilai Evaluasi SAKIP	NILAI	CC	B		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	150.000.000	55	150.000.000	55	300.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	400.000.000	55	400.000.000	55	800.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	%	50	55	120.000.000	55	120.000.000	55	240.000.000	
		Jumlah Festival dan Evant Keagamaan	Kegiatan	3	100		100		100		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	25.000.000	55	25.000.000	55	50.000.000	

21	KUTAMBARU					2.622.083.323		2.825.191.655		Rp 5.447.274.977	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	85%	90%	2.031.083.323	100%	2.234.191.655	100%	4.265.274.977	Kecamatan Kutambaru
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	C	CC		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	125.000.000	100	125.000.000	100	250.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	366.000.000	100	366.000.000	100	732.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	
		Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4		5		5		
22	PEMATANG JAYA					2.184.608.876		2.373.369.764		Rp 4.557.978.640	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	80	100	1.974.608.876	100	2.142.369.764	100	4.116.978.640	Kecamatan Pematang Jaya
		Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	CC	B		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	55	60	20.000.000	75	22.000.000	75	42.000.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	80	95	25.000.000	95	27.500.000	95	52.500.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	75	95	150.000.000	95	165.000.000	95	315.000.000	
		Jumlah Festival dan Evant Keagamaan	%	3	100		100		100		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	75	85	15.000.000	95	16.500.000	95	31.500.000	
23	SIRAPIT					3.376.003.450				Rp 3.376.003.450	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	84,79	100%	3.096.003.450	100%	3.405.603.795	100%	6.501.607.245	Kecamatan Sirapit
		Nilai Implementasi AKIP	Nilai	n/a	B		B		B		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	70	85	125.000.000	95	145.000.000	95	270.000.000	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Festifal dan Event Keagamaan	Kegiatan	4	4	140.000.000	4	160.000.000	8	300.000.000	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	50	55		60		60		
		Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	15.000.000	100	25.000.000	100	40.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
1	KESBANGPOL					8.643.068.209		10.008.807.298		Rp 18.651.875.507	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Yang Melibat partisipasi Masyrakat	Persen	100	100	1.445.600.000	100	1.879.280.000	100	3.324.880.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Kegiatan Pendiidikan Partai Politik Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat/Partai Politik	Persen	100	100	2.336.863.633	100	3.037.922.722	100	5.374.786.355	
3	Program Pemerdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakatan	Cakupan Organisasi Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan	Persen	100	100	700.000.000	100	750.000.000	100	1.450.000.000	
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Kasus Pekat	Persen	100	100	504.000.000	100	575.000.000	100	1.079.000.000	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Persentasi Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	100	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	100	2.310.000.000	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP	NILAI	B	B	2.556.604.576	BB	2.556.604.576	B	5.113.209.152	
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada.

Tabel 8.1
Indikator Makro Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA		KONDISI AKHIR
				2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,33	74,95	75,26	75,26
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,69	4,8-5,0	5,0-5,2	5,0-5,2
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,23	9,0-8,8	8,8-8,6	8,8-8,6
4.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,88	6,0-5,7	5,7-5,5	5,7-5,5
5.	Indeks Gini	Nilai	0,257	0,25	0,24	0,24
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	n/a	7	8	8

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA		KONDISI AKHIR
				2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,86	72,63	73,39	73,39
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,68	8,93	9,01	9,01
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26	13,53	13,63	13,63
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,39	70,19	70,46	70,46
5	Indeks pembangunan gender	Nilai	89,03	89,13	89,19	89,19
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,52	0,45	0,41	0,41
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,69	4,8-5,0	5,0-5,2	5,0-5,2
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,49	9,2-9,0	9,0-8,8	9,0-8,8
9	Indeks Gini	Nilai	2,6	0,24	0,23	0,23
10	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	%	41,34	42,74	43,2	43,2
11	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	10,77	11,25	11,41	11,41
12	Kontribusi PDRB sektor industri	%	15,47	16,02	16,2	16,2
13	Pertumbuhan PMDN/PMA	%	-48,97	1,5	1,7	1,7
14	Pertumbuhan PAD	%	20,61	5	6	6
15	Kontribusi PDRB sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya)	%	2,16	2,58	2,8	2,8
16	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,88	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA		KONDISI AKHIR
				2025	2026	2026
17	Persentase peningkatan status desa menurut IDM	%	10,8	11	12	12
18	Indeks Infrastruktur	Nilai	n/a	0,65	0,67	0,67
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	n/a	7	8	8
20	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	%	63,23	68,93	71,83	71,83
21	Persentase fasilitas transportasi di ruas jalan Kabupaten	%	N/A	55	60	60
22	Luas kawasan kumuh	Ha	97,81	94,91	93,43	93,43
23	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	Nilai	72,96	73,35	73,7	73,7
24	Indeks Resiko Bencana	Nilai	142,62	139,32	138,22	138,22
25	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	B	B
26	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	BB	BB	BB
27	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP
28	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
29	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,82 (B)	4,01 (A-)	4,11 (A-)	4,11 (A-)
30	Indeks SPBE	Nilai	3,02	3,3	3,4	3,4
31	Sistem Merit	Nilai	165	200	250	250
32	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,88	70	75	75
33	Indeks Inovasi daerah	Predikat	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Langkat 2025-2026

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				2025	2026	KONDISI AKHIR
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,69	4,8-5,0	5,0-5,2	5,0-5,2
2	Inflasi	Persen	6,1	3-2,5	2,5-2,00	
4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,86	72,63	73,39	73,39
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,49	9,2-9,0	9,0-8,8	9,0-8,8
6	Indeks Gini	Nilai	2,6	0,24	0,23	0,23
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,68	8,93	9,01	9,01
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26	13,53	13,63	13,63
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,39	70,19	70,46	
10	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	15,5	14,5	14	14
11	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,6	13	12	12
12	Persentase peningkatan status desa menurut IDM	%	10,8	11	12	12
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,7	72	73	73
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,88	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0
15	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,82 (B)	4,01 (A-)	4,11 (A-)	4,11 (A-)
16	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Skor PPH Konsumsi	Nilai	93,4	96,4	97,9	97,90
18	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	%	41,34	42,74	43,2	43,2
19	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	10,77	11,25	11,41	11,41
20	Kontribusi PDRB sektor industri	%	15,47	16,02	16,2	16,2
21	Kontribusi PDRB sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya)	%	2,16	2,58	2,8	2,8
22	Indeks pembangunan gender	Nilai	89,03	89,13	89,19	89,19

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				2025	2026	KONDISI AKHIR
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Persentase desa yang mengalami peningkatan status IDM	%	10,8	11	12	12
2	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B	BB	BB	BB
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	B	B
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,52	0,45	0,41	0,41
5	Pertumbuhan PMDN/PMA	%	-48,97	1,5	1,7	1,7
6	Pertumbuhan PAD	%	20,61	5	6	6
7	Indeks Resiko Bencana	Nilai	142,62	139,32	138,22	138,22
8	Indeks Infrastruktur	Nilai	n/a	0,65	0,67	0,67
9	Indeks SPBE	Nilai	3,02	3,3	3,4	3,4
10	Indeks Inovasi daerah	Predikat	inovatif	inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
11	Sistem Merit	Nilai	165	200	250	250
12	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,88	70	75	75
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	URUSAN PENDIDIKAN					
1	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	27,17	27,26	27,29	27,29
2	APS 5-6 Tahun	%	72,34	100	100	100
3	APK SD/ sederajat	%	106,38	108,39	110,41	110,41
4	APK SMP/ Sederajat	%	97,45	99,15		100,89
5	APS 7-15 Tahun	%	97,95	100	100	100
6	Rata-rata Kompetensi Literasi SD Berdasarkan Asessmen Nasional	%	45,48	53,12	55,66	55,66
7	Rata-rata Kompetensi Numerasi SD Berdasarkan Asessmen Nasional	%	35,5	39,87	41,32	41,32
8	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asessmen Nasional	%	55,26	64,32	67,34	67,34
9	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asessmen Nasional	%	50,5	56,46	58,44	58,44
10	Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-IV/S1	%	n/a	100	100	100
11	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	n/a	100	100	100
12	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	n/a	100	100	100
13	Indeks Iklim Keamanan SD	%	80,94	91,56	95,1	95,1
14	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	%	80	87,47	89,96	89,96
15	Indeks Inklusivitas SD	%	69,74	79,04	82,14	82,14
16	Indeks Iklim Keamanan SMP	%	76,25	85,64	88,87	88,87
17	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	%	70,15	76,78	78,99	78,99
18	Indeks Inklusivitas SMP	%	71,06	80,36	83,46	83,46
2	URUSAN KESEHATAN					
1	Jumlah Kematian ibu	jiwa	8	7	6	6
2	Jumlah Kematian bayi	jiwa	16	15	14	14
3	Cakupan UHC	%	80	90	95	95
4	Cakupan Posbindu	%	72,56	75	78	78
5	Persentasi UCI	%	73,6	80	85	85
6	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	15,5	14,5	14	14
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18,6	13	12	12
8	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	%	9,2	9	8,9	8,9
9	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Pustu & jaringannya) dalam kondisi baik	%	85	87	90	90

10	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	90	100	100	100
11	Puskesmas yang memiliki dokter minimal 3 orang	%	69	80	90	90
12	Persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	%	94	95	96	96
13	Jumlah sarana distribusi obat yang memenuhi persyaratan	Sarana	40	80	100	180
14	Sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) memiliki Nomor SPP-IRT dan memenuhi persyaratan lainnya	Sarana	60	90	110	200
15	Jumlah HATRA (Penyehat Tradisional) yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	Sarana	3	15	20	35
16	UMOT memenuhi persyaratan dan sesuai dengan standart	Sarana	1	5	5	10
17	Keluarga yang Menerapkan PHBS	%	70	75	80	80
18	Pelayanan anak sekolah	%	90	95	97	97
3	RSU TANJUNG PURA					
1	Capaian SPM Rumah Sakit	%	85	90	93	93
2	Presentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	%	78,75	80	82	82
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,2	78	80	80
2	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	86,69	87,09	87,29	87,29
3	Persentase TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	%	60	65	70	70
4	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	85,05	85,28	85,48	85,48
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	75,51	76,51	77,51	77,51
6	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	%	80	85	90	90
7	Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR	%	22	43	65	65
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100
9	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	%	63,23	68,93	71,83	71,83
10	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	71,02	74,21	76,25	76,25
5	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1	Persentase Rumah Tidak layak Huni yang tertangani di Kawasan Kumuh	%	66,57	11,66	11,66	43,26
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani di luar Kawasan Kumuh	persen	92,17	1,70	1,70	88,78
3	Persentase Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang didukung PSU	meter	337.248	35.100	35.100	267.048
4	Jumlah rumah yang terkena bencana yang tertangani	Unit	n/a	5	7	12
6	SATPOL PP					
1	Persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen (%)	100	100	100	100
2	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	Persen (%)	100	100	100	100
3	Persentase cakupan layanan Kejadian Kebakaran	Persen (%)	100	100	100	100
4	Waktu respon penanggulangan bencana kebakaran	menit	15	15	15	15
7	BPBD					
1	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	100

2	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100	100
3	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100	100
8	SOSIAL					
1	Jumlah anak terlantar yang dibina	ANAK	n/a	30	30	60
2	Jumlah fakir miskin yang menerima bantuan	KK	n/a	65.000	65.000	130.000
3	Persentase SDM Orsos yang berkualitas	%	n/a	100%	100%	100%
4	Cakupan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pemberian layanan kepada PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA luar panti sosial	%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	100	100	100	200
7	Cakupan layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang telah dikelola	Makam	3 TMP	3 TMP	3 TMP	3 TMP
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase SDM TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang terlatih	%		100%	100%	100%
9	URUSAN KETENAGAKERJAAN					
1	Persentase peserta pelatihan yang sudah bekerja/mandiri	%	34,82	38,46	40	40
2	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	58	60	61	61
3	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Tertangani dengan PB	%	28	34	36	36
4	Dokumen perencanaan tenaga kerja	dokumen	0	0	1	1
10	PEREMPUAN DAN ANAK					
1	Persentase anggaran responsif gender (ARG) pada Belanja APBD diluar gaji	%	n/a	0,5	0,6	0,6
2	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	%	100	100	100	100
3	Persentase perempuan yang mendapatkan pemahaman peningkatan kualitas hidup keluarga	%	n/a	100	100	100
4	Persentase penyediaan data gender dan anak ter up date	%	n/a	100	100	100
5	Nilai evaluasi kabupaten layak anak	%	n/a	500	598	598
6	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilayani	%	100	100	100	100
11	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	TFR (total fertility rate)	%	2,49	2,45	2,4	2,4
2	Rasio Akseptor KB	%	72	72,5	73	73
3	ASFR 15 - 19	jiwa	22,7	22,65	22,5	22,5
4	Unmeet Need	poin	n/a	22,2	22	22
5	Persentase kelompok UPPPKS/UPPKA yang aktif	%	n/a	10	15	15
6	Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan	kelompok	n/a	25	30	30
12	PANGAN					
1	Volume Ketersediaan Pangan Strategis	Ton	146.244	154.144	156.816	156.816
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	93,4	96,4	97,9	97,90
3	Persentase penurunan desa yang rentan rawan pangan	%	14,44%	1,80%	2,16%	0,02
13	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100

2	Meningkatnya Ketaatan Penganggunjawab Usaha Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	100	100	100	100
3	Cakupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait kearifan Lokal dan Hak MHA dengan PPLH	%	100	100	100	100
4	Teridentifikasinya Masalah Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100
5	Indeks Kualitas Air	Poin	59.00	65.00	65.00	65.00
6	Indeks Kualitas Udara	Poin	56.32	59.00	59.00	59.00
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	62.00	67.00	67.00	67.00
8	Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau terpelihara, dan sarana prasarana ruang terbuka hijau	%	100	100	100	100
9	Jumlah keikutsertaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata, Jumlah Penghargaan Perorangan/ Kelompok kalpataru, penyuluhan LH	%	100	100	100	100
10	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah	%	88,49	100	100	100
14	PENCATATAN SIPIL					
1	Persentase Penduduk yang Melakukan Perekaman Data Kependudukan	%	99,28	99,40	99,45	99,45
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	95,97	96,00	96,10	96,10
3	Rata- Rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	3	2	2	2
4	Persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	%	93,9	99,40	99,00	99,00
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	%	95,97	96,00	96,10	96,10
6	Jumlah Database Kependudukan Skala Kabupaten	%	-	1	1	1
7	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	%	100	100	100	100
15	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Jumlah Desa yang mengalamai peningkatan status IDM	%	100	100	100	100
2	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa Sesuai Peraturan					
3	Jumlah Kerjasama Antar Desa	Mou	1	2	2	4
4	Cakupan desa yang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa baik	%	60	70	80	80
5	jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	1	2	2	4
6	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	%	73	78	85	85
16	PERHUBUNGAN					
1	Persentase v/c rasio di jalan Kabupaten	persen	76	73	70	70
2	Persentase Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	unit	6000	1000	1000	1000
3	Marka	unit	0	10	10	10
4	Rambu	unit	500	300	300	300
5	Persentase LPJU	%	100	100	100	100
6	Persentase Fasilitas Dermaga dalam kondisi Baik	unit	2	2	2	2
7	Dokumen Rencana Induk Kereta Api	dokumen	0	1	1	2
17	KOMUNIKASI DAN INFORMASI					
1	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	%	100	100	100	100
2	Persentase jumlah aplikasi umum SPBE yang digunakan	%	100	100	100	100
3	Persentase jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah yang sudah terintegrasi	%	85	85	100	100

18	PERSANDIAN					
1	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi dilingkup pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
2	Persentase layanan berbasis elektroknik yang memiliki sistem keamanan	%	100	100	100	100
19	STATISTIK					
1	Persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kabupaten/kota yang terintegrasi	%	100	100	100	100
20	URUSAN KOPERASI					
1	Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang undangan	%	n/a	40	45	45
2	Jumlah koperasi yang sehat	Unit	n/a	4	5	9
3	Persentase koperasi yang memilki SDM yang kompeten	%	n/a	60	70	70
4	Persentase koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha	%	n/a	45	46	46
5	Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha	Orang	n/a	75	75	150
6	Persentase UMKM yang naik kelas	%	n/a	25	30	30
21	URUSAN PENANAMAN MODAL					
1	Jumlah Dokumen/ Regulasi investasi	dokumen	1	1	1	1
2	Tingkat Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	%	-44	1,5	1,7	1,7
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	93,63	93,70	94	94
4	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	%	30	50	70	70
5	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi	%	n/a	40	70	70
22	PEMUDA DAN OLAHRAGA					
1	Persentase peningkatan organisasi pemuda	%	0,65	40	42	42
2	Jumlah wirausaha muda yang dibina	Orang	60	40	42	42
3	Jumlah Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	pelajar	45	46	48	48
4	Jumlah prestasi pemuda dalam kejuaraan olahraga	Medali/Juara	158	100	105	105
5	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Unit	425	8	8	8
23	BUDAYA					
1	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi atau dikembangkan	Objek	20	30	40	40
2	Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pembinaan/pelatihan	%	27	27	30	30
3	Dokumen/Media Informasi Sejarah yang tersedia	dokumen	10	12	15	15
4	Cagar budaya yang ditetapkan atau dikelola	cagar budaya	10	15	20	20
5	Jumlah Museum yang dikelola	museum	1	1	1	1
24	PERPUSTAKAAN					
1	Jumlah Perpustakaan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	PERPUSTKAAN	N/A	30	30	30
2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola	EKSEMPLAR	N/A	100	100	200
25	KEARSIPAN					
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Elektronik	%	N/A	1	1	1
2	Dokumen/Arsip Daerah yang dapat diselamatkan	OPD	10 OPD	20	20	40
	URUSAN PILIHAN					
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	34.268,20	39.802,07	41.792,17	81.594,24
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	8,00	25,00	25,00	50,00
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	30.252,28	35.422,15	37.193,26	72.615,41
4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	5	25	60	85
5	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	477,29	517,29	548,79	1066,1
6	Cakupan Bina Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	%	0	2	2	4

7	Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk Perikanan	%	0	2	3	5
2	PARIWISATA					
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	2	2	2	2
2	Jumlah Desa Wisata berkembang	desa	25	27	29	29
3	Jumlah Kamar Tercatat	kamar	803	820	850	850
4	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	76.514	104.119	106.200	106.200
5	Jumlah Sistem Informasi Kepariwisata	unit	4	5	6	6
6	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	hak kekayaan	0	5	10	10
7	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	orang	1.071	1.100	1.150	1.150
3	URUSAN PERTANIAN					
1	Jumlah produksi komoditi Padi	Ton	279.736	294.847	299.958	299.958
2	Jumlah produksi komoditi Jagung	Ton	97.052	98.552	99.052	99.052
3	Jumlah produksi komoditi Kelapa Sawit	Ton	747.255	769.673	777.370	777.370
4	Jumlah produksi daging	Ton	8.896	9.565	9.776	9.776
5	Jumlah produksi telur	Ton	14.624	20.578	22.795	22.795
6	Jumlah populasi ternak sapi	ekor	228.814	237.889	242.647	242.647
7	Jumlah populasi ternak domba	ekor	359.013	369.783	373.481	373.481
8	Luas lahan sawah yang diairi jaringan irigasi usaha tani	ha	6.552	100	100	100
9	Jumlah jalan usaha pertanian yang dibangun	unit	75	3	5	5
10	Persentase Kejadian Penyakit Ternak yang ditangani	%	100	100	100	100
11	Luas Pengendalian Serangan OPT/DPI	ha	348	535	585	585,00
12	Persentase Kelompok Tani yang meningkat kelasnya	%	24,63	9,85	9,85	9,85
4	PERDAGANGAN					
1	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	15	25	25	25
2	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan di kelola secara modern	unit	unit	1 unit	1 unit	2 unit
3	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan okok	%	5	5	5	5
4	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	5 Produk	15	15	15
5	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	15	20	25	25
6	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar	3 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	4 Pasar
7	Persentase Pemasaran Poduk dalam negeri	%	100	100	100	100
5	PERINDUSTRIAN					
1	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1 Sentra	2	3	3
2	Jumlah Kebijakan Perindustrian	Ranperda	1	1	2	2
3	Persentase Izin Usaha Industri yang difasilitasi	%	100	100	100	100
4	Persentase informasi Industri yang tersedia	%	48	100	100	100
	URUSAN PENUNJANG					
1	PERENCANAAN					
1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	%	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	dokumen	5	5	5	5
3	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam	dokumen	5	5	5	5
4	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	dokumen	5	5	5	5
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang memiliki inovasi	%	9,26	18,52	22,22	22,22
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
1	Persentase Usulan Formasi Calon ASN yang sesuai dengan Pengadaan Calon ASN	%	90	95	95	95

2	Persentase nilai IP ASN OPD dengan Nilai Sedang		0	60	70	70
3	Nilai SKM	predikat	baik (89,62)	baik (90,00)	baik (91,00)	baik (91,00)
4	Persentase ASN yang memiliki nilai kinerja baik	%	81,35	83	85	85
5	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat PIM Pertama	orang		10	15	25
	URUSAN KEUANGAN					
1	BPKAD					
1	Persentase pengesahan anggaran tepat waktu	%	100	100	100	100
2	Persentase laporan keuangan sesuai standar dan aturan	%	100	100	100	100
3	Persentase laporan aset sesuai standar dan standar	%	100	100	100	100
2	BAPENDA					
1	Tingkat pertumbuhan PAD	%	20	5	6	
	FUNGSI LAINNYA					
1	SEKRETARIAT DAERAH					
1	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan antar pemerintah daerah	MoU	15	15	15	15
2	Jumlah Festival, dan event keagamaan	Kegiatan	11	14	14	14
3	Cakupan peraturan kepala daerah yang dapat diakses secara online	%	100	100	100	100
4	Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat yang terbentuk	Unit	2	2	2	2
5	Persentase peningkatan harga barang pokok yang tersubsidi	%	80	100	100	100
6	Terwujudnya koordinasi pengembangan perekonomian daerah, SDA dan peningkatan kinerja BUMD	%	100	100	100	100
7	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	%	100	100	100	100
8	Persentase proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tepat waktu	%	100	100	100	100
2	SEKRETARIAT DPRD					
1	Persentase produk hukum yang diselesaikan	%	100	100	100	100
2	Persentase pembahasan penganggaran yang diselesaikan	%	100	100	100	100
3	Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	%	100	100	100	100
4	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	%	100	100	100	100
5	Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
6	Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100
3	INSPEKTORAT					
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan (Keuangan Negara/ Daerah dan Administrasi)	Persen(%)	84	88	89	89
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	BAHOROK					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	55	55
2	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	55	55
3	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55	55	55
4	Jumlah Festival dan Evant Keagamaan	%	3	100	100	100
5	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	55	55

2	SALAPIAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	55	55
2	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	55	55
3	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55	55	55
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	100	100	100
5	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	55	55
3	KUALA					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	97.35	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	92.48	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	1	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	99.98	100	100	100
4	SELESAI					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	65%	70%	75%	75%
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	50%	60%	70%	70%
3	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	3	3	3	3
4	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	50%	50%	70%	70%
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	98%	100%	100%	100%
5	SEI BINGEI					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	55	55
2	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	55	55
3	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55	55	55
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	100	100	100
5	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	55	55
6	BINJAI					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
7	STABAT					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	81,97	81,99	82	82
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	1	2	2	2
4	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	88 %	89 %	90 %	90 %
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD	%	90%	92%	93%	93%
8	WAMPU					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100

2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
9	SECANGGANG					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
10	HINAI					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
11	TANJUNG PURA					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
12	GEBANG					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	80	85	85	85
2	Persentase Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	100	100	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	4	4	4	4
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan Dana Desa	%	100	100	25000000	100
13	BABALAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	4	4	4	4
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
14	BRANDAN BARAT					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	80	85	85	85
2	Persentase Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100

3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	100	100	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	4	4	4	4
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan Dana Desa	%	100	100	100	100
15	SEI LEPAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
16	PANGKALAN SUSU					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
17	BESITANG					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	84,54	90	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	140	150	170	170
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
18	PADANG TUALANG					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	60	60
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	50	55	60	60
3	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	4	4	5	5
4	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	50	55	60	60
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	50	55	60	60
19	SAWIT SEBERANG					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	55	55
2	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	55	55
3	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	50	55	55	55
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	100	100	100
5	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	55	55
20	BATANG SERANGAN					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	55	55
2	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	50	55	55	55
3	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	%	50	55	55	55
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	3	100	100	100

5	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	50	55	55	55
21	KUTAMBARU					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	83,5	95	100	100
2	Persentase Desa / Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dengan Melibatkan Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	Kegiatan	80	90	100	100
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	4	5	5
5	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	100	100	100	100
22	PEMATANG JAYA					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	%	55	60	75	75
2	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan dengan melibatkan masyarakat	%	80	95	95	95
3	Persentase keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan	75	95	95	95
4	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	%	3	100	100	100
5	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan DD	%	75	85	95	95
23	SIRAPIT					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	%	50	55	60	60
2	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan	4	4	4	4
3	Persentase Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosial	%	50	55	60	60
4	Tingkat Realisasi Penyerapan ADD dan DD di Desa	%	50	55	60	60
1	KESBANGPOL					
1	Cakupan kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Yang Melibat partisipasi Masyarakat	Persen	100	100	100	100
2	Cakupan Kegiatan Pendidikan Partai Politik Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat/Partai Politik	Persen	100	100	100	100
3	Cakupan Organisasi Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan	Persen	100	100	100	100
4	Jumlah Kasus Pekat	Persen	100	100	100	100
5	Cakupan Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	100	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. RPD Kabupaten Langkat digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026. Dalam penyusunan RPD ini melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program yang telah disusun, pelaksanaan RPD Kabupaten Langkat Tahun 2025-2026 menjadi tanggung jawab Bersama baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, dunia usaha, swasta , meupun Masyarakat.

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI

SYAH AFANDIN